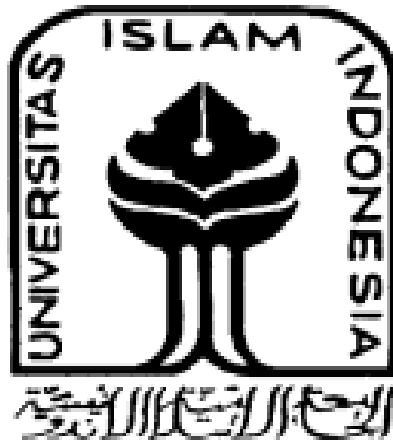


**STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS PEMERINTAHAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR DALAM MEMBANGUN CITRA POSITIF IBU KOTA
NUSANTARA**



**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia**

**Disusun Oleh :
Aditya Arta Listianto
(19321260)**

**Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta
2024**

STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR DALAM MEMBANGUN CITRA POSITIF IBU KOTA NUSANTARA

ADITYA ARTA LISTIANTO

Telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing
Skripsi Tanggal: Rabu, 31 Oktober 2024

Narayana Mahendra Prastya, S.Sos, M.A

NIDN 0520058402

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR DALAM MEMBANGUN CITRA POSITIF IBU KOTA NUSANTARA

Disusun oleh :

ADITYA ARTA LISTIANTO

19321260

Telah Diuji dan disahkan oleh Dosen Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosiasl Budaya Universitas Islam Indonesia

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 13 November 2024

Dosen Penguji :

Ketua : Narayana Mahendra Prastya, S.Sos, M.A. (.....
NIDN 0520058402

Anggota : Ratna Permatasari, S.I.Kom., M.A. (.....
NIDN 0509118601

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aditya Arta Listianto

Nomor Mahasiswa : 19321260

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setuju dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 13 November 2024

Yang menyatakan,



(ADITYA ARTA LISTIANTO)

MOTTO

Skripsi bukan hanya sebuah tugas akhir, tapi juga perajut mimpi dan penempa masa depan. Di setiap kata yang tersusun, terukir harapan dan ambisi untuk meraih cita-cita. Skripsi ini adalah batu loncatan untuk melangkah ke dunia yang lebih luas, mengantarkan pada gerbang kesuksesan yang gemilang.

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orangtua saya tercinta
2. Adik saya tersayang
3. Sahabat dan orang-orang terdekat saya
4. Orang spesial yang menemani di saat duka maupun senang
5. Para peminat pengetahuan tentang limbah bumi serta *fashion*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Strategi Komunikasi Humas Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Membangun Citra Positif Ibu Kota Negara Baru di Mata Masyarakat". Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Saya menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Narayana Mahendra Prastya, S.Sos, M.A selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan ilmunya, waktu, serta tenaga untuk membimbing saya dari awal pembuatan tugas akhir ini hingga selesai.
2. Kedua Orangtua saya tercinta, atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2019, atas semangat dan motivasi yang selalu diberikan.
3. Seluruh teman-teman saya yang telah selalu ada untuk saya dan memberi dukungan penuh atas selesainya skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Komunikasi.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta,

Aditya Arta Listianto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	VII
DAFTAR GAMBAR.....	IX
DAFTAR TABEL	X
LAMPIRAN.....	XI
ABSTRAK	12
ABSTRACT	13
BAB 1	14
PENDAHULUAN.....	14
1.1. Latar Belakang	14
1.2 Rumusan Masalah	21
1.3 Tujuan Penelitian.....	21
1.4 Manfaat Penelitian.....	21
1.5 Penelitian Terdahulu.....	21
1.6 Kerangka Teori.....	25
1.7 Metode Penelitian.....	34
BAB II	38
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	38
A. IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara	38
B. Humas Kalimantan Timur	42
C. Peran Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dalam IKN	45
BAB III.....	47
TEMUAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Tugas dan kewenangan humas Kaltim dalam komunikasi publik terkait Ibukota Nusantara.....	48
a) Penyusunan program komunikasi publik.....	48
b) Pelaksanaan komunikasi publik.....	48
c) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	48
d) Pengembangan komunikasi publik	48

e) Pemantauan dan evaluasi komunikasi publik.....	48
B. Fokus strategi komunikasi dalam pembentukan citra positif IKN	49
C. Bentuk komunikasi dalam membentuk citra positif IKN.....	58
D. Aktivitas kehumasan yang dilakukan oleh humas Kaltim dalam membentuk citra IKN.....	64
E. Tahapan strategi komunikasi dalam membentuk citra positif IKN	78
1. Aktivitas pada analisis situasi	78
2. Aktivitas pada problem identification	87
3. Aktivitas pada problem solution.....	87
F. Sumber pembandingan.....	91
1. Media Lokal	91
2. Masyarakat Lokal Kaltim	92
G. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya.....	94
BAB IV	98
PENUTUP	98
A. Simpulan.....	98
B. Keterbatasan Penelitian.....	101
C. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Ilustrasi IKN	38
Gambar 2. 2 Pegawai/Staff Adpim (Humas Kaltim)	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Narasumber	47
-----------------------------	----

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Surat Keterangan Wawancara bersama humas Kaltim	105
---	-----

ABSTRAK

Listianto, Aditya Arta. 19321260. *Strategi Komunikasi Humas Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Membangun Citra Positif Ibu Kota Negara Baru di Mata Masyarakat*. Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.

Penelitian ini mengkaji strategi komunikasi Humas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam membangun citra positif Ibu Kota Nusantara (IKN). Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya citra positif untuk IKN di tengah berbagai pro dan kontra dari masyarakat. Pemilihan objek penelitian Humas Pemprov Kaltim didasarkan pada peran strategis mereka dalam menyampaikan informasi dan mengatasi ketidakpuasan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan Bapak Syafrudin, Kepala Biro Humas, dan Ibu Rahma Dewi, staf Humas, serta analisis data sekunder dari laporan dan artikel terkait. Waktu penelitian berlangsung selama lima bulan dari Agustus 2023 hingga Januari 2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Humas Pemprov Kaltim telah efektif dalam membangun citra positif IKN melalui penggunaan media sosial, penyelenggaraan acara, dan keterlibatan masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam menjangkau audiens yang lebih luas dan mengelola persepsi negatif. Diperlukan strategi yang lebih transparan dan proaktif untuk meningkatkan kepercayaan publik. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan strategi komunikasi kehumasan di sektor pemerintahan, khususnya dalam konteks pemindahan ibu kota.

Kata kunci: Ibu Kota Nusantara, Humas Pemerintah, Strategi Komunikasi, Citra Positif, Pemindahan ibu kota.

ABSTRACT

Listianto, Aditya Arta. 19321260. *Communication Strategy of the East Kalimantan Provincial Government Public Relations in Building a Positive Image of the New National Capital in the Eyes of the Public*. Bachelor's Degree Communication Thesis. Communication Science Program, Faculty of Psychology and Social Sciences, Universitas Islam Indonesia.

This research examines the communication strategies of the Public Relations Department of East Kalimantan Province in building a positive image for the Nusantara Capital City (IKN). The urgency of this study lies in the importance of a positive image for IKN amidst various pros and cons from the public. The choice of the Public Relations Department of East Kalimantan as the research subject is based on their strategic role in conveying information and addressing public dissatisfaction. This study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with Mr. Syafrudin, the Head of the Public Relations Bureau, and Ms. Rahma Dewi, a staff member, along with secondary data analysis from related reports and articles. The research was conducted over six months, from January to June 2024.

The findings indicate that the communication strategies employed by the Public Relations Department of East Kalimantan have been effective in building a positive image of IKN through the use of social media, event organization, and community engagement. However, there are still challenges in reaching a broader audience and managing negative perceptions. More transparent and proactive strategies are needed to enhance public trust. This research is expected to serve as a reference for developing communication strategies in the governmental sector, particularly in the context of capital relocation.

Keywords: National Capital Nusantara, Government Public Relations, Communication Strategy, Positive Image, Capital relocation.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana pemerintah dalam memindahkan IKN atau Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur telah diumumkan langsung oleh presiden Jokowi sejak tahun 2019. “Menurut Presiden, pemilihan lokasi di Kalimantan Timur itu didasari beberapa pertimbangan, yaitu: 1. Resiko bencana minimal (baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor; 2. Lokasi strategis (berada di tengah-tengah Indonesia), 3. Bedekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda). 4. Telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. 5. Sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar” (Kominfo, 08:2019). Pada bulan Januari tahun 2023 pemerintah telah memasuki tahap konstruksi kuartal 1. Terhitung saat ini pembangunan pemindahan IKN sudah mencapai 15%. pemerintah merencanakan pembangunan IKN selesai pada tahun 2024 sehingga pada hari kemerdekaan tahun tersebut sudah dapat dilaksanakan di IKN Penajam Paser. Infrastruktur dasar ini mencakup pembangunan bendungan, jalan tol, rusun untuk pekerja, hingga jembatan.

Masyarakat menilai persiapan pemindahan ibu kota yang dipimpin pemerintah itu dinilai belum optimal. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak terbuka terhadap opini publik mengenai hal tersebut, sehingga ada perasaan bahwa pemerintah belum siap untuk memindahkan ibu kota. Selain itu, masih banyak persoalan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan bidang-bidang penting lainnya yang belum terselesaikan secara tuntas. Oleh karena itu, hal seperti ini menimbulkan persepsi masyarakat bahwa pemerintah belum siap dan merasa kurang bijaksana dalam mengambil kebijakan terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Hal ini terlihat dari banyaknya masalah dan pekerjaan yang belum terselesaikan di Indonesia. Dikutip dari CNN Indonesia, sejak diumukannya pemindahan IKN pada tahun 2019 hingga disahkan pada tahun 2022 masyarakat setempat belum mendapatkan kepastian terkait lahan tinggal maupun ladang perkebunan dan pertanian yang terkena dampak pembangunan IKN. Masyarakat setempat

merasa jika tidak ada kepastian secara hukum maka sewaktu-waktu mereka kesusahan untuk mendapatkan hak.

Beberapa generasi milenial di Kalimantan Timur (Kaltim) buka suara untuk petisi menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara (PPU). Dalam waktu kurang dari seminggu, lebih dari 24.000 orang menandatangani proposal penolakan online di laman [change.org](https://www.change.org) berbasis web. Kaum milenial menilai langkah pemerintah memindahkan IKN ke DKI dari Jakarta ke Kaltim merupakan pembangunan yang berkeadilan. Namun, ada hal yang diperhatikan sebelum pindah. Kebijakan transisi IKN tidak boleh prematur, karena cepat. Sehingga harus diperhatikan dengan seksama dan melibatkan warga khususnya yang berada di lingkungan IKN.

Presiden Joko Widodo disebut-sebut telah menyerap aspirasi dan dukungan masyarakat setempat terkait pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Namun, beberapa petani di calon ibu kota baru telah mempertanyakan permintaan bantuan ini. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah diundang untuk membahas proyek tersebut, baik oleh pemerintah maupun oleh perwakilan masyarakat adat. Menurut peneliti, pemerintah pusat melibatkan masyarakat lokal di level paling bawah dalam proses perencanaan ibu kota baru sejak awal. Diduga non-inklusif, jangan sampai proyek ini mengabaikan kelas bawah. Pertengahan Januari tahun 2022 sekelompok warga dari Persatuan Masyarakat Kaltim menolak rencana ibu kota baru. Salah satu alasannya adalah karena RUU berbasis proyek dibahas secara tertutup tanpa partisipasi masyarakat setempat. Misalnya, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 11/2021, kementerian dan lembaga pemerintah menyelenggarakan konsultasi publik saat menyusun undang-undang. Tujuannya adalah untuk meninjau umpan balik dari komunitas yang terkena dampak dan kelompok lain.

Tenaga Ahli kantor staf Presiden, Wandy Tuturoong mengatakan pemerintah telah melibatkan berbagai sektor masyarakat Kalimantan Timur dalam proyek ini sejak 2019. Wandy mengatakan Bappenas dan instansi pemerintah lainnya telah berulang kali menyerap aspirasi masyarakat setempat. Meski ada pihak yang mengaku belum pernah berpartisipasi, Wandy mengatakan prinsip partisipasi proyek akan tetap diterapkan. Pemimpin Adat Dayak Kenyah Medan Tedung, yang juga hadir dalam pertemuan dengan Jokowi, meminta masyarakatnya diberi kursi di pengurus ibu kota baru. Selain

mempromosikan kearifan lokal, Medan meminta pemerintah untuk melibatkan penduduk setempat dalam pembangunan material ibu kota baru. Persyaratan lainnya adalah pembukaan pusat pelatihan yang berkualitas khusus untuk penduduk setempat. Ajang mengatakan Jokowi tidak menemui seluruh perwakilan masyarakat Kaltim untuk memahami aspirasinya. Selain itu, hingga saat ini, Bappenas sudah sering berpartisipasi dalam beberapa kelompok dalam musyawarah masyarakat.

Pengurus Harian (Plh) Perwakilan Inisiatif Tambunan, Koordinator Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) Mohammad Syaifullah dan Koordinator Pengawasan Riset Hisyam Wahyudi mengajak untuk mengikuti spreadsheet BUMN/BUMD/BLU/BLUD tentang kerjasama kontrak TTK dan pembangunan infrastruktur yang diperbarui setiap dua bulan. Dengan kerjasama yang baik diharapkan pengawasan kegiatan pembangunan infrastruktur IKN Nusantara berjalan lancar, efektif, efisien dan bertanggung jawab. Perwakilan BPKP telah bertugas mengelola urusan publik di bidang pengendalian keuangan negara/daerah dan pembangunan negara. Dalam mengawasi pengadaan tanah dan pembangunan infrastruktur IKN, BPKP memberikan penjaminan dan konsultasi kepada pemangku kepentingan terkait. Perwakilan BPKP dari Provinsi Kalimantan Timur melakukan beberapa pemantauan perkembangan IKN dan kegiatan pemantauan terkait FGD. Tujuannya untuk mengetahui permasalahan di lapangan serta mengidentifikasi dan memetakan risiko yang ada. Setelah menganalisis risiko, penyebab risiko dimitigasi dengan mengembangkan rencana perbaikan yang cepat dan tepat.

Public Relations (PR) atau biasa dikenal menggunakan Humas merupakan sebuah divisi berasal sebuah usaha, instansi pemerintah atau organisasi. Selain itu, humas mempunyai kepentingan masyarakat yang lebih luas seperti humas pada instansi pemerintah. Adanya kecepatan serta ketepatan berita yang disampaikan supaya masyarakat mendapatkan isu yang sinkron dengan kebutuhannya. Hal ini memungkinkan terjadinya komunikasi yang baik untuk mencapai tujuan instansi. Humas artinya sesuatu yang tidak asing lagi bagi setiap organisasi pemerintah, forum pendidikan atau organisasi bisnis. korelasi masyarakat memainkan kiprah krusial pada semua organisasi, karena hubungan masyarakat merupakan strategi untuk membuat gambaran perusahaan baik positif juga negatif. hubungan masyarakat tak jarang memiliki hubungan yg luas pada

membuat gambaran suatu organisasi. pada penelitian hubungan masyarakat, hubungan masyarakat memiliki 2 tanggung jawab. dengan istilah lain, itu merupakan peran insinyur serta manajer. Humas pada awalnya melayani tiga kiprah: menjadi penyedia penjelasan, yaitu menjadi penasihat buat mendefinisikan duduk perkara, mengusulkan pilihan, dan mengawasi implementasi kebijakan. kedua, fasilitator komunikasi biasanya bekerja pada organisasi yang bekerjasama langsung dengan lingkungan di mana interaksi serta komunikasi dibina. Ketiga, menjadi pemecah duduk perkara, menjadi seorang yang bekerja dengan orang lain untuk mengidentifikasi serta memecahkan persoalan.

Tugas utama staf PR merupakan membentuk kesan. Kesan adalah sesuatu yang dirasakan atau dipikirkan perihal seorang, produk atau situasi, yang selaras menggunakan tingkat pemahaman masyarakat, sebagai akibatnya tugas humas ialah membentuk kesan yang baik tentang orang, produk, atau situasi. Tugas primer humas yang ke 2 ialah pengetahuan serta pemahaman, humas memegang peranan yang sangat penting dalam menyajikan informasi kepada khalayak internal serta eksternal menggunakan memberikan info yang mendalam dan dalam format yg praktis dipahami. Ketiga, menggunakan membangkitkan minat, PR pula wajib bisa membangkitkan minat publik pada situasi tertentu yang berdampak besar bagi organisasi. Tugas keempat humas ialah mendapatkan, humas bertanggung jawab buat menginformasikan publik perihal situasi atau insiden yang disebabkan oleh perilaku bermusuhan, kurangnya pemahaman yang ada di sekitar mereka, mungkin berbeda berasal pemahaman serta penerimaan. serta terakhir simpati, Humas wajib mampu berkata info secara jelas kepada publik supaya memperoleh simpati.

Dalam kajian operasi kehumasan, dua peran utama muncul secara sistematis dalam kehumasan, yaitu peran teknisi dan peran manajer. Peran teknisi adalah mempublikasikan penulisan berita, pengeditan berita, komentar berita, fotografi, manajemen produksi media, pembuatan acara khusus, berkomentar, menulis, komunikasi dengan media / jurnalis, kemampuan memanfaatkan teknologi informasi. Peran manajemen adalah membantu organisasi mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Humas memiliki tiga peran: juru bahasa, orang yang mengidentifikasi masalah, mengusulkan opsi, dan memberi saran untuk mengawasi implementasi kebijakan. Sebagai fasilitator komunikasi, orang ini merupakan batas antara organisasi dan

lingkungan yang memelihara komunikasi dua arah. Sebagai pemecah masalah, asisten dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Menjadi humas tidak mudah, tetapi dengan pikiran yang kuat untuk memahami dan melaksanakan niat pemimpin, terutama mengenai citra pemimpin dan beban psikologis yang dipikul pemerintah tidak mempengaruhi operasi, menjadi humas memiliki keberanian. Ada pasang surut dalam menjalankan pekerjaan sebagai humas, baik secara pribadi maupun institusional. Yang terpenting semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh manajemen dilaksanakan sesuai dengan keinginan pemimpin. Ke depan, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Keterbukaan dan Keterbukaan Informasi Publik, semua informasi yang berhubungan langsung dengan publik wajib diungkapkan kecuali informasi yang berkaitan dengan rahasia negara. Oleh karena itu, peran humas akan menjadi semakin sulit, terutama ketika menentukan informasi apa yang tersedia dan apa yang tidak tersedia bagi pelamar.

Pengelolaan pemerintahan dan kebijakan publik menjadi tanggung jawab humas pemerintah (government public relations). Oleh karena itu, kewajiban humas pemerintah termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan informasi yang dicari secara terbuka, jujur, dan tidak memihak serta menginformasikan dan mendidik masyarakat tentang kebijakan, kegiatan, dan perilaku pemerintah. Media sangat mengandalkan pemerintah sebagai sumber informasi, sehingga opini publik sangat penting. Pemerintah juga mendidik khalayak domestik dan internasional tentang realitas ekonomi dan budaya bangsa. Terakhir, mengawasi opini publik mengenai kebijakan pemerintah dan kemudian menyampaikannya kepada pejabat instansi pemerintah terkait dalam bentuk komentar. rencana komunikasi yang sempurna mengajarkan PR dan orang-orang PR untuk melihat peluang dan mengambil tindakan yang di luar kemampuan mereka. Selain itu, PR/PR mendeteksi di mana dan bagaimana komunikasi terjadi. serta dalam menciptakan atau mempertahankan persepsi yang baik tentang organisasi pemerintah.

Memperjelas kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah, melaksanakan hubungan internal dengan instansi pemerintah dan satuan kerja, berupaya memperluas cakupan kegiatan pemerintah dan masyarakat, dan memastikan koordinasi/kerjasama dengan organisasi media adalah tugas seorang humas pemerintahan. Dengan menjalankan peran

advokasi pemerintah, tujuan akhirnya adalah menciptakan citra positif pemerintah di mata publik. Gambar mencerminkan pikiran, perasaan, dan persepsi pribadi orang. Bahkan bila orang melihat hal yang sama, pandangan mereka mungkin tidak sinkron. Persepsi ini menghasilkan citra organisasi. Sifat objektif humas dalam dunia pemerintahan ialah melaksanakan banyak sekali program pemerintah yang bisa membangun, menaikkan, dan memelihara citra serta reputasi positif guna memperoleh manfaat asal publisitas positif, dukungan serta empati pejabat pemerintah. Citra ini secara sadar diciptakan melalui hubungan rakyat di dunia pemerintahan pada bentuk event, kampanye dan acara.

Meski berganti nama dari Kantor Humas menjadi Kantor Pimpinan Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Timur, tidak ada pertukaran tugas dan fungsi pokok (tupoksi). Kepala Kantor Adpim Setda Provinsi Kaltim HM Syafranuddin saat mengunjungi GM Bisnis PT Mahakam Media Graphics GM Erika Oktoviani yang membawahi Harian Tribun Kaltim mengatakan dalam Pasal 138 Perda Gubernur Kaltim Nomor 18 Tahun 2021 ditegaskan. Bagian Bahan Komunikasi Pimpinan (MKP) bertanggung jawab atas penyiapan dokumen, pencatatan dan pengungkapan kegiatan pimpinan yaitu Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, staf ahli dan seluruh kantor Sekretariat Daerah Kalimantan Timur. Namun, kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah tidak terbatas pada Sekretariat Daerah saja, melainkan seluruh DPO dan masyarakat. Oleh karena itu, Kantor Adpim sangat penting untuk memberikan layanan mulai dari acara hingga publikasi, baik melalui website yang ada maupun melalui sesama jurnalis.

Tidak hanya pemerintah bagian BPKP saja yang berperan penting namun pemerintah humas juga berperan penting dalam proses pembangunan IKN. Pada tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim menyelenggarakan forum di Bakohuma dengan tema “Peran silaturahmi dalam mendorong kehadiran IKN dan masa depan Kaltim”. pesertanya yaitu BUMN/BUMD, dalam menyediakan informasi kepada perguruan tinggi dan rumah sakit seperti informasi publik tentang IKN dengan berita terkait ibu kota Nusantara dalam bahasa yang sama. Lalu apa yang dibutuhkan ibu kota nusantara, sebagai persyaratan yang terkadang tidak dikomunikasikan kepada publik. Humas pemerintah memiliki tanggung jawab untuk

menyampaikan informasi yang baik dan benar, yang seringkali menimbulkan informasi yang simpang siur, maka Humas menyampaikan karena kita sebagai pemerintah harus netral dalam menyampaikan informasi yang baik dan benar. Misalnya, pengiriman dan bahkan pengiriman solusi terkait Sumber Daya Manusia (SDM) mungkin tidak menjangkau publik. Nantinya jangan sampai terjadi salah paham, tujuan dari forum Bakohumas ini adalah mendapatkan ide yang tepat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perselisihan. Penyelenggaraan Bakohumas Forum 2022 ini menginformasikan kepada masyarakat bahwa berkantor di IKN Nusantara. Begitu dikomunikasikan, otomatis kita tahu, jadi kita juga siap meng-upgrade skill atau kemampuan.

Ada lima tantangan untuk menangani ibu kota negara baru. Pertama, interaksi sosial dengan masyarakat setempat. Sifat dari proses komunikasi tidak hanya untuk menginformasikan tentang pemindahan, tetapi juga untuk menyesuaikan mekanisme, termasuk memastikan penggusuran penduduk setempat. Kedua, komunikasi politik dengan elite yang bertentangan dengan kebijakan (oposisi) IKN. Alasan pindah ke ibu kota dicoba dikomunikasikan dengan segala cara. Ketiga, melaporkan korupsi antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam cukup banyak proyek yang didukung oleh program APBN, kerjasama antara negara dan dunia usaha, termasuk investasi langsung dari sektor swasta, rentan terhadap penyalahgunaan anggaran. Keempat, pelaporan bencana mengacu pada potensi risiko lingkungan. Tentunya pembangunan infrastruktur ibu kota negara baru tidak lepas dari konsekuensi ekologis terkait. Kelima, komunikasi terpadu antara pemerintah pusat dan daerah. Model komunikasi tidak bisa hanya top-down, tapi bottom-up.

Dengan demikian penelitian ini bersifat penting karena isu yang baru serta menganalisis bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh humas atau public relation dari pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur agar membentuk dan membangun citra yang baik di mata publik. Bukan hanya citra baik untuk masyarakat lokal Provinsi Kalimantan Timur melainkan juga untuk para masyarakat Indonesia yang lainnya. Karena sejatinya pemindahan ibu kota negara baru ini akan melibatkan segala struktur pusat pemerintahan dan melibatkan banyak masyarakat lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dasar di atas, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Strategi Komunikasi yang digunakan Humas Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dalam membangun citra positif Ibu Kota Nusantara Baru dimata publik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi komunikasi yang digunakan oleh humas pemerintah provinsi Kalimantan Timur untuk membangun citra positif di mata publik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang diperhatikan agar tercipta gambaran yang baik tentang isu-isu baru yang menjadi perhatian semua sektor masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana citra humas yang dibangun oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur telah berdampak pada masyarakat Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan menjadi referensi serta acuan bagi penelitian selanjutnya khususnya di bidang strategi kehumasan pemerintahan. Selain itu penelitian ini diharapkan membedah cara-cara sekaligus faktor apa saja yang dapat dilakukan seorang humas untuk membangun sebuah citra yang positif khususnya dalam strategi komunikasi sehingga dapat diterapkan pada humas-humas di pemerintahan atau instansi lainnya.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pertama berjudul “ **Strategi Komunikasi Humas Dalam Meningkatkan Citra Positif Pemerintah Kabupaten Langkat (Studi Kualitatif Pada Humas Pemerintah Kabupaten Langkat)**” ditulis oleh Alya Nur Sabrina, dari Universitas Sumatra Utara pada tahun 2019. Tujuan awal dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengkaji taktik komunikasi kehumasan yang digunakan untuk memahami citra Pemerintah Kabupaten Langkat dan meningkatkan persepsi positifnya. Hubungan masyarakat, hubungan masyarakat pemerintah, hubungan masyarakat, dan teori citra semuanya digunakan dalam penelitian ini. Contoh konstruktivisme dan metodologi penelitian kualitatif digunakan dalam karya ini. Wawancara dan observasi lapangan digunakan sebagai data primer dalam teknik pengumpulan data, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari sumber arsip. Tiga langkah yang membentuk teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan bahwa warga Kabupaten Langkat memiliki pandangan positif terhadap pemerintah di sana. Reputasi pemerintah Kabupaten Langkat dapat dipengaruhi secara negatif oleh strategi komunikasi yang digunakan, seperti menjaga saluran komunikasi, mengatur dan mempersiapkan hubungan masyarakat untuk pemerintah Kabupaten Langkat, dan menjaga keterbukaan dan berita publik. Berdasarkan hal tersebut, variabel yang mempengaruhi reputasi positif Pemerintah Kabupaten Langkat antara lain kemajuan sistem, terpeliharanya hubungan baik dan kerjasama antara perwakilannya dengan masyarakat, dan aksesibilitas informasi.

Penelitian terdahulu yang kedua berjudul “**Strategi Komunikasi Humas Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Kota Probolinggo**” yang ditulis oleh Anyelir Puspa Ayudia dan Siti Dri Wulandari dari Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2021. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami reputasi Kota Probolinggo, mengkaji pendekatan humas yang digunakan untuk mempromosikan citra positif kota, dan mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan masyarakat umum dan hubungan masyarakat yang dikelola Kota Probolinggo. Komunikasi, seni mengelola komunikasi, hubungan masyarakat, hubungan masyarakat pemerintah, hubungan masyarakat, pentingnya hubungan masyarakat, dan citra positif adalah teori-teori yang

digunakan dalam penelitian ini. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini. Ada dua penggugat. Mereka berdua bekerja di kantor informasi dan komunikasi Probolinggo, salah satunya sebagai direktur kantor dan yang lainnya sebagai staf. Menggunakan wawancara langsung dan observasi langsung sebagai sumber data utama, teknologi pengumpulan data.

Penelitian terdahulu yang ketiga berjudul **“Strategi Humas Kota Bandung Melalui Media Sosial Instagram Dalam Meningkatkan Citra Pemerintahan Kota Bandung”** ditulis oleh Reza Antoni dari Universitas Komputer Indonesia, Bandung pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi Humas Kota Bandung melalui jejaring sosial Instagram dan buat menaikkan citra pemkot Bandung menggunakan pesan sekunder, kendala dan tujuan. Penelitian ini memakai metode kualitatif menggunakan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengambilan sampel yang disengaja buat mengidentifikasi pelapor serta pelapor yang dipilih berdasarkan kebutuhan mereka. Data survei diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara mendetail, penelusuran literatur, penelusuran literatur, dan survei internet. Tujuan Humas Kota Bandung merupakan buat mempromosikan citra pemkot Bandung melalui jejaring sosial Instagram, karena jejaring sosial Instagram ialah media yang saat ini tersedia serta dipergunakan sang masyarakat luas menggunakan akses cepat ke jejaring sosial Instagram.

Penelitian terdahulu yang ke empat berjudul **“ Strategi Public Relation Humas Pemerintah Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Citra Positif Melalui Media Relations”** ditulis oleh Alfi Fatin Nabilah dari Institut Agama Islam Negri Jember pada tahun 2020 untuk mendapat gelar sarjana sosial. Tujuan asal penelitian ini adalah untuk mengungkap strategi kehumasan pemerintah Kabupaten Jember melalui hubungannya dengan media dan untuk menaikkan citra positif dan kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Jember dalam melakukan aktivitas kehumasan buat meningkatkan citra positif. Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mengungkapkan strategi humas Pemerintah Kabupaten Jember melalui media relations dengan menaikkan citra positifnya dan kendala Pemerintah Kabupaten Jember dalam menjalankan hubungannya dengan warganya. Pendekatan yang dipergunakan dalam survei ini ialah pendekatan kualitatif

dengan menggunakan jenis survei deskriptif, dimana metode pengumpulan datanya memakai observasi, wawancara, dan dokumen, sedangkan teknik jeda dipergunakan untuk mengidentifikasi topik survei. Analisis data yang dipergunakan pada model Miles serta Huberman terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan konklusi dan validasi inferensi, dan menggunakan triangulasi asal untuk memverifikasi keabsahan data. oleh sebab itu, dalam penelitian ini, data yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember merupakan media lokal, penemuan melalui penerbitan dan peningkatan kesadaran, media umum dan peningkatan kualitas website resmi Jember. pemda melalui sosialisasi melalui kerjasama pihak ketiga serta pemberdayaan warga lokal. Keterbatasan pada menerapkan strategi Humas antara lain kurangnya tenaga profesional Humas di lingkungan Humas Kabupaten Jember, keterbatasan anggaran untuk sosialisasi serta pengungkapan Humas, dan akses berita berbasis teknologi pada warga .

Penelitian Kelima yaitu berjudul **“Peranan Humas Pemerintahan (Government Public Relations) dalam Menciptakan Reputas Pemerintahan yang Baik”** ditulis oleh Oktri Permata Lani dan Benni Hnadayani dalam jurnal Ilmu Komunikasi pada tahun 2021. kiprah urusan publik pemerintah di era kemajuan teknologi serta berita bukan lagi peran mediator info, namun sebagai elemen strategis untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program pemerintah. Secara khusus, ini membangun reputasi tata pemerintahan yang baik pada masyarakat. oleh karena itu, peran humas sebagai lebih aktif, mengemas berita dan isu yang tidak sejenis di masyarakat dan menyelaraskannya dengan informasi yang benar, seimbang, dan proporsional agar rakyat tidak keliru paham. Itu mampu dikembangkan. informasi sentral dari penelitian ini ialah peran humas pemerintah dalam menaikkan citra pemerintah pada mata publik, serta tujuan dan fungsi humas pemerintah dalam menghasilkan humas yang baik. Kedudukan pemerintah berasal sudut pandang masyarakat. Metode pencarian didasarkan pada tinjauan literatur. kegiatan hubungan masyarakat berdasarkan di penelitian, perencanaan, dan evaluasi yang berfokus. Proses kerja PR adalah proses sirkulasi yang berkesinambungan dan proses spiral yang berkesinambungan. Menjalankan fungsi humas atau hubungan masyarakat memerlukan aneka macam keahlian yang terpercaya, staf yang terpercaya, dukungan, koordinasi, perhatian terhadap detail, serta aplikasi yang

profesional. Humas wajib bisa memperoleh keterampilan teknis buat menyebarkan berita untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh humas. dengan pendekatan ini, aktivitas Humas menggunakan banyak sekali saluran komunikasi, diantaranya komunikasi interpersonal, komunikasi publik, komunikasi grup, baik media massa cetak maupun audiovisual, dan media baru.

1.6 Kerangka Teori

A. Strategi Komunikasi

Menurut Onong Uchjana Effendy (2009) mengatakan bahwa, strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*). Sedangkan menurut Rogers (2013) strategi komunikasi adalah suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Namun, menurut Middleton (2013) yang terbaik dari semua elemen komunikasi dari komunikator, pesan, saluran penerima sampai pada efek yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi. Strategi komunikasi memberi arah dalam penyusunan-penyusunan pesan dalam sosialisasi program kegiatan, memberi pedoman bagi substansi sosialisasi program kegiatan, dan memastikan bahwa pelaksanaan sosialisasi mampu mengadvokasi dan mendorong semua partisipan komunikasi untuk mengembangkan lebih lanjut program komunikasi. Strategi pesan dalam perencanaan komunikasi memiliki dua fokus besar, yaitu strategi pesan komunikasi dalam rangka pencitraan dan dalam rangka membangun konsolidasi pelaksana program, yaitu menggalang dukungan pemangku kepentingan agar program komunikasi dilaksanakan sesuai dengan rencana serta menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan organisasi.

- Fungsi Strategi Komunikasi

Menurut Yane Hendriyani (2013), Strategi pesan dalam perencanaan komunikasi memiliki dua fokus besar, yaitu strategi pesan komunikasi dalam rangka pencitraan dan dalam rangka membangun konsolidasi pelaksana program, yaitu menggalang dukungan pemangku kepentingan agar program komunikasi dilaksanakan sesuai dengan rencana serta menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan organisasi. Konsep strategi komunikasi disini diletakkan sebagai bagian dari perencanaan

komunikasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, sedangkan perencanaan strategik tidak lain adalah kebijaksanaan komunikasi dalam tataran makro untuk program jangka panjang.

- Aktivitas Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi berfokus pada upaya untuk membangun hubungan antara pelaku komunikasi dan audiens. Strategi komunikasi dapat mencakup berbagai macam aktivitas, termasuk pemasaran, pembelajaran, dan pengembangan komunitas. Ini adalah beberapa contoh aktivitas yang dimasukkan dalam strategi komunikasi berdasarkan UNESCO :

1. Mengumpulkan data tentang status sumber daya komunikasi.
2. Melakukan analisis tentang struktur dan sumber daya komunikasi yang ada, berapa banyak surat kabar, stasiun televisi dan radio, serta media-media apa saja yang ada dalam masyarakat.
3. Melakukan analisis kritis terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat terhadap komunikasi
4. Melakukan analisis terhadap komponen-komponen komunikasi mulai dari sumber, pesan, saluran atau media, penerima, dan umpan balik dari masyarakat.
5. Melakukan analisis terhadap pengembangan komunikasi, apakah komunikasi mengalami kemajuan dalam hal jumlah (tiras), sebaran, atau peringkat dalam tayangannya.
6. Menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan kebijaksanaan komunikasi yang ada.

- Tahapan strategi komunikasi

Tahapan strategi komunikasi meliputi:

1. Identifikasi Tujuan: Ini adalah langkah pertama dalam merancang strategi komunikasi. Pada tahap ini, harus menentukan tujuan yang ingin dicapai dengan komunikasi. Tujuan harus didefinisikan dengan spesifik dan jelas.
2. Penargetan: Tahap kedua dalam merancang strategi komunikasi adalah menentukan audiens yang ingin di sasar. harus memiliki gambaran yang jelas tentang siapa audiens yang dituju dan bagaimana akan menyampaikan pesan kepada mereka.
3. Menciptakan Pesan: Setelah menargetkan audiens, langkah selanjutnya adalah

menciptakan pesan yang tepat. harus berpikir tentang apa yang akan di sampaikan kepada audiens dan bagaimana akan menyampaikannya.

4. Memilih Kanal Komunikasi: Setelah membuat pesan, harus memutuskan kanal komunikasi yang akan di gunakan untuk menyampaikan pesan. Ini termasuk media cetak, media elektronik, media online, dan lainnya.

5. Pemantauan dan Evaluasi: Ini adalah tahap terakhir dalam merancang strategi komunikasi. Harus memantau efektivitas komunikasi dan melakukan evaluasi untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai.

- Kebijakan komunikasi

Kebijakan komunikasi sendiri memiliki pengertian yang beragam. Salah satu pendapat mengenai kebijakan komunikasi yaitu pengertian menurut Unesco yang dikutip Ugboajah (1980:5) yang menyampaikan bahwa kebijakan komunikasi sebagai kumpulan prinsip- prinsip dan norma-norma yang sengaja diciptakan untuk mengatur perilaku sistem komunikasi. Pengertian sederhana ini mengandung pemahaman bahwa sebuah kebijakan komunikasi lahir setelah adanya sebuah sistem komunikasi yang berlaku di sebuah negara. Kebijakan komunikasi memiliki 2 fungsi, yang pertama berfungsi sebagai penjamin dinamika sosial masyarakat yang berjalan secara positif dan meminimal ketimpangan ketimpangan sosial. yang kedua, kebijakan komunikasi berfungsi sebagai alat untuk memperlancar proses berjalannya sistem komunikasi.

Kebijakan komunikasi memiliki 3 bentuk atau bagian penting. Bagian ini dikenal dengan konteks, domain, dan paradigma. Konteks berarti keterkaitan kebijakan komunikasi dengan sesuatu yang melingkupi dirinya seperti politik-ekonomi, politik komunikasi,dll. Domain kebijakan komunikasi berarti muatan nilai yang dikandung dalam sebuah kebijakan komunikasi seperti globalisasi, ekonomi global,dll. Sedangkan 3. paradigma lebih kepada kerangka cita-cita yang menjadikan tujuan kebijakan komunikasi tersebut. (Abrar, 2008: 4).

1.7 Metode Penelitian

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara rinci dan mendalam. Penelitian deskriptif kualitatif ini mengutamakan analisis terhadap data kualitatif yang menggambarkan peristiwa atau situasi sosial tanpa adanya manipulasi atau pengolahan data yang berlebihan. Jenis penelitian ini sering digunakan untuk mengungkap realitas atau kondisi yang ada dalam konteks tertentu, dalam hal ini, mengenai strategi komunikasi Humas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam membangun citra positif Ibu Kota Nusantara (IKN).

Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait, yaitu Bapak Syafrudin, Kepala Biro Humas, dan Ibu Rahma Dewi, staf Humas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta analisis terhadap data sekunder yang diperoleh dari artikel, laporan, dan arsip terkait. Rentang waktu penelitian ini dimulai dari pengumpulan data pada Agustus 2023 hingga penyusunan laporan dan penarikan kesimpulan pada Februari 2024. Pada tahap pengumpulan data, wawancara dilakukan secara tatap muka dan daring untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai strategi komunikasi yang diterapkan oleh Humas Pemprov Kaltim dalam membangun citra positif IKN. Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

- Perencanaan komunikasi

Ada beberapa pengertian dari perencanaan komunikasi. Menurut Syam Nina et al (2007), Perencanaan komunikasi adalah pernyataan tertulis mengenai serangkaian tindakan tentang bagaimana suatu kegiatan komunikasi akan atau harus dilakukan agar mencapai perubahan perilaku sesuai dengan yang kita inginkan. Sedangkan menurut John

Middleton dalam Cangara (2013), Perencanaan komunikasi adalah proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut tidak saja mencakup media massa dan komunikasi antarpribadi, tapi juga setiap aktivitas yang dirancang untuk mengubah perilaku dan menciptakan keterampilan-keterampilan tertentu di antara individu dan kelompok dalam lingkup tugas-tugas yang dibebankan oleh organisasi. Perencanaan Komunikasi banyak digunakan dalam komunikasi organisasi dalam arti luas, baik komunikasi di internal organisasi maupun komunikasi ke luar organisasi. Untuk membuat atau merencanakan program, seorang praktisi *public relations* perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis situasi

Maksud dari analisis situasi di sini adalah seorang praktisi *public relations* berupaya untuk melihat posisi perusahaan di mata khalayaknya. Bagaimana masyarakat luas dan bagaimana para karyawan memandang perusahaan kita. Persepsi karyawan terhadap pimpinan, serta persepsi masyarakat luas terhadap perusahaan menjadi hal penting bagi sebuah perusahaan. Dalam konteks ekonomi, persepsi positif masyarakat menjadi modal (*capital*) perusahaan. Modal ini sering disebut dengan modal sosial. Secara kultural, pengamatan harus dilakukan untuk memetakan produk perusahaan dalam konteks budaya di mana perusahaan berada.

2. *Problem identification*

Sebelum lebih jauh mengidentifikasi problem *public relations*, terlebih dahulu praktisi PR harus merumuskan dan mendefinisikan apa yang disebut dengan problem. Penentuan tersebut akan dilakukan jika dilakukan penilaian tentang suatu masalah. Apakah ada kesalahan atau ada sesuatu yang seharusnya dan kenyataannya ada perbedaan yang menonjol. Tujuan organisasi atau perusahaan adalah naskah awal untuk dijadikan sebagai pijakan penilaian. Dengan tujuan tersebut suatu permasalahan ditemukan.

3. *Problem Solution*

Pengenalan situasi dilakukan dalam kerangka untuk mengetahui kondisi perusahaan di mata khalayak. Jika ada permasalahan dalam hal hubungan antara perusahaan dengan khalayaknya, maka dengan pengenalan situasi diharapkan akan segera diketahui. Sebagai tindak lanjut dari pengenalan situasi adalah bagaimana merumuskan solusi atas problem yang dihadapi oleh perusahaan. Problem solusi ini tidak hanya menyangkut adanya

permasalahan yang berbentuk *disharmoni* dalam perusahaan. Tetapi menyangkut tentang bagaimana perusahaan menciptakan hubungan yang lebih baik lagi antara perusahaan dengan khalayaknya.

Perencanaan Komunikasi Program Kampanye Public Relations menurut Fraser P. Seitel yang dikenal sebagai ahli dan akademisi di bidang PR. Menurutnya sebelum menjalankan program PR, para praktisi wajib merancang tujuan dan strategi, perencanaan, budgeting, riset dan rancangan evaluasi. Merancang tujuan, strategi, dan perencanaan, menjadi esensial hanya jika PR menduduki posisi yang sederajat dengan komponen atau bagian organisasi lainnya. Ada dua tipe perencanaan program PR, yakni: 1) perencanaan program PR jangka pendek; dan 2) perencanaan program PR jangka panjang, di mana masing masing tipe membutuhkan usaha yang berbeda-beda. Perencanaan program PR melibatkan serangkaian aktivitas, di antaranya menetapkan tujuan yang jernih untuk mencapai tujuan organisasi, menetapkan strategi yang tepat, membuat taktik untuk menjalankan program, dan alat ukur yang bisa melihat secara nyata hasil kerja program. Tujuan PR harus dikelola dengan baik, karena jika tidak maka bisa jadi akan muncul persoalan yang akan mempengaruhi tujuan dan strategi bisnis perusahaan. Karena itu, para praktisi PR harus berpikir strategis dengan menjawab pertanyaan kritis, yakni “bagaimana perusahaan mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan?” Jawaban yang spesifik dari pertanyaan kritis tersebut pada gilirannya akan memunculkan pemikiran tentang taktik yang dijalankan dalam program PR, dan idealnya dalam membuat strategi dan taktik PR harus dilakukan pre-tes terlebih dahulu.

Sosialisasi program-program organisasi memerlukan perencanaan yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan dalam organisasi dan kerja sama dalam pelaksanaannya sehingga tidak membingungkan khalayak target. Konsolidasi wilayah sosialisasi dan komunikasi meliputi wilayah lokal dan atau wilayah nasional. Masing-masing wilayah memiliki sasaran komunikasi yang berbeda dengan tujuan pencapaian hasil organisasi yang sama, dengan strategi pelaksanaan disesuaikan dengan sifat, karakter, dan kapasitas daerah yang dituju. Dalam hubungan ini diperlukan konsolidasi operasional yang dilakukan di semua tingkatan tersebut, sehingga menghasilkan pencitraan yang sama dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan suksesnya program. Sosialisasi kepada masyarakat umum diarahkan agar masyarakat memahami dan

mendukung program kegiatan komunikasi ini.

Dalam proses komunikasi, khalayak biasa disebut dengan istilah penerima, sasaran, pembaca, pendengar, pemirsa, audien, atau dekoder. Khalayak adalah salah satu faktor dari sebuah proses komunikasi. Oleh karena itu unsur khalayak mempunyai peranan sangat penting sebagai salah satu kunci terbangunnya proses komunikasi yang ingin dicapai. Sebab berhasil tidaknya suatu proses komunikasi sangat ditentukan oleh khalayak. Apabila suatu aktivitas komunikasi yang diboikot atau tidak menyertakan khalayak sudah pasti komunikasi itu akan gagal dalam mencapai tujuannya. Konsep khalayak menunjukkan adanya sekelompok pendengar atau penonton yang memiliki perhatian, reseptif, tetapi relatif pasif yang terkumpul dalam latar yang kurang lebih bersifat publik.

Berkaitan dengan perencanaan, komunikasi merupakan sebuah proses penyusunan. Yaitu penyusunan pesan-pesan seorang komunikator kepada komunikan. Komunikasi menghendaki adanya kesamaan makna atau saling pengertian antara kedua belah pihak. Keberhasilan komunikasi penyampaian sebuah gagasan adalah pada taraf kedua belah pihak memahami gagasan tersebut. Untuk menghasilkan pemahaman makna yang sama, maka komunikasi sebagai sebuah proses harus dipersiapkan dengan seksama dengan perencanaan pesan dalam strategi komunikasi.

B. Humas Pemerintah

Prinsip-prinsip dasar humas pemerintahan dalam buku Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintahan sebagai berikut :

1. Tata kelola kehumasan yang berorientasi pada proses pencitraan dan penciptaan nilai.
2. Tata kelola kehumasan yang mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan instansi, serta berorientasi pada kepentingan publik.
3. Tata kelola kehumasan berpegang pada komitmen , peraturan perundangan-undangan, etika kehumasan, serta praktik-praktik umum yang sehat.
4. Tata kelola kehumasan membutuhkan perencanaan, pengembangan kepemimpinan dan tanggung jawab, pemantauan dan evaluasi, serta perbaikan yang berkelanjutan. Tujuan model komunikasi kehumasan adalah untuk menciptakan komunikasi dua arah dengan pengaruh yang seimbang karena diperlukan komunikasi yang lebih interaktif. Adapun

tuga humas pemerinatahan adalah sebagai berikut :

1. melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh manfaat bersama;
 2. meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik;
 3. meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah;
1. Membangun citra dan reputasi positif.

Sedangkan fungsi humas pemerintahan adalah membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi; menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis; menjadi penghubung instansi dengan publiknya; melaksanakan fungsi manajemen komunikasi, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi.

Humas pemerintahan juga memiliki peran-perannya yaitu yang pertama sebagai **Komunikator**, Humas pemerintah berperan membuka akses dan saluran komunikasi dua arah, antara instansi pemerintah dan publiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sarana kehumasan. Kedua **Fasilitator**, Humas pemerintah berperan menyerap perkembangan situasi dan aspirasi publik untuk dijadikan masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam pengambilan putusan. Ketiga **Diseminator**, Humas pemerintah berperan dalam pelayanan informasi terhadap internal organisasi dan publiknya, baik langsung maupun tidak langsung, mengenai kebijakan dan kegiatan masing-masing instansi pemerintah. **Keempat Katalisator**, Humas pemerintah berperan dalam melakukan berbagai pendekatan dan strategi guna mempengaruhi sikap dan pendapat publik untuk menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan publik. **Kelima Konselor, Advisor, dan Interpreter**,

Humas merupakan konsultan, penasihat, dan penerjemah kebijakan pemerintah. Terakhir **Prescriber** , Humas berperan sebagai salah satu instrumen strategis pemimpin puncak penentu kebijakan.

Pemangku kepentingan humas pemerintahan yaitu publik. Publik pemangku

kepentingan berfungsi sebagai mitra praktisi humas pemerintah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi kehumasan. Publik pemangku kepentingan humas pemerintah adalah publik yang terdiri dari publik internal primer, publik internal sekunder, publik internal marginal, publik eksternal primer, publik eksternal sekunder, publik eksternal marginal, publik pendukung (*proponent*), publik penentang (*opponent*), publik mengambang (*uncommitted*), publik minoritas vokal (*vocal minority*), dan publik mayoritas pasif (*silent majority*). Metode pekerjaan Humas Langkah pertama meliputi penyelidikan dan mengamati pengetahuan, opini, sikap dan perilaku pihak-pihak yang terkait dengan dan dipengaruhi oleh tindakan dan kebijakan organisasi. Pada fase ini, PRO (Public Relations Officer) atau humas melakukan intelijen permasalahan dengan menyusun pertanyaan “Apa yang sedang terjadi”. PRO atau humas harus melakukan analisis situasi terkini yang dihadapi organisasi, melalui kegiatan riset untuk menyelidiki apa yang sedang dipikirkan, penerimaan dan pendapat serta perilaku publik, bertujuan untuk memahami apa yang sedang terjadi.

Hal ini ditegaskan oleh (Kriyantono, 2021) bahwa PRO/humas harus mempunyai keahlian riset supaya semua kegiatan yang dilakukan mempunyai dasar yaitu fakta, bukan anggapan atau asumsi, oleh karena itu, aktivitas PRO/humas dimulai dan diselesaikan dengan riset. Perencanaan adalah tahapan berikutnya setelah proses penemuan fakta dan mendefinisikan masalah. Pada fase ini, PRO melakukan “proses menilai apa yang kita punya dan kemana kita ingin pergi” (Lattimore dalam Kriyantono, 2021: 208). Perencanaan dimulai dari evaluasi terhadap pemilikan sumber daya (manusia, keuangan, bahan baku, dan sebagainya), dan menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Kriyantono menambahkan bahwa perencanaan yang strategis selalu menanyakan “apa solusi yang diharapkan? (tujuan program), siapa publik internal dan eksternal yang harus direspon dan dipengaruhi program? (publik sasaran), apa tujuan yang harus dicapai pada setiap publik? (sasaran). Perencanaan ini dipikirkan secara serius, karena kegiatan ini adalah salah satu fase yang ikut menentukan keberhasilan pekerjaan public relations. Perencanaan harus bisa melihat jauh ke depan, ke belakang, dan sekitarnya, karena itu, perencanaan disusun berdasarkan pada data dan fakta yang merupakan hasil fact finding. Data dan fakta adalah hal yang apa adanya, tanpa interpretasi atau asumsi dari PRO.

Tahap perencanaan telah dilalui, setelah itu PRO memasuki tahap tindakan dan komunikasi atau tahap melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Pada tahap ini, PRO melakukan koordinasi, meningkatkan kepekaan dan bertanggungjawab. Koordinasi dibutuhkan karena dalam fase ini, program akan berjalan dengan baik dengan keterlibatan semua bagian organisasi. Dukungan dari semua bagian organisasi sangat menentukan keberhasilan program PRO. Tahap terakhir adalah tahap evaluasi atau penilaian, setelah melalui tahap fact finding dan definisi masalah, perencanaan, aksi dan komunikasi. Semua langkah-langkah ini berjalan secara berkelanjutan. Hasil dari evaluasi kemudian menjadi fact finding sebagai bahan pertimbangan menyusun rencana dan akhirnya melakukan aksi atau tindakan. Terkadang, rencana tidak terlaksana dengan baik, ada perubahan pada saat aksi, dan memang sebaiknya setiap program yang masih dalam perencanaan harus fleksibel, lentur, bisa berubah sesuai kondisi. Artinya, sebaiknya PRO mempunyai beberapa perencanaan atau cadangan rencana, seperti planning A, B atau C dan sebagainya, tidak terpaku pada satu planning.

C. Ruang Lingkup PR (PENCILS)

Teori ruang lingkup PR (PENCILS) adalah kerangka konsep yang dikembangkan oleh Thomas L. Harris untuk menggambarkan aktivitas marketing public relations. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap mengenai setiap aspek dari PENCILS:

- **Publication & Publicity:**

Publication: Proses penerbitan dan distribusi materi, seperti artikel, buku, dan laporan, untuk meningkatkan kesadaran dan pengenalan masyarakat terhadap perusahaan atau organisasi
Publicity: Pemasaran dan promosi melalui media untuk meningkatkan kesadaran dan pengenalan masyarakat terhadap perusahaan atau organisasi

- **Event Marketing:**

Acara: Kegiatan yang diadakan untuk meningkatkan kesadaran dan pengenalan masyarakat terhadap perusahaan atau organisasi, seperti pesta, konferensi, dan Latihan.
Peristiwa: Kegiatan yang diadakan untuk meningkatkan kesadaran dan pengenalan masyarakat terhadap perusahaan atau organisasi, seperti penyelidikan, penulisan artikel, dan wawancara

- **News Management:**

Sumber daya berita: Mengelola dan handle sumber daya berita untuk menghasilkan kesadaran yang positif dan baik. Siklus berita: Mengidentifikasi dan handle siklus berita yang potensial untuk mengakibatkan perusahaan atau organisasi

- Community Involvement:

Kegiatan masyarakat: Melibatkan masyarakat dan organisasi lokal dalam aktivitas public relations untuk meningkatkan hubungan dan pengenalan

- Internal Communication:

Saluran komunikasi: Menjelaskan informasi dengan karyawan, pemegang, dan sumber daya intern untuk menghasilkan kesadaran yang harmonis dan kolaboratif. Training dan pelatihan: Mengembangkan program pelatihan dan training untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan wawancara serta menghasilkan kesadaran yang baik dan kolaboratif

- Lobbying:

Pengembangan hubungan: Melakukan kegiatan untuk menghasilkan dukungan dari pemerintah, organisasi, dan masyarakat untuk mendukung tujuan public relations. Advokasi: Mengusulkan untuk perubahan atau pendukung kebijakan yang berkaitan dengan tujuan public relations

- Social Responsibility:

Kewarganegaraan: Melakukan kegiatan yang bertujuan mencari solusi masalah masyarakat dan berpeluang untuk kelestarian dan keadilan. Donasi dan sponsoran: . Berpartisipasi dalam aktivitas yang bertujuan mencari solusi masalah masyarakat atau mendukung program-program yang berkaitan dengan tujuan public relations

Model PENCILS ini digunakan untuk mengelola dan mengembangkan strategi public relations yang efektif, serta untuk menjelaskan bagaimana setiap aspek berfungsi secara bersamaan untuk mencapai tujuan public relations.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian akan diambil dalam rentang waktu bulan Agustus 2023 hingga Februari 2024. Lokasi Penelitian diambil di Balikpapan dan Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

C. Narasumber / Informan Penelitian

Narasumber penelitian ini adalah HM Syafranuddin selaku kepala Biro Humas setda Provinsi Kalimantan Timur. Namun saat ini Kepala Biro Humas Setda telah berubah nama menjadi Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim, namun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tidak berubah.

D. Pengumpulan Data

Di penelitian ini, peneliti memakai 2 sumber data untuk mengumpulkan data serta hasil yang akan diolah, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang pertama kali ditemukan oleh peneliti melalui usaha dan pengalaman eksklusif, terutama untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer pada survei ini sesuai hasil wawancara dengan Humas Pemprov Kaltim. Sebelum melakukan wawancara, penulis melampirkan beberapa draft pertanyaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada info penggunaan yang dikumpulkan dan dicatat oleh siapa pun selain pengguna untuk tujuan yang tak terkait menggunakan subjek pemeriksaan ketika ini. Ini artinya format yang tersedia untuk data yang dikumpulkan berasal aneka macam sumber seperti sensus, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan, buku, artikel, serta situs web. Data sekunder untuk survei ini diperoleh berasal beberapa artikel serta catatan dari Pemerintah Kalimantan Timur, atau dari arsip humas internal.

E. Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif merupakan proses menganalisis data independen atau numerik. Data yang diperoleh buat penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif tak jarang bersifat subjektif. pada penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data berasal dari sumber yang tidak sinkron serta memakai metode yang berbeda. Proses pengumpulan data dalam teknik analisis data kualitatif melalui catatan dan catatan, tinjauan pustaka, wawancara, survei, atau observasi. Dalam beberapa kasus, observasi atau pengamatan harus dilakukan secara terus menerus agar peneliti memperoleh data yang berbeda.

a. Reduksi Data

Salah satu proses dalam metodologi analisis data kualitatif adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses memadatkan, mengatur, dan menghapus data yang tidak relevan sehingga dapat digunakan untuk membuat informasi yang berguna dan membuat kesimpulan lebih mudah. Analisis data diperlukan pada proses reduksi karena ukuran dan kompleksitas data. Untuk menentukan apakah data tersinkronisasi dengan tujuan akhir, tahap reduksi ini selesai.

a. Penyajian Data

Salah satu tahapan dalam metodologi analisis data kualitatif adalah penyajian data. Praktik penyajian data melibatkan pengorganisasian pengumpulan data dengan cara yang metodis dan dapat diakses sehingga kesimpulan dapat dibuat. Penyajian data kualitatif dapat berbentuk tabel, grafik, jaringan, matriks, atau teks deskriptif (dalam bentuk catatan lapangan). Data tersebut kemudian dikumpulkan dan diatur dalam pola yang terkait melalui penyajian data, sehingga lebih mudah untuk dipahami.

a. Kesimpulan dan Verifikasi

Bagian terakhir dari teknik analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data, yang dilakukan untuk melihat hasil reduksi data yang selalu sesuai dengan tujuan analisis yang ingin dicapai. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengevaluasi data yang telah dikumpulkan dengan mencari korelasi, persamaan, atau kontras untuk membuat kesimpulan, seperti menemukan solusi untuk masalah saat ini. Kesimpulan awal yang dibuat masih tentatif dan direvisi jika tidak ada bukti tambahan yang ditemukan selama periode pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh data yang lebih mendukung, kesimpulan tersebut valid. Verifikasi berusaha untuk menghasilkan penilaian relevansi data dalam kaitannya dengan tujuan analisis dan konsep yang mendasarinya.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Gambar 2. 1 Ilustrasi IKN

A. IKN (Ibu Kota Nusantara)

2.1 Penetapan

Penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Pada pertengahan 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Jawa. Pemindahan ini dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ibu kota baru akan berada di wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi ini

dipilih agar Indonesia memiliki posisi sentral sebagai negara kepulauan, dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari barat ke timur dan dari timur ke barat. Pemindahan ibu kota negara didasarkan pada Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) yang telah disepakati dan menjadi kepastian hukum. Undang-undang ini menjadi landasan hukum untuk pembangunan ibu kota baru dan mengatur berbagai aspek terkait, seperti pengelolaan, infrastruktur, dan lingkungan. Nusantara yang secara resmi dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara (Indonesian: Ibu Kota Nusantara, IKN), merupakan ibu kota masa depan Indonesia yang direncanakan untuk diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2024, yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nusantara akan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota nasional, sebuah posisi yang telah dipegang oleh kota tersebut sejak kemerdekaan negara pada tahun 1945.

Pembangunan IKN merupakan salah satu proyek prioritas strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pembangunan IKN tidak hanya melibatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga melibatkan pengembangan sektor industri digital dan inovasi serta melibatkan masyarakat lokal. Pemindahan ibu kota negara bertujuan untuk memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota, mengurangi beban Jakarta yang sudah padat, serta mempercepat pembangunan di wilayah lain di Indonesia. Selain itu, pemindahan ini juga diharapkan meningkatkan pemerataan pembangunan di Indonesia dan memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Dengan penetapan IKN, pemerintah Indonesia berupaya untuk menciptakan sebuah ibu kota yang lebih modern, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dimulai pada bulan Juli 2022, dengan tahap awal melibatkan pembersihan lahan dan pembangunan jalan akses. Tahap awal ini dikenal sebagai 'zona Pusat Pemerintahan', yang akan mencakup kantor pemerintahan, sekolah, dan rumah sakit. Proyek ini diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar Rp 523 triliun (\$35 miliar USD) dan akan diselesaikan dalam 5 fase, dengan fase pertama dimulai pada bulan Agustus 2022. Hampir 150.000-200.000 pekerja dari seluruh Indonesia ikut berpartisipasi dalam proyek ini, dengan penambahan tenaga kerja di sekitar wilayah Nusantara untuk memastikan partisipasi pekerja lokal. Proyek ini diharapkan akan sepenuhnya selesai

pada tahun 2045, dengan Fase 5 sebagai tahap terakhir.

Fase pertama proyek ini, yang berlangsung dari tahun 2022 hingga 2024, akan difokuskan pada pengembangan infrastruktur dasar seperti pasokan air minum, listrik, dan pengelolaan limbah. Pada fase kedua yang berlangsung dari tahun 2025 hingga 2029, akan dilakukan pengembangan area inti, termasuk fasilitas transportasi umum baik yang utama maupun yang sekunder. Fase ketiga yang berlangsung dari tahun 2030 hingga 2034 akan mencakup pengembangan kawasan industri dan sektor lainnya. Selanjutnya, fase keempat dan kelima akan dilaksanakan secara berturut-turut pada tahun 2035 hingga 2039 dan 2040 hingga 2045. "Pada tahap akhir, IKN akan mencapai emisi karbon netral dan menggunakan energi terbarukan secara seratus persen. Selain itu, proyek ini juga akan mendorong pengembangan industri yang berkelanjutan dan menjadikan kota ini sebagai yang terdepan dalam hal daya saing," ujar Danis Sumadilaga, Kepala Satuan Tugas Pelaksanaan Pengembangan Infrastruktur IKN Nusantara.

2.2 Perkembangan IKN

Perkembangan terbaru Ibu Kota Nusantara (IKN) mencakup beberapa hal penting yang terkait dengan pembangunan IKN. Pembangunan IKN tahap pertama sudah dimulai dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan akan berlangsung hingga 2024. Pembangunan tahap pertama ini meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan bandara. Pembangunan IKN melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan IKN dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada Januari 2022, RUU IKN yang telah disepakati menjadi Undang-Undang IKN. Undang-undang ini menjadi landasan hukum untuk pembangunan ibu kota baru dan mengatur berbagai aspek terkait, seperti pengelolaan, infrastruktur, dan lingkungan. Presiden Joko Widodo juga mempromosikan IKN sebagai kota hijau masa depan. Tujuan pembangunan IKN adalah pemerataan pembangunan serta membangun ekonomi di wilayah Indonesia Timur. Tahap pembangunan IKN diawali dengan pembangunan infrastruktur utama, dan kemudian diikuti pembangunan infrastruktur dasar lalu pengembangan pusat inovasi dan ekonomi.

Relokasi pegawai pemerintahan antara kedua kota juga akan dilakukan secara bertahap.

Perkembangan persiapan menuju peresmian Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2024 telah mencapai beberapa progres penting. Progres pembangunan fisik IKN telah mencapai 37%. Pembangunan ini meliputi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan bandara. Meskipun masih ada 63% yang perlu diselesaikan, progres ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam persiapan menuju peresmian IKN pada tahun 2024. Target Rampungnya Istana Presiden, yang akan menjadi tempat kerja Presiden Joko Widodo, ditargetkan rampung pada Juli 2024. Penyelesaian istana ini menjadi salah satu fokus utama dalam persiapan menuju peresmian IKN. Presiden Joko Widodo menyampaikan optimisme terkait persiapan menuju peresmian IKN pada tahun 2024. Beliau menyatakan keyakinan bahwa upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia digelar di IKN pada tahun tersebut. Optimisme Presiden Jokowi menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persiapan IKN sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, progres persiapan menuju peresmian IKN pada tahun 2024 mencakup progres pembangunan fisik IKN, target rampungnya Istana Presiden, pengesahan Undang-Undang IKN, dan optimisme Presiden Jokowi terkait kelancaran persiapan IKN. Pemerintah terus berupaya untuk memastikan persiapan yang tepat waktu dan sukses dalam memindahkan ibu kota negara ke IKN.

2.3 Potensi Permasalahan IKN

Berikut adalah beberapa permasalahan/potensi masalah yang terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN):

1. Dampak Lingkungan:

Pembangunan IKN dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, seperti kerusakan hutan, hilangnya habitat satwa liar, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, dilakukan upaya mitigasi dan pengelolaan lingkungan yang baik untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan

2. Dampak Ekonomi:

Pembangunan IKN memerlukan anggaran yang besar dari APBN, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, pembangunan IKN juga dapat

mengganggu perekonomian lokal di Jakarta dan sekitarnya. Namun, pemindahan IKN ke wilayah Indonesia Timur juga dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

3. Dampak Sosial:

Pemindahan IKN dapat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, seperti relokasi penduduk dan perubahan pola hidup. Selain itu, pemindahan IKN juga dapat memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat setempat, seperti petani dan nelayan. Oleh karena itu, dilakukan upaya untuk meminimalkan dampak sosial negatif dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan IKN.

Dengan demikian, permasalahan/potensi masalah yang terkait dengan pembangunan IKN mencakup dampak lingkungan, dampak ekonomi, dan dampak sosial. Pemerintah melakukan upaya mitigasi dan pengelolaan yang baik untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan IKN.

B. Humas Kalimantan Timur

Meskipun mengalami perubahan nama dari Biro Hubungan Masyarakat (Humas) menjadi Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tidak mengalami perubahan. Bahkan, tanggung jawab yang diemban semakin bertambah dengan adanya tugas baru, yaitu perencanaan dan kepegawaian. Kepala Biro Adpim Setda Provinsi Kaltim, HM Syafranuddin, dalam kunjungannya oleh GM Business PT Mahakam Media Grafika, Erika Oktoviani, yang juga bertanggung jawab atas Surat Kabar Harian Tribun Kaltim, menyebutkan bahwa dalam Pasal 138 Pergub Kaltim Nomor 18/2021 ditegaskan bahwa Bagian Materi Komunikasi Pimpinan (MKP) memiliki tugas untuk menyiapkan materi, mendokumentasikan, dan mempublikasikan kegiatan para pimpinan, termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, serta semua biro di lingkungan Setda Kaltim.



Gambar 2. 2 Pegawai/Staff Adpim (Humas Kaltim)

Namun, kegiatan yang melibatkan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah tidak hanya terbatas pada lingkungan Setda, tetapi juga melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat. Oleh karena itu, Biro Adpim harus memberikan pelayanan dalam hal acara dan publikasi, baik melalui situs web yang ada maupun melalui wartawan yang bekerja sama. Kepala Biro Adpim, Syafranuddin, menjelaskan bahwa perubahan nama tidak mengubah tugas pokok dan fungsi Biro tersebut, bersama dengan Kabag Materi Komunikasi Pimpinan, Andik Riyanto, Kasubag Dokumentasi, Erni Yusnita, dan Kasubag Komunikasi Pimpinan, Hj Murni.

Tugas dan fungsi Humas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

2.2.1 Tugas:

1. Menyampaikan data dan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi pemerintahan.

2. Menyebarluaskan narasi tunggal dan data yang akurat mengenai kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah.
3. Mengumpulkan, mengolah, mendokumentasikan, dan mempublikasikan informasi kebijakan, program, dan kegiatan baik dalam bentuk cetakan, foto maupun data elektronik.

2.2.2 Fungsi :

1. Melakukan fungsi manajemen bidang komunikasi dan informasi
2. Membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di luar tugas pokok perangkat daerah sesuai keahliannya
3. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Selain itu, Humas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi kepada publik dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Humas berperan dalam menjalin hubungan baik dengan media massa dan masyarakat, serta melakukan pendekatan kerjasama untuk menciptakan kedekatan dan kepercayaan publik kepada pemerintah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Humas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melibatkan perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan, serta pengembangan. Dengan demikian, tugas dan fungsi Humas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meliputi penyampaian informasi, penyebaran narasi dan data, manajemen komunikasi dan informasi, serta membantu Gubernur dalam tugas-tugas di luar tugas pokok perangkat daerah. Humas juga berperan dalam membangun kepercayaan publik dan menjalin hubungan baik dengan media massa dan masyarakat.

2.2.3 Wewenang :

Humas di Kalimantan Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menyampaikan data dan informasi. Humas memiliki wewenang untuk menyampaikan data dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing

institusi pemerintahan.

2. Mereka bertanggung jawab dalam menyebarluaskan narasi tunggal dan data yang akurat mengenai kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah.
3. Penyebarluasan narasi dan data, Humas memiliki tugas untuk menyebarluaskan narasi tunggal dan data yang akurat terkait kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat.
4. Pelayanan informasi dan kehumasan, Humas memiliki peran dalam melakukan pelayanan informasi dan kehumasan kepada masyarakat. Mereka bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengolah, mendokumentasikan, dan mempublikasikan informasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah dalam berbagai bentuk, seperti cetakan, foto, dan data elektronik.
5. Hubungan eksternal dan internal, Humas memiliki tugas dalam menjalin hubungan kerja dengan instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. Mereka bertanggung jawab dalam membangun hubungan baik dengan media massa dan masyarakat, serta melakukan pendekatan kerjasama untuk menciptakan kedekatan dan kepercayaan publik kepada pemerintah.
6. Audit komunikasi kehumasan, Humas memiliki peran dalam melakukan audit komunikasi kehumasan, yang melibatkan evaluasi dan penilaian terhadap efektivitas komunikasi yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Humas efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Dengan demikian, wewenang Humas di Kalimantan Timur meliputi penyampaian data dan informasi, penyebaran narasi dan data, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, serta audit komunikasi kehumasan. Humas memiliki peran penting dalam menjalin hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat serta memastikan informasi yang disampaikan akurat dan transparan.

C. Peran Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dalam IKN

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Tugas dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan IKN meliputi merumuskan rencana

kegiatan, mengusulkan tim pemeriksa, melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan, dan mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki peran dalam menjaga dan memelihara infrastruktur sosial yang dibangun di sekitar IKN setelah IKN resmi digunakan. Dalam merumuskan rencana kegiatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab dalam menyusun rencana strategis dan program kerja yang mendukung pembangunan IKN. Mereka juga memiliki wewenang untuk mengusulkan tim pemeriksa terkait pembangunan IKN. Tim pemeriksa ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembangunan IKN dan memastikan keberhasilan proyek tersebut. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga bertanggung jawab dalam melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan terkait pembangunan IKN. Mereka bertugas memastikan bahwa hasil pemeriksaan terhadap pembangunan IKN telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Setelah IKN resmi digunakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan memiliki peran dalam menjaga dan memelihara infrastruktur sosial yang dibangun di sekitar IKN. Hal ini termasuk memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal dan bekerja di sekitar IKN. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki tugas dalam mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian pembangunan IKN. Mereka bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan menyusun data serta informasi terkait kemajuan dan penyelesaian pembangunan IKN. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah. Dalam pembangunan IKN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembangunan IKN memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan lokal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga membangun hubungan baik dengan media massa dan masyarakat, serta melakukan pendekatan kerjasama untuk menciptakan kedekatan dan kepercayaan publik kepada pemerintah.

BAB III

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Tabel Narasumber

No	Nama	Jabatan	Tanggal,Bulan,Tahun Wawancara	Lokasi Wawancara
1.	Rahma Dewi Suryaningsih	Staff Adpim/Humas Kaltim	10 Agustus 2023	Balikpapan, Kalimantan Timur
2.	HM Syafanudin,	Kepala Adpim/Humas Kaltim	10 Oktober 2023	Balikpapan, Kalimantan Timur
3.	Taufik Rahmat	Jurnalis Tribun Kaltim	2 Oktober 2023	Balikpapan, Kalimantan Timur
4.	Ibrahim Yusuf	Redaktur Kaltim Today	2 Oktober 2023	Balikpapan, Kalimantan Timur
5.	Agiel Suwarno	DPRD Prov Kaltim	24 September 2023	Balikpapan, Kalimantan Timur
6.	Sulton Fahrudin	Wakil Sekretaris DPP KNPI	24 September 2023	Balikpapan, Kalimantan Timur
7.	R.Yuniarto TH	Ketua DPD KNPI Provinsi Kalimantan Timur	24 September 2023	Balikpapan, Kalimantan Timur
8.	Yunizar Akbar	Mahasiswa	25 September 2023	Balikpapan, Kalimantan Timur

Tabel 2. 1 Tabel Narasumber

A. Tugas dan kewenangan humas Kaltim dalam komunikasi publik terkait Ibu kota Nusantara

Humas Kaltim berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada publik tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, baik terkait perkembangan proyek maupun dampaknya terhadap masyarakat. Sebagai badan yang menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, Humas Kaltim memiliki kewajiban untuk mengelola dan menyampaikan informasi yang objektif, akurat, dan berbasis data konkret. Berikut adalah tugas dan kewenangan Humas Kaltim yang relevan, yang berlandaskan pada aturan perundang-undangan terkait:

1. Menyusun Rencana Komunikasi Publik Secara Strategis dan Transparan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Humas Kaltim wajib menjamin keterbukaan informasi publik sebagai hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan dan program pemerintah. Dalam konteks IKN, Humas Kaltim harus merancang strategi komunikasi yang transparan, yang memungkinkan masyarakat memahami latar belakang, tujuan, dan manfaat dari pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Informasi ini harus tersampaikan secara sistematis melalui saluran komunikasi yang efektif, sehingga masyarakat dari berbagai lapisan dapat mengaksesnya dengan mudah. Pasal 9 UU KIP menyatakan bahwa setiap badan publik berkewajiban menyediakan dan menyampaikan informasi publik yang berkaitan dengan kebijakan, rencana kerja, serta penggunaan anggaran. Oleh karena itu, dalam mengelola komunikasi terkait IKN, Humas Kaltim bertanggung jawab untuk merancang dan menyampaikan informasi yang mencakup perkembangan proyek, tahapan pelaksanaan, serta estimasi biaya dan sumber pembiayaannya, sehingga masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas mengenai proyek besar ini.

2. Mengelola Data yang Akurat dan Berbasis Satu Data Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah menggunakan data yang terintegrasi dan terverifikasi untuk mendukung keterbukaan informasi. Dalam menjalankan fungsi komunikasi publik terkait IKN, Humas Kaltim bertugas untuk menyajikan informasi yang berbasis pada data-data yang telah melalui proses validasi dan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Melalui Pasal 6 Perpres No. 39/2019, setiap badan publik diharuskan menggunakan data yang konsisten, akurat, dan berkualitas. Oleh karena itu, Humas Kaltim harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait dalam pembangunan IKN, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan instansi pemerintah daerah lainnya, untuk

memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah data terbaru yang sudah melalui proses verifikasi dan validasi.

3. Menangani Krisis dan Isu Publik dengan Data Konkret

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah memberikan panduan terkait penanganan isu publik dan krisis komunikasi yang dihadapi oleh instansi pemerintah. Dalam pembangunan IKN, isu-isu sensitif atau negatif terkait dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi sering kali muncul, yang berpotensi menimbulkan krisis komunikasi. Berdasarkan Pasal 12 PermenPAN-RB No. 30/2011, Humas Kaltim memiliki kewenangan dan tugas untuk mengelola krisis komunikasi dengan menggunakan data yang faktual. Setiap klarifikasi yang disampaikan harus mengandung data konkret yang bisa menjelaskan situasi dan memberikan pemahaman yang objektif kepada masyarakat, sehingga opini negatif atau isu yang tidak benar dapat diluruskan. Dalam situasi krisis, Humas Kaltim harus mampu memberikan tanggapan yang cepat, namun tetap didasarkan pada fakta lapangan yang sudah diverifikasi.

4. Menyampaikan Dampak Positif Pembangunan IKN secara Terukur

Dalam komunikasi publik, Humas Kaltim juga berperan penting dalam menyampaikan dampak positif pembangunan IKN, seperti peningkatan infrastruktur, lapangan kerja baru, dan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat Kaltim dan Indonesia pada umumnya. Tugas ini berlandaskan pada prinsip transparansi dalam UU KIP, di mana informasi harus disampaikan dengan lengkap dan berimbang. Selain itu, Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mendorong Humas Kaltim untuk menyampaikan data yang akurat dan konsisten mengenai dampak positif tersebut, sehingga masyarakat memahami manfaat konkret yang akan diperoleh dari pemindahan ibu kota.

5. Memastikan Partisipasi Masyarakat dan Mengelola Hubungan dengan Media

Berdasarkan Pasal 10 UU KIP, badan publik berkewajiban untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses komunikasi publik. Dalam konteks pembangunan IKN, Humas Kaltim berperan sebagai fasilitator yang mendorong masyarakat untuk memberikan masukan atau pandangan terkait proyek tersebut, baik melalui diskusi publik, konsultasi, maupun media sosial. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, proses komunikasi menjadi lebih dua arah dan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, Humas Kaltim harus membangun hubungan yang baik dengan media massa, sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB No. 30/2011, untuk memastikan bahwa informasi terkait IKN yang

disampaikan kepada publik melalui media adalah data yang sudah diverifikasi. Hubungan yang harmonis dengan media akan membantu Humas Kaltim dalam menjaga persepsi positif publik terhadap proyek IKN.

6. Melakukan Evaluasi dan Pemantauan Kinerja Komunikasi Publik

Sebagai bagian dari evaluasi berkala, Humas Kaltim memiliki kewenangan untuk memantau dan menilai efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan, baik melalui survei, pemantauan media, maupun analisis respons publik. Hal ini didasarkan pada prinsip evaluasi kinerja dalam PermenPAN-RB No. 30/2011, yang mengharuskan instansi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas penyampaian informasi berdasarkan umpan balik dan hasil evaluasi dari masyarakat.

Tugas dan kewenangan Humas Kaltim dalam komunikasi publik terkait IKN didasarkan pada UU KIP, Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan PermenPAN-RB No. 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Kehumasan. Dengan dasar hukum ini, Humas Kaltim bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat dan transparan, mengelola data yang terintegrasi, serta menangani isu atau krisis komunikasi secara faktual.

B. Fokus strategi komunikasi dalam pembentukan citra positif IKN

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), terlihat adanya langkah-langkah khusus yang diambil untuk memastikan pesan terkait proyek IKN dapat diterima dengan baik oleh berbagai lapisan masyarakat. Pemprov Kaltim memahami pentingnya mengidentifikasi segmen yang ingin dicapai dan menyelaraskan konten komunikasi dengan segmen tersebut. Dalam konteks ini, Pemprov Kaltim mencermati keberagaman masyarakat dan menyesuaikan pesan-pesan terkait IKN agar relevan dan mudah dipahami oleh berbagai kelompok.

Media sosial menjadi komponen kunci dalam strategi komunikasi Pemprov Kaltim untuk IKN. Mereka mengubah orientasi dari pencitraan dan komunikasi searah melalui media massa mainstream menjadi lebih berbasis internet, komunikasi dua arah, dan memberikan

ruang untuk partisipasi publik. Pemprov Kaltim menyadari bahwa media sosial bukan hanya sebagai alat alternatif komunikasi, tetapi juga dapat membangun citra lembaga dan menjadi bagian dari kedekatannya dengan masyarakat.

Peran media sosial ini terbukti dalam membangun kerjasama dengan media lokal. Pemprov Kaltim mengakui pentingnya menjaga informasi terkini dan akurat terkait IKN tersampaikan melalui kerjasama dengan media lokal. Dengan demikian, strategi komunikasi yang mengutamakan ketepatan sasaran dan adaptabilitas ini menciptakan kanal yang efektif dalam menyampaikan informasi terkait IKN kepada masyarakat.

“...Kami menggunakan berbagai media sosial, yaitu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok. Akun media sosial Pemprov Kaltim menggunakan nama "Pemprov Kaltim" untuk semua platform. Media sosial merupakan platform yang efektif untuk menjangkau masyarakat luas, termasuk masyarakat di luar Kalimantan Timur. Selain itu, media sosial juga merupakan platform yang interaktif, sehingga kami dapat menerima umpan balik dari masyarakat” (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

“...Target audiens kami adalah masyarakat umum, baik di Kalimantan Timur maupun di luar Kalimantan Timur. Kami juga menargetkan para investor dan pelaku usaha. Kami membagikan berbagai konten, mulai dari informasi terkini tentang IKN, hingga video dan foto menarik tentang Kalimantan Timur. Kami juga membagikan konten yang bersifat edukatif, seperti informasi tentang potensi IKN dan Kalimantan Timur” (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

“...Tanggapan masyarakat sangat positif. Banyak masyarakat yang mengapresiasi upaya Pemprov Kaltim untuk mengkomunikasikan informasi tentang IKN melalui media sosial” (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

Selanjutnya, terkait dengan program pelibatan masyarakat, Pemprov Kaltim telah merancang sejumlah inisiatif. Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengembangan Masyarakat di Kawasan IKN untuk membahas aspirasi masyarakat lokal dan sinergi program kegiatan di Kawasan IKN Nusantara. Selain itu, Otorita IKN menjalankan kemitraan multi-stakeholder yang melibatkan lembaga pemerintah, komunitas lokal, bisnis, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi untuk memastikan kelancaran

implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pemprov Kaltim juga menunjukkan keterlibatan aktif dalam pelibatan masyarakat melalui program kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim, khususnya terkait pemberdayaan tenaga pekerja lokal menjelang Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu, lembaga pendidikan tinggi seperti Uniba dan Unkris juga berkontribusi dengan menggelar FGD untuk membahas keterlibatan masyarakat di IKN. Semua langkah ini menegaskan komitmen Pemprov Kaltim dalam membangun partisipasi dan mendengarkan suara masyarakat terkait proyek IKN.

Humas Pemprov Kaltim melakukan berbagai upaya untuk mengkomunikasikan informasi tentang program pelibatan masyarakat terkait IKN, antara lain:

1. Membuat konten informatif dan edukatif tentang program pelibatan masyarakat terkait IKN. Konten ini dibagikan melalui media sosial, website, dan media massa.
2. Melakukan dialog dan diskusi dengan masyarakat untuk membahas program pelibatan masyarakat terkait IKN. Dialog dan diskusi ini dilakukan secara tatap muka maupun daring.
3. Melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk terlibat dalam program pelibatan masyarakat terkait IKN. Pendampingan ini dilakukan oleh tenaga ahli dari Pemprov Kaltim.

“...Humas Pemprov Kaltim membuat konten video tentang program pemberdayaan tenaga pekerja lokal menjelang IKN. Video ini dibagikan melalui media sosial dan website Pemprov Kaltim. Selain itu, humas Pemprov Kaltim juga melakukan dialog dan diskusi dengan masyarakat di kawasan IKN untuk membahas program kemitraan multi-stakeholder. Dialog dan diskusi ini dilakukan secara tatap muka” (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

“...Tanggapan masyarakat sangat positif. Masyarakat mengapresiasi upaya humas Pemprov Kaltim untuk mengkomunikasikan informasi tentang program pelibatan masyarakat terkait IKN secara transparan dan akuntabel”(Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

Pemprov Kaltim merespon perubahan opini atau persepsi masyarakat terkait IKN dengan mengupayakan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat selalu sejalan dengan nilai-nilai dan kebijakan Pemprov Kaltim terkait proyek IKN. Pemantauan dan analisis media menjadi landasan utama dalam mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi IKN. Kolaborasi yang erat dengan media lokal diimplementasikan untuk memastikan informasi terkini dan akurat terkait IKN tersampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya, Pemprov Kaltim memiliki inisiatif khusus untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh proyek IKN. Langkah-langkah ini mencakup penyelenggaraan rapat koordinasi dengan masyarakat lokal, di mana aspirasi masyarakat dibahas bersama untuk mencapai sinergi program kegiatan di Kawasan IKN Nusantara. Meskipun detail inisiatif lainnya tidak dijabarkan secara rinci, dapat disimpulkan bahwa Pemprov Kaltim berkomitmen untuk memperkuat pemahaman masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan.

“...Dalam inisiatif ini, Pemprov Kaltim menyelenggarakan rapat koordinasi dengan masyarakat lokal. Humas Pemprov Kaltim akan terlibat dalam rapat koordinasi ini untuk memastikan bahwa informasi tentang manfaat ekonomi IKN dapat disampaikan secara efektif kepada masyarakat lokal. Humas Pemprov Kaltim juga membuat konten informatif dan edukatif tentang manfaat ekonomi IKN untuk dibagikan kepada masyarakat luas melalui media sosial, website, dan media massa” (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

Humas Pemprov Kaltim menggunakan berbagai teknik pemantauan dan analisis media, antara lain:

1. Pemantauan media massa konvensional, seperti surat kabar, majalah, dan televisi. Pemantauan ini dilakukan dengan membaca dan menonton berita tentang IKN di media massa konvensional.
2. Pemantauan media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Pemantauan ini dilakukan dengan memantau tagar dan akun yang terkait dengan IKN.
3. Pemantauan media online, seperti website berita dan portal berita. Pemantauan ini dilakukan dengan membaca berita tentang IKN di media online.

“...Hasil pemantauan media ini kemudian dianalisis untuk mengetahui tren pemberitaan tentang IKN, serta opini publik terhadap IKN. Analisis ini digunakan oleh humas Pemprov Kaltim untuk merumuskan strategi komunikasi publik terkait IKN...” (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

Humas Pemprov Kaltim melakukan berbagai bentuk kerjasama dengan media lokal terkait IKN, antara lain:

1. Press release: Humas Pemprov Kaltim rutin mengirimkan press release kepada media lokal untuk memberikan informasi terbaru tentang IKN.
2. Press conference: Humas Pemprov Kaltim mengadakan press conference untuk memberikan informasi penting tentang IKN kepada media lokal.
3. Kunjungan media: Humas Pemprov Kaltim memfasilitasi kunjungan media lokal ke kawasan IKN untuk melihat perkembangan pembangunan IKN secara langsung.
4. Kolaborasi konten: Humas Pemprov Kaltim bekerja sama dengan media lokal untuk membuat konten informatif dan edukatif tentang IKN.

Humas Pemprov Kaltim bekerja sama dengan humas Kementerian Sekretariat Negara dalam mengkomunikasikan informasi terkait IKN. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengkomunikasikan informasi kepada masyarakat luas. Humas Kementerian Sekretariat Negara memiliki akses yang luas ke media massa dan media sosial. Humas Pemprov Kaltim memanfaatkan akses ini untuk menjangkau masyarakat luas secara lebih efektif. Selain itu, humas Kementerian Sekretariat Negara juga memiliki pengalaman yang luas dalam bidang komunikasi publik. Humas Pemprov Kaltim melakukan analisis isi pemberitaan untuk memahami peran media dalam memberitakan isu pemindahan ibu kota dan mengevaluasi pemberitaan serta agenda media terkait pemindahan ibu kota. Humas Pemprov Kaltim melakukan analisis isi pemberitaan terhadap media massa konvensional, media sosial, dan media online. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator berikut:

1. Frekuensi pemberitaan: Frekuensi pemberitaan tentang IKN di media massa.
2. Positif-negatif pemberitaan: Positif-negatif pemberitaan tentang IKN di media massa.

3. Penekanan pemberitaan: Penekanan pemberitaan tentang IKN di media massa.
4. Agenda media: Agenda media terkait pemindahan ibu kota.

Analisis isi pemberitaan dilakukan oleh tim humas Pemprov Kaltim yang terdiri dari tenaga ahli komunikasi dan jurnalis. Hasil analisis isi pemberitaan digunakan oleh humas Pemprov Kaltim untuk Mengidentifikasi isu-isu penting yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat, Mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk menanggapi isu-isu tersebut, Menentukan media yang paling efektif untuk menyampaikan informasi terkait IKN.

Pemprov Kaltim telah menerapkan berbagai upaya khusus untuk membangun kolaborasi dengan lembaga pemerintah, swasta, dan LSM dalam menyampaikan informasi terkait IKN. Kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta dalam pembangunan IKN Nusantara menjadi bukti konkret dari inisiatif Pemprov Kaltim. Presiden Jokowi sendiri mengakui pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan swasta sebagai pilar utama dalam mendukung pembangunan IKN Nusantara. Selain itu, Pemprov Kaltim menjalin kerjasama dengan media lokal, menekankan pentingnya kolaborasi dengan mereka untuk memastikan informasi terkini dan akurat terkait IKN tersampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya, Pemprov Kaltim juga memberikan perhatian khusus terhadap alokasi transfer ke daerah (TKD) untuk mendukung IKN, menunjukkan upaya konkret dalam mengoptimalkan sumber daya untuk mendukung keberhasilan proyek ini.

Dalam menyampaikan informasi terkait IKN, Pemprov Kaltim memperhitungkan peran narasumber eksternal, terutama ahli industri atau akademisi. Mereka menyadari bahwa melibatkan suara-suara dari luar, seperti Wakil Kepala Otorita IKN Dhonny Rahajoe, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid, dan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang proyek IKN. Ini menciptakan narasi yang lebih kaya dan dipercaya bagi masyarakat.

Berikut adalah contoh unggahan berita di media resmi Pemprov Kaltim yang melibatkan nama-nama tersebut:

1. Berita berjudul “Gubernur Isran Bertemu Kepala Otorita IKN, Duet yang Lebih Dari Pantas” ([Gubernur Isran Bertemu Kepala Otorita IKN, Duet yang Lebih Dari Pantas \(kaltimprov.go.id\)](http://kaltimprov.go.id))
2. Berita berjudul "Menjaga Borneo Maju Berkelanjutan Bersama Nusantara" ([Menjaga Borneo Maju Berkelanjutan Bersama Nusantara \(kaltimprov.go.id\)](http://kaltimprov.go.id))

Berita-berita tersebut memberikan informasi tentang proyek IKN dari berbagai perspektif, yaitu perspektif dari pemerintah, pelaku industri, dan akademisi. Informasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami proyek IKN secara lebih komprehensif dan mendalam.

“...Narasumber eksternal, terutama ahli industri atau akademisi, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas di bidangnya masing-masing. Pengetahuan dan pengalaman ini dapat membantu masyarakat untuk memahami berbagai aspek dari proyek IKN, mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Nama-nama tersebut biasanya ditampilkan dalam informasi terkait IKN yang bersifat kompleks atau kontroversial. Misalnya, dalam informasi tentang dampak ekonomi IKN, nama-nama tersebut dapat ditampilkan untuk memberikan perspektif dari berbagai pihak” Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

Pemprov Kaltim juga telah mengadopsi panduan komunikasi krisis kepariwisataan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengatasi krisis komunikasi yang mungkin timbul terkait IKN.

“...Secara umum, krisis yang mungkin timbul terkait IKN dapat dibagi menjadi dua, yaitu krisis internal dan krisis eksternal. Krisis internal dapat terjadi karena faktor-faktor internal, seperti Ketidaksiapan pemerintah dan masyarakat Kaltim dalam menghadapi perubahan yang signifikan akibat pembangunan IKN, Kurang efektifnya koordinasi antar-lembaga terkait pembangunan IKN, Korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan IKN. Krisis eksternal dapat terjadi karena faktor-faktor eksternal, seperti Perubahan kondisi ekonomi global yang dapat berdampak pada investasi dan pertumbuhan ekonomi di IKN, Ancaman keamanan, baik dari dalam maupun luar negeri, Bencana alam, seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan.” (HM Syafranudin, Kepala Adpim/Humas Kaltim : 10 Oktober 2023)

“...Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki pengalaman dan keahlian

dalam bidang manajemen krisis. Panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah terbukti efektif dalam menangani berbagai krisis, baik krisis internal maupun eksternal.” (HM Syafranudin, Kepala Adpim/Humas Kaltim : 10 Oktober 2023)

Adopsi panduan ini mencerminkan kesiapan Pemprov Kaltim dalam mencegah, merespons, dan memulihkan kondisi krisis melalui komunikasi yang efektif. Dalam mengelola kerjasama dengan media lokal, Pemprov Kaltim telah menunjukkan komitmen melalui langkah-langkah konkret. Kolaborasi dengan media lokal, apresiasi terhadap media siber yang mengarah ke IKN, kolaborasi antara Asosiasi Media Siber dan APINDO Kaltim untuk memajukan SDM IKN, serta kerjasama dengan ADB oleh Otorita IKN untuk menjadikan IKN sebagai kota hutan netral karbon, semua itu menunjukkan kerjasama yang holistik dan berkelanjutan dalam memastikan informasi terkini dan akurat terkait IKN tersampaikan kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Pemprov Kaltim dapat meningkatkan transparansi, mendapatkan dukungan luas, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proyek IKN.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berkomitmen untuk menjalin kerjasama yang baik dengan media lokal dalam rangka memastikan informasi terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) tersampaikan secara efektif dan efisien. Kerjasama ini dilakukan dengan berbagai media lokal, baik media cetak maupun media online.

Media lokal yang diajak kerjasama:

Media cetak:

1. Koran Kaltim
2. Kaltim Post
3. Tribun Kaltim
4. Suara Kaltim

Media online:

1. kaltimtoday.co
2. kaltim.id

3. kaltimkece.id

4. kaltimpos.co.id

Kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk kerjasama:

1. **Press release:** Pemprov Kaltim rutin mengirimkan press release kepada media lokal untuk memberikan informasi terkini terkait IKN.

“...Kami ingin masyarakat Kalimantan Timur dan Indonesia pada umumnya mengetahui secara langsung tentang perkembangan IKN. Kami juga ingin masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN, Kami ingin masyarakat mengetahui bahwa IKN Nusantara merupakan proyek yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami juga ingin masyarakat mendukung pembangunan IKN” (HM Syafranudin, Kepala Adpim/Humas Kaltim : 10 Oktober 2023)

2. **Kunjungan lapangan:** Pemprov Kaltim mengundang media lokal untuk mengunjungi lokasi pembangunan IKN.

“...Kunjungan lapangan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 12-13 Februari 2024. Fasilitas yang disediakan antara lain Transportasi dari Samarinda ke lokasi IKN dan sebaliknya, Akomodasi di lokasi IKN, Makan dan minum selama kunjungan lapangan, Informasi tentang perkembangan pembangunan IKN. kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun citra positif IKN di mata publik. Kami ingin masyarakat mengetahui bahwa IKN Nusantara merupakan proyek yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami juga ingin masyarakat mendukung pembangunan IKN.” (HM Syafranudin, Kepala Adpim/Humas Kaltim : 5 Januari 2024)

3. **Fasilitasi wawancara:** Pemprov Kaltim memfasilitasi wawancara media lokal dengan pejabat terkait pembangunan IKN.

“...Salah satu contohnya adalah saat kami memfasilitasi wawancara antara wartawan dengan Gubernur Kalimantan Timur, H. Isran Noor. Wawancara tersebut membahas tentang perkembangan pembangunan IKN Nusantara. Narasumber yang paling diharapkan wartawan untuk bisa diwawancarai adalah Gubernur Kalimantan Timur, H. Isran Noor. Beliau merupakan sosok yang paling memahami tentang perkembangan pembangunan IKN Nusantara. Selain Gubernur Kalimantan Timur, narasumber lain yang juga sering diwawancarai oleh wartawan adalah Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono. Beliau merupakan sosok yang bertanggung jawab atas pembangunan IKN Nusantara.” (HM Syafranudin, Kepala Adpim/Humas Kaltim : 5 Januari 2024)

Kegiatan kerjasama dengan media lokal dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur. Diskominfo Kaltim menjalin

komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan media lokal untuk memastikan bahwa informasi terkait IKN dapat tersampaikan secara efektif dan efisien. Kolaborasi dengan APINDO Kaltim dan ADB bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di IKN. Kolaborasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan IKN dapat berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kerjasama dengan media lokal memiliki kaitan yang erat dengan kolaborasi ini. Media lokal dapat berperan sebagai mitra dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pembangunan IKN yang berkelanjutan. Media lokal juga dapat berperan dalam mempromosikan IKN sebagai tujuan investasi dan pariwisata. Dengan kerjasama yang baik antara Pemprov Kaltim dan media lokal, diharapkan informasi terkait IKN dapat tersampaikan secara luas dan akurat kepada masyarakat. Hal ini penting untuk membangun dukungan publik terhadap pembangunan IKN dan memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai dengan rencana.

“...Kolaborasi dengan APINDO Kaltim dan ADB bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM di IKN dan memastikan pembangunan IKN berkelanjutan. Media lokal dapat berperan sebagai mitra dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pembangunan IKN yang berkelanjutan. Media lokal juga dapat berperan dalam mempromosikan IKN sebagai tujuan investasi dan pariwisata.” (HM Syafranudin, Kepala Adpim/Humas Kaltim : 10 Oktober 2023)

C. Bentuk komunikasi dalam membentuk citra positif IKN

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyadari bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki potensi untuk menimbulkan berbagai isu negatif. Isu-isu tersebut dapat berasal dari berbagai pihak, baik dari masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta. Berikut adalah beberapa isu negatif terkait IKN yang telah diidentifikasi oleh Pemprov Kaltim:

1. Dampak lingkungan. Pembangunan IKN akan berdampak signifikan terhadap lingkungan di Kalimantan Timur. Dampak tersebut dapat berupa kerusakan hutan, pencemaran udara dan air, serta perubahan iklim.

2. **Konflik sosial.** Pembangunan IKN akan berdampak pada masyarakat yang tinggal di kawasan IKN. Masyarakat tersebut dapat mengalami penggusuran, kehilangan mata pencaharian, dan perubahan budaya.

3. **Ketidaktransparansi.** Pembangunan IKN membutuhkan anggaran yang sangat besar. Ketidaktransparansi dalam pengelolaan anggaran dapat menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan sosial.

4. **Korupsi.** Pembangunan IKN merupakan proyek yang sangat besar dan kompleks. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggelapan anggaran, mark up harga, dan suap.

Pemprov Kaltim telah mengambil berbagai langkah untuk mengantisipasi potensi isu negatif tersebut. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan IKN. Pemprov Kaltim telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) IKN yang ramah lingkungan. RTRW tersebut mengatur berbagai upaya untuk melindungi lingkungan, seperti pelestarian hutan, pengelolaan air, dan mitigasi perubahan iklim.

2. Menjalin kerjasama dengan ADB untuk menjadikan IKN sebagai kota hutan netral karbon. Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung upaya Pemprov Kaltim dalam menjaga lingkungan. ADB akan memberikan bantuan teknis dan pendanaan untuk pembangunan IKN yang ramah lingkungan.

3. Menyebarkan informasi terkait IKN. Pemprov Kaltim berkomitmen untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat terkait IKN kepada masyarakat. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui berbagai media, seperti website, media sosial, dan kegiatan sosialisasi.

Dengan berbagai langkah yang telah diambil tersebut, Pemprov Kaltim berharap dapat meminimalisir potensi isu negatif terkait IKN. Namun, Pemprov Kaltim juga menyadari bahwa tidak ada jaminan bahwa isu-isu tersebut tidak akan muncul. Oleh karena itu, Pemprov Kaltim terus berkomitmen untuk melakukan komunikasi dan

koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak untuk mengatasi isu-isu negatif yang mungkin muncul.

“...Pemprov Kaltim mengetahui potensi isu negatif terkait IKN dari berbagai sumber, antara lain Survei publik, Pemprov Kaltim telah melakukan survei publik untuk mengetahui pendapat masyarakat terkait pembangunan IKN. Survei tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki berbagai kekhawatiran terkait dampak lingkungan, konflik sosial, ketidaktransparansi, dan korupsi. Diskusi dengan berbagai pihak, Pemprov Kaltim telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak, seperti masyarakat, akademisi, dan pakar lingkungan. Diskusi tersebut memberikan masukan terkait potensi isu negatif terkait IKN. Analisis data, Pemprov Kaltim melakukan analisis data terkait pembangunan IKN, baik data internal maupun data eksternal. Analisis data tersebut menunjukkan adanya potensi isu negatif terkait IKN.”(HM Syafranudin, Kepala Adpim/Humas Kaltim : 10 Oktober 2023)

Pemastian bahwa informasi yang disampaikan sejalan dengan nilai-nilai dan kebijakan Pemprov Kaltim terkait IKN juga menjadi fokus utama. Langkah-langkah yang dilakukan, seperti penegasan dari Gubernur Kaltim Dr. H. Isran Noor untuk melihat pembangunan IKN dari sisi nilai kebangsaan, pengawalan oleh BPKP Kaltim terhadap tata kelola dan pengelolaan risiko, serta upaya peningkatan SDM dan SDA oleh Pemerintah Kaltim, menjadi strategi untuk memastikan konsistensi informasi dengan nilai-nilai dan kebijakan yang ada. Pemprov Kaltim juga merencanakan secara khusus untuk melibatkan generasi muda dalam pemahaman dan dukungan terhadap IKN. Dengan menekankan pentingnya kreativitas generasi muda dalam mensukseskan pembangunan daerah, serta mengakui bahwa pembangunan IKN ditujukan untuk para generasi muda, Pemprov Kaltim menciptakan wadah bagi partisipasi dan kontribusi positif dari kalangan pemuda.

“...Humas Pemprov Kaltim melakukan berbagai kegiatan untuk menciptakan wadah bagi partisipasi dan kontribusi positif dari kalangan pemuda untuk IKN. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan lomba-lomba yang berfokus pada IKN. Selain itu, Humas Pemprov Kaltim juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dialog dan diskusi dengan pemuda. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi tentang IKN kepada pemuda dan untuk mendengarkan masukan dari pemuda. Target dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah untuk Meningkatkan pemahaman pemuda tentang IKN, Mengembangkan ide dan gagasan pemuda tentang IKN, Mengembangkan kapasitas pemuda untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN” (HM Syafranudin, Kepala Adpim/Humas Kaltim :5 Januari 2024)

Adapun untuk diseminasi informasi ke wilayah proyek IKN yang mungkin memiliki akses terbatas terhadap media sosial, Pemprov Kaltim telah mengidentifikasi beberapa metode alternatif. Penggunaan media cetak, sosialisasi langsung, SMS broadcast, dan media radio lokal menjadi strategi untuk menjangkau masyarakat di wilayah proyek IKN yang mungkin tidak memiliki akses luas terhadap media sosial.

Transparansi dalam menyampaikan informasi terkait kontraktor dan pihak yang terlibat dalam proyek IKN menjadi perhatian utama. Pemprov Kaltim menerapkan sistem yang transparan, melibatkan pengauditan independen, dan memastikan proses tender berjalan secara adil dan terbuka. Ini merupakan langkah-langkah konkret untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat terkait transparansi dalam pelaksanaan proyek IKN.

“...Masyarakat umum dapat memperoleh nama kontraktor dan pihak yang terlibat dalam pembangunan IKN melalui berbagai cara, antara lain Melalui media massa, Melalui website, Melalui call center”(HM Syafranudin, Kepala Adpim/Humas Kaltim :5 Januari 2024)

Dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap informasi terkait IKN, Pemprov Kaltim menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sosialisasi langsung, peningkatan inovasi di jajaran ASN, dan penerapan sistem transparan menjadi strategi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi terkait IKN. Dengan langkah-langkah ini, Pemprov Kaltim bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya terkait proyek IKN.

“...wilayah-wilayah dengan akses informasi terbatas di Kalimantan Timur antara lain Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat. Humas Pemprov Kaltim telah melakukan kegiatan sosialisasi langsung di wilayah-wilayah dengan akses informasi terbatas tersebut sebanyak 10 kali. Materi informasi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut antara lain Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pemindahan Ibu Kota Negara, Kebijakan pemerintah terkait IKN, Peluang investasi di IKN. Narasumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut antara lain Pejabat dari Pemprov Kaltim, Pejabat dari Otorita IKN Nusantara, Pakar dari berbagai bidang. Humas Pemprov Kaltim juga melakukan kegiatan SMS broadcast ke masyarakat di wilayah-wilayah dengan akses informasi terbatas. Isi SMS tersebut antara lain Pemberitahuan tentang kegiatan sosialisasi langsung, Informasi tentang perkembangan pembangunan IKN. SMS broadcast tersebut disebarakan sebanyak 20 kali dalam kurun waktu 1 bulan.” (HM Syafranudin, Kepala Adpim/Humas Kaltim :5 Januari 2024)

Dalam mengembangkan pesan dan strategi komunikasi IKN, Pemprov Kaltim sangat memperhitungkan keterlibatan komunitas lokal. Upaya pemetaan karakteristik tenaga kerja lokal dan peningkatan kualitas melalui pelatihan adalah langkah konkret untuk memastikan partisipasi dan pelibatan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat juga menjadi metode efektif untuk memberikan informasi akurat dan transparan terkait IKN. Pemprov Kaltim menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai strategi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan terkait IKN.

Strategi khusus dilakukan untuk menyampaikan progres dan pencapaian positif terkait IKN secara berkala kepada masyarakat. Pemprov Kaltim secara teratur menggunakan media massa seperti surat kabar, televisi, dan radio, serta memanfaatkan situs web resmi dan media sosial untuk memberikan informasi terkini kepada masyarakat. Sosialisasi dan penyuluhan langsung tetap menjadi bagian penting dari strategi ini untuk memastikan informasi yang akurat dan transparan dapat diakses oleh masyarakat.

Dalam mengelola perbedaan pendapat atau kontroversi terkait IKN, Pemprov Kaltim terus menjalankan upaya yang melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta inovasi di jajaran ASN provinsi-provinsi. Melalui pendekatan transparan dan independen, serta peningkatan kepercayaan masyarakat melalui informasi akurat dan transparan, Pemprov Kaltim berusaha mengelola perbedaan pendapat yang mungkin muncul di masyarakat. Pemprov Kaltim juga mengambil inisiatif khusus untuk memperkuat citra IKN sebagai proyek yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Langkah-langkah konkret, seperti penggunaan material yang ramah lingkungan, perhatian terhadap aspek lingkungan, konsep pembangunan yang ramah lingkungan, dan penerapan konsep forest city, menunjukkan komitmen Pemprov Kaltim dalam memastikan bahwa IKN tidak hanya menjadi proyek pembangunan, tetapi juga proyek yang berkelanjutan dan peduli lingkungan. Terakhir, untuk memastikan bahwa

informasi yang disampaikan mencakup semua aspek proyek, Pemprov Kaltim memberikan berbagai sumber informasi, termasuk situs web resmi IKN, newsletter, dan sesi pelatihan atau acara IKN. Dengan berbagai cara tersebut, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang proyek IKN, termasuk perkembangan terbaru dan rencana ke depan.

“...website resmi IKN adalah www.ikn.go.id. Website tersebut dikelola oleh Otorita IKN Nusantara. Nama newsletter IKN adalah IKN News. Newsletter tersebut diterbitkan oleh Otorita IKN Nusantara. Humas Pemprov Kaltim berperan sebagai mitra Otorita IKN Nusantara dalam pengelolaan website dan newsletter IKN. Humas Pemprov Kaltim memberikan dukungan dalam hal penyediaan konten, distribusi informasi, dan promosi. : Pemprov Kaltim berperan sebagai penyelenggara dan fasilitator sesi pelatihan IKN. Pelatihan IKN diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat tentang IKN. Pelatihan IKN dapat berupa pelatihan tentang Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pemindahan Ibu Kota Negara, Kebijakan pemerintah terkait IKN, Potensi IKN, Sektor-sektor yang akan berkembang di IKN, Keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di IKN. Humas Pemprov Kaltim mengelola berbagai acara IKN, antara lain Kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan IKN, Dialog dan diskusi tentang IKN, Lomba-lomba yang berfokus pada IKN, Pameran dan festival yang terkait dengan IKN” (HM Syafranudin, Kepala Adpim/Humas Kaltim :5 Januari 2024)

Pemprov Kaltim telah menerapkan berbagai metode untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan terkait IKN. Penelitian yang fokus pada pemahaman, peran, dan kesempatan komunitas lokal merupakan langkah signifikan untuk mengidentifikasi sejauh mana informasi IKN telah terserap dan dipahami oleh masyarakat setempat. Untuk memastikan konsistensi pesan terkait IKN di berbagai platform komunikasi, Pemprov Kaltim telah menetapkan pesan inti yang jelas dan konsisten. Penggunaan logo dan identitas merek yang seragam, penggunaan bahasa yang sama, dan menjalin sinergi digital merupakan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa pesan IKN selalu sejalan di semua platform komunikasi. Meskipun belum ada rencana khusus untuk mengadaptasi strategi komunikasi IKN mengikuti perkembangan dan perubahan dalam proyek tersebut, Pemprov Kaltim menunjukkan kesadaran akan pentingnya strategi komunikasi yang efektif dan adaptif seiring berjalannya waktu. Hal ini diperlukan mengingat dinamika proyek IKN yang terus berkembang. Dalam memastikan bahwa audiens target dalam strategi komunikasi IKN

terus teridentifikasi dan dipahami seiring berjalannya waktu, Pemprov Kaltim menerapkan langkah-langkah seperti menempatkan penduduk lokal sebagai target audiens paling penting dan melakukan survei atau penelitian berkala. Melalui evaluasi secara teratur, Pemprov Kaltim memastikan bahwa strategi komunikasi IKN tetap relevan dan efektif dalam mencapai audiens target.

Pemprov Kaltim juga menggunakan data dan analisis untuk memahami tren dan perubahan dalam perilaku serta preferensi masyarakat. Selain itu, dalam mengelola platform media sosial, staf Humas memanfaatkan media sosial resmi IKN dan memantau percakapan serta tren terkait IKN di berbagai platform. Metode yang digunakan oleh staf Humas untuk mengukur pemahaman masyarakat termasuk penelitian, survei, evaluasi manajemen hubungan masyarakat, dan evaluasi tenaga Humas pemerintah oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan pendekatan yang holistik dan beragam ini, Pemprov Kaltim berusaha memastikan bahwa informasi terkait IKN disampaikan dengan efektif dan dipahami oleh masyarakat, sehingga menciptakan pemahaman yang mendalam dan dukungan yang luas terhadap proyek tersebut.

“...Menggunakan data dan analisis untuk memahami tren dan perubahan dalam perilaku dan preferensi masyarakat. Data dan analisis ini dapat diperoleh dari survei atau penelitian, serta dari data yang dikumpulkan dari platform komunikasi yang digunakan.”
(HM Syafranudin, Kepala Adpim/Humas Kaltim : 10 Oktober 2023)

D. Aktivitas kehumasan yang dilakukan oleh humas Kaltim dalam membentuk citra IKN.

Humas Propinsi Kaltim memiliki peran penting dalam membentuk citra Ibukota Nusantara (IKN) melalui aktivitas kehumasan yang dilakukan. Dalam teori PENCILS sebagai panduan dalam mengembangkan strategi public relations. Teori PENCILS terdiri dari Publication & Publicity, Event Marketing, News Management, Community Involvement, Internal Communication, Lobbying, dan Social Responsibility. Dalam konteks IKN, humas Propinsi Kaltim menggunakan teori PENCILS untuk memperkenalkan IKN kepada masyarakat melalui publikasi dan publisitas, mengorganisir kegiatan atau event yang dapat membentuk citra positif IKN, mengelola berita atau informasi terkait IKN, melibatkan masyarakat dalam pembangunan IKN,

mengembangkan komunikasi internal yang efektif, melakukan lobbying untuk mendukung pembangunan IKN, dan memperhatikan tanggung jawab sosial dalam pembangunan IKN.

Selain itu, humas Propinsi Kaltim juga melakukan kolaborasi dengan lembaga lain seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi untuk memperkuat aktivitas kehumasan dalam membentuk citra IKN. Dalam menjalankan aktivitas kehumasan ini, humas Propinsi Kaltim mampu beradaptasi dengan lingkungan dan melaksanakan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi sumber daya antar pengelola humas.

Berdasarkan teori PENCILS dapat di temukan bahwa :

1. Publicity

A. Contoh Artikel Mengenai IKN yang Diunggah di Website kaltimprov

Judul: IKN Nusantara Menjadi Pendorong Utama Pertumbuhan Ekonomi Kaltim

Penulis: Prabawati

Tanggal: 20 November 2023

Artikel ini membahas tentang bagaimana pembangunan IKN Nusantara diyakini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2023, khususnya di sektor infrastruktur, pariwisata, dan industri. Artikel ini juga menyebutkan bahwa pembangunan IKN Nusantara akan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga akan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat Kaltim.

A. Pernyataan dari Pihak Humas Pemprov Kaltim tentang apa yang mereka lakukan untuk identifikasi target website, tujuan penggunaan website untuk informasi tentang IKN, Pesan Kunci yang ada pada IKN yaitu,

- Identifikasi Target Website

Pemprov Kaltim telah melakukan identifikasi target website IKN Nusantara berdasarkan demografi, lokasi, dan minat. Target utama website IKN Nusantara adalah masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Timur.

- Tujuan Penggunaan Website

Tujuan penggunaan website IKN Nusantara adalah untuk memberikan informasi terkini dan faktual terkait proyek IKN kepada masyarakat. Informasi yang disajikan di website IKN Nusantara meliputi berita terbaru, dokumen proyek, dan informasi lainnya.

- Pesan Kunci

Pesan kunci yang ada pada IKN Nusantara adalah sebagai berikut:

- a. IKN Nusantara adalah ibu kota baru Indonesia yang terletak di Kalimantan Timur.
- b. Pembangunan IKN Nusantara bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- c. IKN Nusantara akan menjadi kota yang modern, cerdas, dan berkelanjutan.

B. Pernyataan dari pihak Humas Pemprov Kaltim tentang tema informasi terkait IKN

"...Humas Pemprov Kaltim menyampaikan informasi terkait IKN Nusantara melalui berbagai media, termasuk website, media sosial, dan acara-acara IKN. Tema informasi yang disampaikan meliputi Berita terbaru terkait pembangunan IKN Nusantara, Dokumen proyek IKN Nusantara, Informasi tentang lokasi dan infrastruktur IKN Nusantara, Informasi tentang dampak pembangunan IKN Nusantara terhadap masyarakat Informasi tersebut disampaikan secara berkala, yaitu Informasi terbaru terkait pembangunan IKN Nusantara akan diunggah di website IKN Nusantara setiap hari kerja, Informasi tentang dokumen proyek IKN Nusantara akan diunggah di website IKN Nusantara setiap bulan, Informasi tentang lokasi dan infrastruktur IKN Nusantara akan diunggah di website IKN Nusantara setiap enam bulan, Informasi tentang dampak pembangunan IKN Nusantara terhadap masyarakat akan diunggah di website IKN Nusantara setiap tahun." (HM Syafranudin, Kepala Adpim/Humas Kaltim :5 Januari 2024)

"...Selain itu, Pemprov Kaltim juga menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi terkait IKN Nusantara. Informasi yang disampaikan di media sosial antara lain Berita terbaru, Foto dan video Informasi interaktif. Pemprov Kaltim juga menggunakan media sosial untuk membangun dialog dan komunikasi dengan masyarakat terkait pembangunan IKN Nusantara." (HM Syafranudin, Kepala Adpim/Humas Kaltim :5 Januari 2024)

"...Humas Pemprov Kaltim melakukan peliputan/pengumpulan materi informasi terkait IKN Nusantara secara berkala. Peliputan dilakukan oleh tim humas yang terdiri dari jurnalis dan fotografer. Tim humas melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan IKN Nusantara untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan. Tim humas juga melakukan wawancara dengan narasumber terkait IKN Nusantara, seperti pejabat pemerintah, pakar, dan masyarakat. Humas Pemprov Kaltim menyajikan informasi tentang IKN dalam berbagai format, yaitu Teks, Video, Reels,

Infografis” (HM Syafranudin, Kepala Adpim/Humas Kaltim :5 Januari 2024)

2.Event

- a) Nama Event: Festival Harmoni Budaya Nusantara
- b) Tanggal Penyelenggaraan: 3 November 2023
- c) Target Audiens: Masyarakat umum, khususnya masyarakat Kalimantan Timur

"...Kami melakukan survei terhadap masyarakat umum untuk mengetahui apa yang ingin mereka ketahui tentang IKN Nusantara. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat umum ingin mengetahui lebih lanjut tentang potensi dan manfaat IKN Nusantara. Berdasarkan hasil survei tersebut, kami menetapkan masyarakat umum sebagai target audiens utama dalam Festival Harmoni Budaya Nusantara." (HM Syafranudin, Kepala Adpim/Humas Kaltim :5 Januari 2024)

"...Kami ingin menyampaikan pesan bahwa IKN Nusantara merupakan proyek nasional yang akan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Timur. Kami juga ingin menyampaikan pesan bahwa IKN Nusantara akan menjadi kota modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan." (HM Syafranudin, Kepala Adpim/Humas Kaltim :5 Januari 2024)

IKN Nusantara merupakan proyek nasional yang akan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Timur. IKN Nusantara akan menjadi kota modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tema Festival Festival Harmoni Budaya Nusantara dipilih berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh humas Pemprov Kaltim terhadap masyarakat umum. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat umum ingin mengetahui lebih lanjut tentang IKN Nusantara, khususnya tentang potensi dan manfaatnya.

"...Tema Festival IKN Nusantara 2023 dipilih berdasarkan hasil survei yang kami lakukan terhadap masyarakat umum. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat umum ingin mengetahui lebih lanjut tentang IKN Nusantara, khususnya tentang potensi dan manfaatnya. Berdasarkan hasil survei tersebut, kami menetapkan tema 'IKN Nusantara: Kota Masa Depan untuk Semua'." (HM Syafranudin, Kepala Adpim/Humas Kaltim :5 Januari 2024)

Proses publikasi dan diseminasi informasi tentang Festival IKN Nusantara 2023 dilakukan melalui berbagai media, yaitu Media massa, seperti televisi, radio, dan surat kabar. Media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Website IKN Nusantara. Humas Pemprov Kaltim juga bekerja sama dengan berbagai pihak.

"...Kami melakukan publikasi dan diseminasi informasi tentang Festival IKN Nusantara 2023 melalui berbagai media, yaitu media massa, media sosial, dan website IKN Nusantara. Kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mempromosikan seperti media massa, organisasi masyarakat, dan pengusaha."(HM Syafranudin, Kepala Adpim/Humas Kaltim :5 Januari 2024)

3. News

Pertimbangan kerjasama dengan media terkait IKN meliputi:

- Meningkatkan Informasi Publik: Kerjasama dengan media membantu Humas Kaltim dalam menyampaikan informasi yang akurat dan terkini terkait dengan pembangunan IKN kepada masyarakat luas.
- Membangun Citra Positif: Melalui kerjasama dengan media, Humas Kaltim mempromosikan pencapaian-pencapaian positif terkait dengan pembangunan IKN, sehingga membangun citra positif terkait dengan proyek tersebut.
- Menjangkau Audiens yang Luas: Media memiliki jangkauan yang luas, sehingga kerjasama dengan media membantu Humas Kaltim dalam menjangkau audiens yang beragam dan tersebar di berbagai wilayah.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Kerjasama dengan media juga membantu dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan IKN dengan memberikan ruang bagi liputan independen dan evaluasi dari berbagai pihak.

Dalam konteks kerjasama dengan media, Humas Kaltim bekerja sama dengan berbagai media lokal, nasional, dan internasional yang memiliki keberagaman dalam cakupan dan audiensnya. Kerjasama dengan media-media tersebut membantu dalam menyampaikan informasi terkait IKN kepada masyarakat secara komprehensif dan berkelanjutan.

"...Humas Pemprov Kaltim bekerjasama dengan berbagai media lokal di Kalimantan Timur, baik media cetak, media elektronik, maupun media online. Media-media tersebut

meliputi: Koran Kaltim Post, Tribun Kaltim, Suara Kaltim, Kaltim Today, Kaltim TV, TVRI Kaltim, RRI Kaltim, INews TV, TV One" (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

"...Humas Pemprov Kaltim memiliki beberapa pertimbangan dalam menjalin kerjasama dengan media terkait IKN, yaitu Kualitas media, Humas Pemprov Kaltim memilih media yang memiliki kualitas yang baik, baik dari segi jurnalistik maupun dari segi reputasi. Cakupan media, Humas Pemprov Kaltim memilih media yang memiliki cakupan yang luas, sehingga informasi terkait IKN dapat menjangkau masyarakat yang lebih banyak. Ketersediaan media, Humas Pemprov Kaltim memilih media yang memiliki ketersediaan untuk bekerjasama, baik dari segi waktu maupun sumber daya" (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Januari 2023)

" Humas Pemprov Kaltim melakukan berbagai aktivitas hubungan dengan media dalam rangka membentuk citra positif IKN, antara lain, Publikasi, Humas Pemprov Kaltim melakukan publikasi terkait IKN melalui berbagai saluran media, seperti media massa, media sosial, dan website. Publikasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan terkini terkait IKN kepada masyarakat luas. Event, Humas Pemprov Kaltim menggelar berbagai event terkait IKN, seperti konferensi pers, sosialisasi, dan talkshow. Event-event ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang IKN. Dialog, Humas Pemprov Kaltim melakukan dialog dengan media untuk menjawab pertanyaan dan tanggapan masyarakat terkait IKN. Dialog ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang baik antara Humas Pemprov Kaltim dengan media. Aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk membangun citra positif IKN di mata masyarakat" (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Januari 2023)

4. Community involvement

Aktivitas Humas Kaltim untuk melibatkan komunitas terkait dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara mencakup berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan promosi IKN. Berikut adalah beberapa aktivitas yang dapat dilakukan:

A) Nama-nama Komunitas yang Dilibatkan

Pemprov Kaltim telah melibatkan berbagai komunitas dalam pembangunan IKN Nusantara, antara lain Komunitas pemuda, Komunitas perempuan, Komunitas adat, Komunitas masyarakat lokal, Komunitas pengusaha, Proses Penentuan Komunitas Pemprov Kaltim mengidentifikasi komunitas-komunitas tersebut berdasarkan kriteria Pengaruh, Keperwakilan, Potensi Komunitas-komunitas tersebut diidentifikasi melalui

survei, wawancara, dan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha.

"...Kami melakukan survei, wawancara, dan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha. Kami juga mengidentifikasi komunitas-komunitas yang memiliki pengaruh, mewakili berbagai kelompok masyarakat, dan memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN." (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Januari 2023)

B) Bentuk Kegiatan Bersama Komunitas

1. Program CSR (Corporate Social Responsibility): Melalui program CSR, Humas Kaltim melibatkan komunitas dalam kegiatan-kegiatan bantuan dana, tenaga sukarelawan, atau kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar, seperti program-program lingkungan, pendidikan, atau kesehatan. Contoh kegiatan yang dilakukan Pemprov Kaltim yaitu pembersihan Pantai Sepaku pada 10-12 Agustus 2023. Lokasi Penyelenggaraan di Pantai Sepaku, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"...Pemprov Kaltim bekerja sama dengan komunitas pemuda dan masyarakat lokal untuk melakukan pembersihan pantai Sepaku. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar lokasi pembangunan IKN Nusantara. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan." (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Januari 2023)

3. Event-Event Komunitas: Humas Kaltim mengadakan event-event yang melibatkan komunitas lokal, seperti festival, pameran, atau kegiatan seni budaya yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan IKN kepada masyarakat luas. Contoh event yang di selenggarakan adalah Festival Harmoni Budaya Nusantara 2023 pada 3 November 2023.

"...Pemprov Kaltim bekerja sama dengan berbagai komunitas di Kalimantan Timur untuk menyelenggarakan Festival IKN Nusantara 2023. Festival ini bertujuan untuk memperkenalkan IKN Nusantara kepada masyarakat luas dan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap pembangunan IKN." (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Januari 2023)

3. Kegiatan Bersih-bersih Lingkungan: Melalui kegiatan bersih-bersih lingkungan, Humas Kaltim bekerja sama dengan komunitas untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar lokasi pembangunan IKN. Kegiatan tersebut yaitu Aksi Bersih-bersih Lingkungan di Titik Nol IKN Nusantara pada 10 Juni 2023. Lokasi Penyelenggaraan Titik Nol IKN Nusantara, Sepaku, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"...Kegiatan bersih-bersih lingkungan merupakan salah satu bentuk upaya Pemprov Kaltim untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar lokasi pembangunan IKN Nusantara. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan." (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Januari 2023)

"...Kami melakukan berbagai kegiatan bersama komunitas, antara lain sosialisasi dan edukasi tentang IKN, kegiatan dialog dan diskusi, kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kami berharap kegiatan-kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap IKN Nusantara, mengembangkan potensi masyarakat, dan membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat." (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

C) Tujuan Melibatkan Komunitas

Komunitas dilibatkan dalam pembangunan IKN Nusantara untuk:

- a) Meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap IKN
- b) Mengembangkan potensi masyarakat
- c) Membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat

"...Kami melibatkan komunitas dalam pembangunan IKN Nusantara untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap IKN, mengembangkan potensi masyarakat, dan membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Kami percaya bahwa pembangunan IKN Nusantara akan lebih sukses jika melibatkan peran aktif dari masyarakat." (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

Humas Pemprov Kaltim melakukan upaya-upaya berikut untuk mengetahui respon komunitas Melakukan survei dan wawancara, Melakukan diskusi dan dialog, Melakukan monitoring dan evaluasi.

"...Kami melakukan survei dan wawancara, melakukan diskusi dan dialog, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Kami berharap upaya-upaya tersebut dapat membantu kami memahami respon komunitas dan meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan yang kami lakukan." (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

D) Bentuk Respon Komunitas

Respon komunitas terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim antara lain Pemahaman yang meningkat, Dukungan yang meningkat, Potensi yang tergali, Sinergi yang terbangun.

"...Kami mendapatkan respon yang positif dari komunitas terhadap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Masyarakat semakin memahami tentang IKN Nusantara dan semakin mendukung pembangunan IKN. Selain itu, kami juga melihat potensi masyarakat yang semakin tergali dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat semakin terbangun." (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

Komunitas yang menjadi prioritas dalam aktivitas Humas Kaltim terkait IKN meliputi komunitas lokal di sekitar lokasi pembangunan IKN, komunitas yang peduli terhadap lingkungan, komunitas seni dan budaya, serta komunitas yang terlibat dalam kegiatan keagamaan. Prioritas ini didasarkan pada upaya untuk memastikan partisipasi yang luas dari berbagai lapisan masyarakat dalam proses pembangunan IKN dan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat sekitar.

Dalam mengelola kegiatan-kegiatan tersebut terkait IKN, Humas Kaltim memastikan bahwa komunikasi dengan komunitas dilakukan secara terbuka, transparan, dan inklusif. Hal ini melibatkan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya masyarakat lokal, serta memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat sekitar. Selain itu, kerjasama dengan komunitas juga memperhatikan keberlanjutan dan dampak positif jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Berikut adalah beberapa contoh komunitas yang telah terlibat dalam aktivitas Humas

Kaltim terkait IKN, Komunitas adat Dayak Punan di Kabupaten Kutai Timur, Komunitas pecinta lingkungan EcoNusa di Kabupaten Penajam Paser Utara, Komunitas seni dan budaya Dayak Iban di Kabupaten Kutai Kartanegara, Komunitas keagamaan Masjid Agung Al-Falah di Kabupaten Penajam Paser Utara, Proses Kegiatan Bersama Komunitas

Dalam aktivitas bersama komunitas, Humas Kaltim berperan sebagai Pertama Penyuluh, Humas Kaltim memberikan informasi dan edukasi kepada komunitas terkait IKN. Kedua Fasilitator, Humas Kaltim memfasilitasi komunikasi dan interaksi antara komunitas dan pemerintah. Ketiga Koordinator, Humas Kaltim mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang melibatkan komunitas.

Berikut adalah beberapa contoh peran humas dalam aktivitas bersama komunitas:

- a) Humas Kaltim memberikan informasi kepada komunitas adat Dayak Punan tentang rencana pembangunan IKN dan bagaimana pembangunan tersebut dapat berdampak pada masyarakat adat.
- b) Humas Kaltim memfasilitasi pertemuan antara komunitas pecinta lingkungan EcoNusa dengan pemerintah untuk membahas rencana pembangunan infrastruktur di sekitar IKN.
- c) Humas Kaltim mengoordinasikan kegiatan bersih-bersih lingkungan bersama komunitas seni dan budaya Dayak Iban.
- d) Humas Kaltim membantu komunitas keagamaan Masjid Agung Al-Falah untuk mengadakan kegiatan keagamaan di IKN.

5. Identity tools

Sumber narasi tunggal terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara dapat ditemukan dari berbagai sumber, termasuk situs web resmi pemerintah, publikasi resmi, dan laporan berita. Beberapa sumber yang dapat digunakan untuk mendapatkan narasi tunggal terkait IKN antara lain:

1. Situs web resmi Kementerian Hukum dan HAM: Kementerian Hukum dan HAM

memiliki publikasi narasi tunggal yang menjelaskan berbagai aspek terkait dengan IKN, termasuk visi, tujuan, dan dampak pembangunan IKN.

2. Laporan Berita: Berbagai laporan berita dari media resmi dan lembaga pemerintah juga menjadi sumber narasi tunggal terkait IKN. Laporan-laporan ini memberikan informasi terkini mengenai progres pembangunan, tujuan, dan manfaat dari IKN.

"...Narasi tunggal yang disampaikan pemerintah pusat terkait IKN Nusantara adalah bahwa IKN Nusantara merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, mengurangi beban Jakarta, dan meningkatkan daya saing Indonesia. IKN Nusantara juga diharapkan dapat menjadi kota yang modern, cerdas, dan berkelanjutan" (HM Syafranudin, Kepala Adpim/Humas Kaltim : 10 Oktober 2023)

Narasi tunggal yang disampaikan pemerintah pusat terkait IKN Nusantara menekankan tiga tujuan utama, yaitu Pemerataan pembangunan, IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi katalisator untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Pembangunan IKN akan memberikan dampak positif bagi berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya Kalimantan Timur. Mengurangi beban Jakarta, IKN Nusantara diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota negara. Jakarta saat ini mengalami berbagai masalah, seperti kemacetan, banjir, dan polusi udara. Pembangunan IKN Nusantara diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah tersebut. Meningkatkan daya saing Indonesia, IKN Nusantara diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. IKN Nusantara akan menjadi kota yang modern, cerdas, dan berkelanjutan, yang dapat menarik investasi dan talenta dari berbagai negara.

Upaya Humas Kaltim untuk menyampaikan narasi tunggal terkait IKN dapat meliputi:

1. Penyediaan Informasi Terkini: Humas Kaltim menyediakan informasi terkini mengenai pembangunan IKN, visi, dan tujuan proyek tersebut kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk situs web resmi, media sosial, dan konferensi pers.
2. Kolaborasi dengan Media: Humas Kaltim bekerja sama dengan media lokal, nasional, dan internasional untuk menyampaikan narasi tunggal terkait IKN. Hal ini dapat

dilakukan melalui konferensi pers, wawancara, dan publikasi berita yang mendukung narasi tunggal terkait IKN.

3. Kegiatan Komunitas: Melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan komunitas lokal, Humas Kaltim menyampaikan narasi tunggal terkait IKN secara langsung kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui diskusi publik, seminar, atau kegiatan partisipatif lainnya.

"...Pemprov Kaltim melakukan berbagai upaya untuk menyampaikan narasi tunggal IKN kepada target audiens, yaitu masyarakat Kalimantan Timur, pemerintah pusat, dan masyarakat luas" (HM Syafranudin, Kepala Adpim/Humas Kaltim : 10 Oktober 2023)

Pemprov Kaltim menyadari bahwa penting untuk menyampaikan narasi tunggal IKN kepada target audiens agar pembangunan IKN dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Upaya-upaya yang dilakukan Pemprov Kaltim tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat tentang IKN, tujuan pembangunannya, dan manfaatnya bagi Indonesia. Pemprov Kaltim juga berkomitmen untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan IKN. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengedepankan partisipasi masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan.

6. Lobbying

Peran Humas Kaltim dalam hubungan dengan institusi lain terkait dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara mencakup berbagai aspek, termasuk kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Beberapa institusi yang menjadi mitra Humas Kaltim terkait IKN dapat meliputi:

1. Pemerintah Daerah: Kolaborasi dengan pemerintah daerah, seperti Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur, serta pemerintah kabupaten dan kota terkait, untuk memastikan koordinasi yang baik dalam proses pembangunan IKN.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Kolaborasi dengan LSM yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat lokal untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan IKN.

3. Media: Kerjasama dengan media lokal, nasional, dan internasional untuk menyampaikan informasi terkait IKN kepada masyarakat secara komprehensif dan akurat.
4. Komunitas Lokal: Kolaborasi dengan komunitas lokal, seperti masyarakat adat, komunitas seni dan budaya, serta komunitas pariwisata, untuk memastikan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan IKN.

"..Peran humas dalam lobbying adalah untuk membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan. Humas berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan dan solusi yang saling menguntungkan" (HM Syafranudin, Kepala Adpim/Humas Kaltim : 10 Oktober 2023)

Upaya Humas Kaltim untuk menjalankan peran tersebut meliputi penyediaan informasi terkini, kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, penyelenggaraan kegiatan komunikasi dan publikasi, serta memastikan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk situs web resmi, media sosial, konferensi pers, dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan komunitas lokal.

" ...Humas Pemprov Kaltim melakukan lobbying dengan berbagai pemangku kepentingan terkait IKN, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, organisasi masyarakat, swasta, dan pemangku kepentingan internasional" (HM Syafranudin, Kepala Adpim/Humas Kaltim : 10 Oktober 2023)

Untuk pemangku kepentingan yang bukan bagian dari tugas lobbying Humas Pemprov Kaltim terkait IKN, tugas tersebut dilakukan oleh Unit kerja perencanaan, Unit kerja perencanaan melakukan lobbying dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya untuk perencanaan pembangunan IKN. Unit kerja keuangan, Unit kerja keuangan melakukan lobbying dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya untuk pembiayaan pembangunan IKN. Unit kerja kerja sama, Unit kerja kerja sama melakukan lobbying dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan IKN. Humas Pemprov Kaltim bekerja sama dengan unit kerja lain di pemerintah daerah untuk melakukan lobbying terkait IKN. Kerja sama ini dilakukan

untuk memastikan bahwa lobbying dilakukan secara efektif dan efisien, serta untuk menghindari adanya konflik kepentingan.

7. Social Service

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengadakan berbagai kegiatan sosial terkait Ibu Kota Nusantara (IKN). Kegiatan sosial ini bertujuan untuk mempromosikan citra positif IKN Nusantara di masyarakat. Jenis-jenis kegiatan sosial yang diadakan oleh Pemprov Kaltim terkait IKN Nusantara antara lain:

1. Kegiatan Peduli Lingkungan: Kegiatan bersih-bersih pantai yang dilakukan oleh Ditbinmas Polda Kaltim bersama warga untuk membersihkan sampah di Pantai Patra Tama Brimob Balikpapan. Penanaman pohon di sekitar lokasi IKN Nusantara. Kegiatan ini dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan perusahaan swasta.
2. Kegiatan Penguatan Tugas dan Fungsi Kehumasan: Kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas kehumasan dan penyebaran informasi mengenai IKN Nusantara.
3. Kegiatan Bakti Sosial: Kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti pemberian bantuan sosial, pengobatan gratis, dan pendidikan.

Kegiatan sosial terkait IKN Nusantara merupakan salah satu upaya Pemprov Kaltim untuk mempromosikan citra positif IKN Nusantara. Kegiatan sosial ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, kegiatan sosial ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan kualitas lingkungan. Secara tidak langsung, kegiatan sosial ini dapat meningkatkan citra positif IKN Nusantara di masyarakat sebagai kota yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Tugas humas dalam kegiatan sosial terkait IKN Nusantara antara lain Menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, Memantau dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

"...Tujuan Pemprov Kaltim mengadakan kegiatan sosial terkait IKN Nusantara adalah

untuk mendukung pembangunan IKN Nusantara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, meningkatkan citra positif IKN Nusantara di masyarakat, dan membangun hubungan baik dengan masyarakat. Kegiatan sosial ini juga merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai gotong royong dan kepedulian sosial"(Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

"...Target audiens dari kegiatan sosial terkait IKN Nusantara adalah masyarakat Kalimantan Timur, masyarakat Indonesia, dan masyarakat internasional. Kami berharap bahwa kegiatan sosial ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan citra positif IKN Nusantara di berbagai kalangan"(Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

E. Tahapan strategi komunikasi dalam membentuk citra positif IKN

1. Aktivitas pada analisis situasi

Untuk mengetahui sumber daya komunikasi yang dimiliki dalam membentuk strategi komunikasi Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dapat melakukan beberapa hal. Pertama Melakukan audit komunikasi, Pemprov Kaltim melakukan audit komunikasi untuk mengetahui sumber daya komunikasi yang dimiliki, seperti media sosial, situs web, saluran resmi pemerintah, dan lain-lain. Audit ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sumber daya komunikasi yang dimiliki digunakan untuk membangun citra positif IKN.

"..Audit komunikasi terkait IKN dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh Pemprov Kaltim. Tim ini terdiri dari pakar komunikasi, jurnalis, dan akademisi. Tim ini akan melakukan audit secara berkala untuk menilai efektivitas komunikasi Pemprov Kaltim dalam membangun citra positif tentang IKN." (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

"...Kelebihan sumber daya yang dimiliki humas Kaltim adalah Ketersediaan anggaran yang memadai. Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk kegiatan komunikasi terkait IKN. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pembuatan iklan, sosialisasi, dan media monitoring. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Humas Pemprov Kaltim memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang komunikasi. Sumber daya manusia tersebut memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam bidang komunikasi publik. Kekurangan sumber daya yang dimiliki humas Kaltim adalah Kesulitan dalam menjangkau masyarakat. Kalimantan Timur merupakan provinsi yang luas dan memiliki penduduk yang tersebar. Hal ini menjadi tantangan bagi humas Kaltim untuk menjangkau

masyarakat secara luas. Keterbatasan waktu. Pembangunan IKN merupakan proyek yang besar dan kompleks. Hal ini menjadi tantangan bagi humas Kaltim untuk membangun citra positif tentang IKN dalam waktu yang singkat.” (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

“...Audit komunikasi dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, antara lain Survei publik. Survei publik dilakukan untuk mengetahui pendapat masyarakat terkait IKN. Survei ini dapat digunakan untuk menilai efektivitas komunikasi Pemprov Kaltim dalam membangun citra positif tentang IKN. Analisis media. Analisis media dilakukan untuk menilai pemberitaan terkait IKN di berbagai media. Analisis ini dapat digunakan untuk menilai bagaimana citra IKN digambarkan oleh media. Wawancara dengan stakeholders. Wawancara dengan stakeholders dilakukan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait komunikasi Pemprov Kaltim. Masukan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi Pemprov Kaltim.” (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

Kedua Melakukan survei, Pemprov Kaltim melakukan survei terhadap masyarakat untuk mengetahui preferensi mereka terhadap media komunikasi yang digunakan. Survei ini membantu Pemprov Kaltim dalam menentukan media komunikasi yang paling efektif untuk digunakan dalam membangun citra positif IKN.

“...Survei komunikasi IKN dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh Pemprov Kaltim. Survei dilakukan secara online dan offline. Survei online dilakukan melalui survei daring, sedangkan survei offline dilakukan melalui wawancara tatap muka.” (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

“...Responden survei adalah masyarakat Kalimantan Timur yang berusia 17 tahun ke atas. Responden dipilih secara acak dari berbagai latar belakang, termasuk usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan.” (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

“...Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat Kalimantan Timur memiliki preferensi yang tinggi terhadap media komunikasi digital, seperti media sosial dan website. Media-media tersebut dinilai lebih cepat, mudah, dan terjangkau.” (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

Ketiga Melakukan analisis pesaing, Pemprov Kaltim dapat melakukan analisis pesaing untuk mengetahui media komunikasi yang digunakan oleh pesaing dalam membangun citra positif. Analisis ini membantu Pemprov Kaltim dalam menentukan media komunikasi yang paling efektif untuk digunakan dalam membangun citra positif IKN.

Dalam membangun citra positif IKN, Pemprov Kaltim tidak hanya fokus pada komunikasi dengan masyarakat Kalimantan Timur. Pemprov Kaltim juga melakukan analisis pesaing untuk mengetahui bagaimana citra IKN digambarkan oleh pihak-pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Pemprov Kaltim memandang sebagai pesaing dalam hal pembentukan citra positif IKN adalah:

1. Media massa, baik media nasional maupun internasional. Media massa memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik.
2. Organisasi non-pemerintah (NGO), baik yang berbasis di Indonesia maupun di luar negeri. NGO sering kali menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang berbagai isu, termasuk IKN.
3. Aktivis, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Aktivis sering kali mengkritik pembangunan IKN.

“...Analisis pesaing ini membantu Pemprov Kaltim untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam membangun citra positif IKN. Dengan memahami tantangan tersebut, Pemprov Kaltim dapat menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif.”(Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

Keempat Melakukan kerjasama dengan media lokal, Pemprov Kaltim melakukan kerjasama dengan media lokal untuk memperkuat sumber daya komunikasi yang dimiliki. Kerjasama ini dapat berupa publikasi berita terkait IKN, wawancara dengan pejabat terkait IKN, atau liputan khusus tentang progres pembangunan IKN. Dengan melakukan audit komunikasi, survei, analisis pesaing, dan kerjasama dengan media lokal, Pemprov Kaltim dapat mengetahui sumber daya komunikasi yang dimiliki dan menentukan media komunikasi yang paling efektif untuk digunakan dalam membangun citra positif IKN. Hal ini diharapkan membantu Pemprov Kaltim dalam merancang strategi komunikasi yang efektif dan efisien untuk membangun citra positif IKN.

“...Materi informasi yang dikirim ke media terkait IKN meliputi Press release, berisi informasi terkini terkait IKN, seperti perkembangan pembangunan, kebijakan pemerintah, dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan IKN. Artikel berisi informasi yang lebih mendalam terkait IKN, seperti sejarah, potensi, dan dampak pembangunan IKN. Foto dan video dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang IKN.”(Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

“...Kegiatan media relations yang dilakukan humas Pemprov Kaltim terkait IKN meliputi Kunjungan media. Pemprov Kaltim mengundang media untuk mengunjungi lokasi pembangunan IKN. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran langsung tentang progres pembangunan IKN. Wawancara. Humas Pemprov Kaltim memfasilitasi wawancara media dengan pejabat terkait IKN. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang mendalam tentang IKN.” Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

“...Target audiens yang dituju lewat publikasi informasi dari media lokal adalah masyarakat Kalimantan Timur, baik di dalam maupun di luar provinsi. Informasi terkait IKN yang disampaikan melalui media lokal diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang IKN dan mendukung pembangunan IKN. Selain target audiens tersebut, Pemprov Kaltim juga menargetkan audiens nasional dan internasional. Hal ini penting untuk membangun citra positif IKN di mata masyarakat luas.” Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

Untuk mengetahui kebutuhan informasi masyarakat tentang Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Melakukan survei: Pemprov Kaltim dapat melakukan survei terhadap masyarakat untuk mengetahui kebutuhan informasi mereka terkait IKN. Survei ini dilakukan secara online atau offline dan dapat mencakup pertanyaan-pertanyaan terkait informasi yang diinginkan, sumber informasi yang diandalkan, dan preferensi media komunikasi yang digunakan.

“...Humas Pemprov Kaltim berperan sebagai penanggung jawab pelaksanaan survei komunikasi IKN. Humas bertanggung jawab untuk menyusun kuesioner survei, menyebarkan survei, dan menganalisis hasil survei. Survei dilakukan secara online dan offline. Survei online dilakukan melalui survei daring, sedangkan survei offline dilakukan melalui wawancara tatap muka.” (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 15 Desember 2023)

“...Pertanyaan survei yang diajukan ke masyarakat meliputi, Informasi apa yang Anda inginkan tentang IKN? Sumber informasi apa yang Anda andalkan untuk mendapatkan informasi tentang IKN? Media komunikasi apa yang Anda sukai untuk mendapatkan informasi tentang IKN? Apa pendapat Anda tentang pembangunan IKN?” (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 15 Desember 2023)

“...Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat Kalimantan Timur memiliki kebutuhan informasi yang tinggi tentang IKN. Masyarakat ingin mengetahui informasi tentang

perkembangan pembangunan, kebijakan pemerintah, dan dampak pembangunan IKN. Masyarakat juga mengandalkan berbagai sumber informasi untuk mendapatkan informasi tentang IKN, termasuk media massa, media sosial, dan website. Namun, media sosial merupakan sumber informasi yang paling disukai oleh masyarakat. Masyarakat juga memberikan dukungan yang positif terhadap pembangunan IKN. Masyarakat berharap pembangunan IKN dapat membawa manfaat bagi Kalimantan Timur dan Indonesia secara keseluruhan.” (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 15 Desember2023)

2. Melakukan analisis media: Pemprov Kaltim dapat melakukan analisis media untuk mengetahui jenis informasi yang paling banyak dicari oleh masyarakat terkait IKN. Analisis ini dilakukan dengan memantau media massa, media sosial, dan situs web terkait IKN.

“...Analisis media dilakukan secara rutin, yaitu setiap bulan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan pemberitaan terkait IKN di berbagai media. Media yang dianalisis meliputi, Media massa, baik media nasional maupun lokal. Media sosial, seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Situs web terkait IKN, baik situs web pemerintah maupun swasta” (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 15 Desember2023)

“...Dalam analisis media, hal-hal yang diamati meliputi,Topik pemberitaan terkait IKN, Kecenderungan pemberitaan terkait IKN, Posisi IKN dalam pemberitaan, Reaksi masyarakat terhadap pemberitaan terkait IKN. Analisis media dilakukan oleh tim analisis yang terdiri dari pakar komunikasi, jurnalis, dan akademisi.” (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 15 Desember2023)

“...Hasil analisis media secara umum menunjukkan bahwa pemberitaan terkait IKN di berbagai media cenderung positif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap pembangunan IKN.” (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 15 Desember2023)

3. Melakukan diskusi publik: Pemprov Kaltim melakukan diskusi publik dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan informasi mereka terkait IKN. Diskusi publik ini dapat dilakukan dalam bentuk forum, seminar, atau diskusi kelompok kecil.

“...Humas Pemprov Kaltim telah menyelenggarakan diskusi publik terkait IKN sebanyak 10 kali. Tema-tema diskusi publik yang diselenggarakan oleh humas Pemprov Kaltim meliputi Perkembangan pembangunan IKN,Kebijakan pemerintah terkait IKN, Dampak pembangunan IKN, Potensi dan peluang IKN, Peran masyarakat dalam pembangunan IKN.” (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 15 Desember2023)

“...Pembicara dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh humas Pemprov Kaltim meliputi Pejabat pemerintah, seperti Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Penajam Paser Utara, dan Kepala Otorita IKN. Pakar dan akademisi, seperti pakar ekonomi, pakar lingkungan, dan pakar hukum. Tokoh masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.” (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 15 Desember2023)

“...Tugas humas dalam diskusi publik tersebut meliputi Menyusun konsep diskusi publik, Mempersiapkan materi diskusi, Menyiapkan pembicara, Melakukan promosi diskusi, Melaksanakan diskusi, Melakukan evaluasi diskusi” (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 15 Desember2023)

4. Melakukan kajian literatur: Pemprov Kaltim dapat melakukan kajian literatur terkait IKN untuk mengetahui kebutuhan informasi masyarakat terkait IKN. Kajian literatur ini mencakup studi kasus, jurnal, dan publikasi terkait IKN.

“...Literatur yang menjadi bahan rujukan humas Pemprov Kaltim meliputi Studi kasus, seperti studi kasus pembangunan ibu kota negara di negara lain. Jurnal, seperti jurnal ilmiah yang membahas tentang pembangunan ibu kota negara. Publikasi, seperti buku, laporan, dan artikel yang membahas tentang pembangunan ibu kota negara.” (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 15 Desember2023)

“...Hasil kajian literatur digunakan oleh humas Pemprov Kaltim untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif dalam membangun citra positif IKN. Strategi komunikasi tersebut meliputi Pemilihan pesan, yaitu pemilihan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Pemilihan media, yaitu pemilihan media komunikasi yang akan digunakan untuk menyampaikan informasi. Pemilihan metode komunikasi, yaitu pemilihan metode komunikasi yang akan digunakan untuk menyampaikan informasi. Berdasarkan hasil kajian literatur, humas Pemprov Kaltim menemukan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan informasi yang tinggi tentang IKN. Masyarakat ingin mengetahui informasi tentang perkembangan pembangunan, kebijakan pemerintah, dan dampak pembangunan IKN.”(Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 15 Desember2023)

Dengan melakukan survei, analisis media, diskusi publik, dan kajian literatur, Pemprov Kaltim mengetahui kebutuhan informasi masyarakat terkait IKN. Informasi yang diperoleh dari kegiatan tersebut membantu Pemprov Kaltim dalam merancang strategi komunikasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat terkait IKN.

“...Dengan melakukan survei, analisis media, diskusi publik, dan kajian literatur, Pemprov Kaltim memperoleh informasi untuk mengetahui kebutuhan informasi

masyarakat tentang IKN. Informasi ini sangat berharga dalam merancang strategi komunikasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat terkait IKN.” (Rahma Dewi Suryaningsih : 10 Agustus 2023)

Hasil pemantauan terhadap kebutuhan informasi masyarakat tentang Ibu Kota Negara (IKN) menunjukkan bahwa kebutuhan informasi masyarakat tentang IKN berubah dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil pemantauan, berikut adalah kebutuhan informasi masyarakat tentang IKN:

- a.) Saat pertama ditetapkan: Ketika IKN pertama kali ditetapkan, masyarakat membutuhkan informasi terkait rencana pembangunan IKN, lokasi IKN, manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat, dan progres pembangunan IKN.
- b.) Tahun ke tahun: Kebutuhan informasi masyarakat tentang IKN berubah dari tahun ke tahun. Namun secara umum, masyarakat membutuhkan informasi terkait progres pembangunan IKN, manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat, dan kebijakan terkait IKN.

Persepsi masyarakat terhadap IKN juga berubah dari waktu ke waktu. Pada awalnya, masyarakat merasa skeptis terhadap rencana pembangunan IKN. Namun, seiring dengan progres pembangunan yang semakin jelas, persepsi masyarakat terhadap IKN berubah menjadi lebih positif. Pemantauan terhadap kebutuhan informasi masyarakat tentang IKN dilakukan melalui survei, analisis media, diskusi publik, dan kajian literatur. Dengan memahami kebutuhan informasi masyarakat dan membangun citra positif IKN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan IKN dan memastikan keberhasilan proyek ini. Oleh karena itu, Pemprov Kaltim terus memantau kebutuhan informasi masyarakat dan memperbarui strategi komunikasi mereka untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menangani masyarakat yang masih ragu atau bahkan memiliki persepsi negatif terhadap Ibu Kota Negara (IKN). Memberikan informasi yang akurat dan transparan, Pemprov Kaltim memberikan informasi yang akurat dan transparan terkait IKN kepada masyarakat. Informasi yang diberikan harus jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan memberikan informasi yang akurat dan transparan, masyarakat memahami dengan lebih

baik tentang IKN dan mengurangi persepsi negatif yang mungkin dimiliki. Melakukan sosialisasi, Pemprov Kaltim melakukan sosialisasi terkait IKN kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai cara, seperti brosur, poster, dan leaflet. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara mendistribusikan materi-materi promosi terkait IKN kepada masyarakat secara langsung. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi terkait IKN kepada masyarakat secara luas dan membangun pemahaman serta dukungan dari mereka. Melakukan diskusi publik, Pemprov Kaltim melakukan diskusi publik dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait IKN.

Diskusi publik ini dilakukan dalam bentuk forum, seminar, atau diskusi kelompok kecil. Melalui diskusi ini, Pemprov Kaltim berinteraksi langsung dengan masyarakat dan mendengarkan langsung kekhawatiran dan masukan dari mereka. Menjalin kerjasama dengan media lokal, Pemprov Kaltim menjalin kerjasama dengan media lokal untuk memperkuat sumber daya komunikasi yang dimiliki. Kerjasama ini berupa publikasi berita terkait IKN, wawancara dengan pejabat terkait IKN, atau liputan khusus tentang progres pembangunan IKN. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menyampaikan informasi terkait IKN kepada masyarakat melalui media elektronik yang dijangkau oleh banyak orang. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, Pemprov Kaltim menangani masyarakat yang masih ragu atau bahkan memiliki persepsi negatif terhadap IKN. Dengan memberikan informasi yang akurat dan transparan, melakukan sosialisasi, diskusi publik, dan menjalin kerjasama dengan media lokal, Pemprov Kaltim membangun citra positif IKN dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan IKN.

“...Dalam menghadapi masyarakat yang masih ragu atau memiliki persepsi negatif terhadap IKN, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Dengan mengedukasi, berkomunikasi terbuka, melibatkan stakeholder, menjaga transparansi, dan mengatasi kekhawatiran dan masalah, pemerintah membangun dukungan yang lebih luas dan mengubah persepsi negatif menjadi lebih positif terhadap IKN.” (Rahma Dewi Suryaningsih (Staff Adpim/Humas Kaltim): 10 Agustus 2023)

Tujuan dari komunikasi Humas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengenai Ibu Kota Negara (IKN) adalah untuk membangun citra positif IKN dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan IKN. Sasaran komunikasi Humas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengenai Ibu Kota Negara (IKN) adalah masyarakat umum, khususnya masyarakat di Kalimantan Timur. Masyarakat sebagai penerima manfaat, Masyarakat adalah penerima manfaat utama dari pembangunan IKN. Oleh karena itu, penting bagi Pemprov Kaltim untuk menyampaikan informasi terkait IKN kepada masyarakat secara akurat dan transparan. Dengan menyampaikan informasi yang akurat dan transparan, masyarakat memahami dengan lebih baik tentang IKN dan memperkuat partisipasi mereka dalam pembangunan IKN. Masyarakat sebagai stakeholder, Masyarakat juga merupakan stakeholder penting dalam pembangunan IKN. Oleh karena itu, penting bagi Pemprov Kaltim untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan IKN dan membangun konsensus yang lebih luas.

Dengan melibatkan masyarakat, Pemprov Kaltim memperoleh perspektif yang beragam dan membangun dukungan yang lebih luas terhadap pembangunan IKN. Masyarakat sebagai pengguna layanan publik, IKN akan menjadi pusat pemerintahan dan layanan publik di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi Pemprov Kaltim untuk menyampaikan informasi terkait IKN kepada masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Dengan menyampaikan informasi yang akurat dan transparan, masyarakat memahami dengan lebih baik tentang layanan publik yang akan tersedia di IKN dan memperkuat partisipasi mereka dalam penggunaan layanan publik tersebut.

“...Penting bagi Pemprov Kaltim untuk menyampaikan informasi terkait IKN kepada masyarakat secara akurat dan transparan, melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan IKN, dan membangun konsensus yang lebih luas. Dengan memilih masyarakat sebagai sasaran komunikasi, Pemprov Kaltim membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan IKN, membangun citra positif IKN, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan publik di IKN.”
(Rahma Dewi Suryaningsih : 10 Agustus 2023)

2. Aktivitas pada problem identification

Beberapa isu negatif terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berhasil dideteksi dan diketahui oleh pihak Humas Kaltim antara lain:

1. Isu Lingkungan: Isu terkait dampak lingkungan, biodiversitas, pencemaran, dan hutan terkait dengan pembangunan IKN.
2. Sentimen Negatif dalam Media: Artikel-artikel bersentimen negatif terkait dengan IKN yang muncul dalam media berita daring.
3. Perdebatan dan Kritik: Kritik terhadap proses pembuatan UU IKN, proses pemindahan ibu kota, dan isu lingkungan terkait dengan IKN.
4. Tudingan terkait Pembukaan Kembali Keran Ekspor Pasir Laut: Tudingan terkait pembukaan kembali keran ekspor pasir laut yang diduga untuk menarik investasi di IKN.

Pihak Humas Kaltim mengetahui isu-isu negatif tersebut melalui analisis media, pemantauan berita daring, serta interaksi dengan masyarakat dan pihak terkait. Dengan memantau berbagai sumber informasi dan pendapat masyarakat, Humas Kaltim mendeteksi isu-isu yang berkembang terkait IKN dan merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif.

3. Aktivitas pada problem solution

Target audiens dari kegiatan komunikasi terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dilakukan oleh Humas Pemprov Kaltim meliputi masyarakat umum, termasuk masyarakat lokal yang terdampak oleh pembangunan IKN. Beberapa key messages yang disampaikan dalam kegiatan komunikasi terkait IKN mencakup informasi terkait progres pembangunan, manfaat bagi masyarakat, upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Proses penyusunan key messages dilakukan melalui analisis situasi, pemantauan media, interaksi dengan masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan pesan yang disampaikan mencerminkan visi dan tujuan pembangunan IKN. Pemangku kepentingan yang menjadi mitra dari Humas Pemprov Kaltim dalam kegiatan komunikasi terkait IKN meliputi pemerintah

daerah, lembaga swadaya masyarakat, media, dan komunitas lokal. Bentuk kegiatan komunikasi yang dilakukan meliputi tatap muka langsung dengan warga, publikasi melalui media digital, kegiatan bakti sosial, serta kolaborasi dengan komunitas lokal untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan IKN.

Komunikator dalam Humas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah pejabat terkait dan staf Humas Pemprov Kaltim. Pejabat terkait, seperti Gubernur, Wakil Gubernur, dan Kepala Dinas terkait, bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait IKN kepada masyarakat. Sementara itu, staf Humas Pemprov Kaltim bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi komunikasi terkait IKN. Pemilihan komunikator ini didasarkan pada keahlian dan pengalaman mereka dalam menyampaikan informasi terkait IKN kepada masyarakat. Pesan kunci (key messages) dalam komunikasi Humas Pemprov Kaltim mengenai IKN adalah untuk membangun citra positif IKN dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan IKN. Proses penentuan pesan kunci dilakukan melalui analisis situasi dan pemahaman terhadap kebutuhan informasi masyarakat. Pesan kunci yang ditentukan harus jelas, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan informasi masyarakat.

Pesan kunci ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi komunikasi terkait IKN. Pembagian tugas di Humas Pemprov Kaltim tentang produksi pesan mengenai IKN meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Analisis situasi: Staf Humas Pemprov Kaltim melakukan analisis situasi terkait IKN untuk memahami kebutuhan informasi masyarakat dan membangun pesan kunci yang relevan.
2. Perencanaan strategi: Staf Humas Pemprov Kaltim merencanakan strategi komunikasi terkait IKN berdasarkan pesan kunci yang telah ditentukan. Strategi ini meliputi pemilihan saluran media, penentuan jadwal publikasi, dan pengembangan materi promosi.
3. Produksi pesan: Staf Humas Pemprov Kaltim memproduksi pesan terkait IKN berdasarkan pesan kunci yang telah ditentukan. Pesan ini berupa materi promosi, seperti

poster, brosur, dan leaflet, atau materi publikasi, seperti berita, wawancara, dan liputan khusus.

Distribusi pesan: Staf Humas Pemprov Kaltim mendistribusikan pesan terkait IKN melalui saluran media yang telah dipilih. Saluran media yang digunakan meliputi media massa, media sosial, situs web resmi, dan pertemuan langsung dengan masyarakat.

“...Proses penentuan pesan kunci tersebut melibatkan analisis situasi, pemahaman terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, serta konsultasi dengan berbagai pihak terkait. Pesan kunci yang ditentukan harus jelas, mudah dipahami, dan relevan dengan konteks pembangunan IKN serta kebutuhan informasi masyarakat.” ((Rahma Dewi Suryaningsih : 10 Agustus 2023)

Situs web resmi digunakan untuk menyediakan informasi terkait IKN yang mudah diakses oleh masyarakat. Pertemuan langsung dengan masyarakat digunakan untuk membangun interaksi langsung dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi dan masukan dari mereka. Upaya yang dilakukan untuk mengetahui umpan balik/respon dari target komunikasi meliputi survei, analisis media, diskusi publik, dan kajian literatur. Survei dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap IKN. Analisis media dilakukan untuk memantau liputan media terkait IKN dan mengetahui tanggapan masyarakat terhadap liputan tersebut. Diskusi publik dilakukan untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait IKN.

Kajian literatur dilakukan untuk memperoleh informasi terkait IKN dari sumber-sumber yang terpercaya. Respon target komunikasi terhadap komunikasi Humas Pemprov Kaltim mengenai IKN beragam, tergantung pada pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap IKN. Respon yang positif menunjukkan bahwa pesan kunci yang disampaikan telah berhasil membangun citra positif IKN dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan IKN. Sementara itu, respon yang negatif menunjukkan bahwa pesan kunci yang disampaikan belum berhasil membangun citra positif IKN atau masih ada kebutuhan informasi yang belum terpenuhi.

Beberapa pemangku kepentingan yang menjadi mitra dari Humas Pemprov Kaltim terkait Ibu Kota Nusantara (IKN). Beberapa di antaranya adalah:

1. Daerah Mitra: Pemprov Kaltim berupaya membangun konektivitas IKN dengan daerah mitra untuk mendukung keberhasilan kebijakan pembangunan IKN.
2. Lembaga Pendidikan: Pemprov Kaltim menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga pendidikan sebagai mitra dalam program beasiswa untuk putra-putri daerah.
3. Masyarakat dan Daerah Sekitar: IKN akan mampu memicu daerah-daerah sekitar Kaltim dan Kalimantan, terutama kabupaten dan masyarakat sekitar.
4. Organisasi Olahraga: Pemprov Kaltim memberikan dukungan kepada organisasi olahraga, seperti Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), sebagai mitra dalam pembangunan keolahragaan.

Pemprov Kaltim juga menjalin kerjasama dengan media sebagai mitra dalam kegiatan komunikasi terkait IKN. Gubernur Kaltim menyatakan bahwa media adalah mitra pemerintah. Dalam kegiatan komunikasi terkait IKN, Pemprov Kaltim melakukan berbagai bentuk kegiatan, termasuk publikasi melalui media digital, tatap muka langsung dengan masyarakat, serta kerjasama dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan IKN.

Humas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) membangun komunikasi dua arah dengan publik melalui beberapa cara. Pertama Diskusi publik, Humas Pemprov Kaltim melakukan diskusi publik dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari mereka terkait Ibu Kota Nusantara (IKN). Diskusi publik ini dilakukan secara langsung dengan masyarakat atau melalui media sosial. Kedua Survei, Humas Pemprov Kaltim melakukan survei untuk mengukur tingkat pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap IKN. Survei ini dilakukan secara langsung dengan masyarakat atau melalui media sosial.

Bentuk kegiatan komunikasi yang dilakukan Humas Kaltim yaitu pertemuan langsung dengan masyarakat, Humas Pemprov Kaltim melakukan pertemuan langsung

dengan masyarakat untuk membangun interaksi langsung dengan mereka dan mendengarkan aspirasi dan masukan dari mereka terkait IKN. Selanjutnya, Analisis media, Humas Pemprov Kaltim melakukan analisis media untuk memantau liputan media terkait IKN dan mengetahui tanggapan masyarakat terhadap liputan tersebut. Ada pula Kajian literatur, Humas Pemprov Kaltim melakukan kajian literatur untuk memperoleh informasi terkait IKN dari sumber-sumber yang terpercaya. Dengan melakukan komunikasi dua arah dengan publik, Humas Pemprov Kaltim memperoleh perspektif yang beragam dan membangun konsensus yang lebih luas terkait IKN. Selain itu, komunikasi dua arah juga memperkuat interaksi dengan masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap Pemprov Kaltim.

“...Humas Pemprov Kaltim membangun komunikasi dua arah dengan publik melalui beberapa cara, seperti diskusi publik, survei, pertemuan langsung dengan masyarakat, analisis media, dan kajian literatur. Dengan melakukan komunikasi dua arah dengan publik, Humas Pemprov Kaltim memperoleh perspektif yang beragam dan membangun konsensus yang lebih luas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu, komunikasi dua arah juga memperkuat interaksi dengan masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap Pemprov Kaltim.” (Rahma Dewi Suryaningsih(Staff Adpim/Humas Kaltim) : 10 Agustus 2023)

F. Sumber pembanding

1. Media Lokal

Sumber pembanding melalui wawancara dengan 2 Media lokal Kaltim memberikan gambaran komprehensif tentang pendekatan dua media lokal terkemuka di Kaltim, yaitu Tribun Kaltim dan Kaltim Today, dalam melaporkan informasi terkait proyek IKN melalui wawancara. Tribun Kaltim secara konsisten membahas beberapa tema esensial terkait IKN, termasuk perkembangan infrastruktur, dampak lingkungan, potensi ekonomi, dan respons masyarakat. Dalam wawancara, Tribun Kaltim menegaskan komitmennya untuk menyajikan informasi terkini dan memberikan akses cepat kepada pembaca melalui rubrik khusus "Penajam."

Kaltim Today, di sisi lain, menempatkan fokus pada aspek dampak sosial ekonomi IKN, perubahan lingkungan, dan inisiatif pemerintah daerah terkait proyek. Dengan pendekatan ini, Kaltim Today memperdalam pemahaman pembaca tentang konsekuensi jangka panjang dari proyek ini. Mereka memiliki bagian khusus yang menyajikan berita, analisis, dan opini terkini mengenai IKN, menciptakan gambaran menyeluruh dan relevan untuk pembaca. Kedua media tersebut menunjukkan komitmen untuk melibatkan berbagai narasumber dalam pemberitaan IKN, mencakup perwakilan dari Pemprov Kaltim, ahli industri, dan masyarakat lokal. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemberitaan mereka mencerminkan sudut pandang yang seimbang dan komprehensif. Tribun Kaltim menegaskan bahwa kerjasama yang baik dengan humas Pemprov Kaltim memastikan pembaruan rutin dan akses yang mendalam, sedangkan Kaltim Today menyoroti hubungan positif dengan humas, yang membantu mereka memberikan liputan yang komprehensif.

Pandangan jurnalis media lokal Kalimantan Timur tentang fokus pemberitaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan materi informasi yang disediakan oleh Humas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mencerminkan perspektif yang sangat kontekstual, mengingat dampak langsung proyek ini terhadap masyarakat dan lingkungan di wilayah mereka. Media lokal Kaltim cenderung mengutamakan isu-isu yang terkait langsung dengan masyarakat setempat dalam peliputan mereka tentang IKN. Fokus pemberitaan mereka biasanya mencakup dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari proyek tersebut, serta tantangan yang dihadapi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan ibu kota baru. Sebagian jurnalis media lokal Kaltim menilai bahwa pembangunan IKN membawa prospek ekonomi yang cukup menjanjikan bagi warga setempat. Pemberitaan mereka sering kali menyoroti potensi peluang kerja baru, pertumbuhan infrastruktur, dan kemungkinan peningkatan sektor ekonomi lokal, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dari perspektif ini, materi informasi dari Humas Pemprov Kaltim yang berisi proyeksi ekonomi dan penjelasan mengenai investasi yang masuk dinilai cukup bermanfaat dan relevan untuk dilaporkan kepada masyarakat lokal. Mereka merasa bahwa Humas Pemprov Kaltim sudah cukup baik dalam menyediakan data yang menyoroti sisi positif dari pembangunan IKN, seperti manfaat ekonomi dan peningkatan fasilitas publik, yang dianggap penting bagi pembaca media lokal yang sebagian besar adalah masyarakat Kaltim sendiri.

Namun, banyak jurnalis media lokal Kaltim juga menyuarakan kritik terhadap informasi yang diberikan oleh Humas Pemprov Kaltim. Menurut mereka, Humas masih kurang transparan dan cenderung selektif dalam menyampaikan data, terutama terkait isu-isu yang lebih sensitif seperti dampak lingkungan dan perubahan sosial. Beberapa jurnalis lokal merasa bahwa Humas Pemprov Kaltim terlalu fokus pada narasi positif dan tidak cukup merespons kekhawatiran yang sering muncul di masyarakat, seperti risiko kerusakan hutan, dampak pada kehidupan masyarakat adat, dan kemungkinan adanya konflik lahan. Para jurnalis ini menilai bahwa informasi yang mereka terima sering kali normatif dan promosi, tanpa memberikan penjelasan yang objektif mengenai tantangan dan risiko yang mungkin dihadapi oleh masyarakat sekitar IKN.

Kesulitan akses terhadap narasumber langsung juga menjadi keluhan yang sering diutarakan oleh jurnalis media lokal Kaltim. Beberapa dari mereka menyatakan bahwa Humas Pemprov Kaltim terkadang kurang responsif dalam memberikan akses untuk wawancara dengan pejabat yang terlibat langsung dalam proyek IKN, seperti perwakilan pemerintah atau pelaksana proyek di lapangan. Hal ini dianggap menyulitkan upaya mereka untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan independen. Jurnalis lokal, yang sering kali dekat dengan masyarakat, merasa perlu untuk mendapatkan data yang lebih transparan dan inklusif agar dapat menyampaikan berita yang seimbang dan faktual kepada publik Kaltim. Selain itu, sebagian jurnalis media lokal Kaltim juga merasa bahwa informasi yang diberikan oleh Humas Pemprov Kaltim tidak selalu mengikuti perkembangan terkini yang terjadi di lapangan. Mereka mengharapkan adanya pembaruan informasi yang lebih cepat, terutama ketika ada perubahan penting atau kejadian yang langsung berdampak pada masyarakat sekitar. Bagi jurnalis lokal yang meliput langsung di lokasi atau di lapangan, kecepatan pembaruan informasi sangat penting untuk memberikan pemberitaan yang relevan dan sesuai dengan situasi nyata. Tanpa informasi terkini, media lokal merasa kesulitan untuk menyajikan laporan yang up-to-date dan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Kaltim yang sangat peduli dengan perkembangan IKN.

Namun, di tengah berbagai kritik, beberapa jurnalis media lokal juga mengapresiasi upaya Humas Pemprov Kaltim dalam memanfaatkan media sosial sebagai salah satu kanal komunikasi publik tentang IKN. Mereka menilai penggunaan media sosial oleh Humas cukup efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas, terutama kalangan muda yang lebih aktif menggunakan platform seperti Instagram dan Twitter. Bagi jurnalis lokal yang mengikuti perkembangan ini, informasi yang disampaikan di media sosial Humas Kaltim sering kali dapat menjadi bahan awal untuk laporan mereka, terutama dalam

menyampaikan informasi terbaru atau mengamati respons publik terhadap proyek IKN. Meskipun demikian, mereka berharap agar Humas lebih aktif merespons pertanyaan atau kritik yang muncul di media sosial agar dapat mengatasi misinformasi dan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Secara keseluruhan, jurnalis media lokal Kaltim melihat bahwa materi informasi dari Humas Pemprov Kaltim memiliki kelebihan, terutama dalam memberikan data yang mendukung aspek-aspek positif dari pembangunan IKN. Namun, mereka juga merasa bahwa transparansi, akses terhadap narasumber, dan kecepatan pembaruan informasi masih perlu ditingkatkan. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif, Humas Pemprov Kaltim dapat membantu media lokal dalam memberikan pemberitaan yang lebih berimbang, mendalam, dan sesuai dengan harapan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini penting agar masyarakat lokal mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang IKN, yang tidak hanya menyoroti manfaat, tetapi juga mempertimbangkan tantangan yang dihadapi dalam proyek pembangunan ibu kota baru ini.

“...Tentu, di media kami, kami sering mengangkat berbagai tema terkait IKN. Beberapa di antaranya termasuk perkembangan proyek infrastruktur, dampak lingkungan, potensi ekonomi, serta respons dan pandangan masyarakat setempat terhadap IKN.” (Taufik Rahmat, Jurnalis Tribun Kaltim :2 Oktober 2023)

“...Kami cenderung fokus pada dampak sosial ekonomi IKN, perubahan lingkungan, dan inisiatif yang diambil oleh pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan.” (Ibrahim Yusuf, Redaktur Kaltim Today : 2 Oktober 2023)

2. Masyarakat Lokal Kaltim

Pandangan masyarakat umum terhadap citra Ibu Kota Nusantara (IKN) dan media komunikasi Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) beragam, mencerminkan spektrum sudut pandang yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi, serta preferensi individu. Dengan proyek pembangunan ibu kota yang cukup ambisius ini, masyarakat memiliki berbagai pendapat tentang sejauh mana Humas Pemprov Kaltim mampu menghadirkan informasi yang relevan, akurat, dan dapat menjawab kekhawatiran publik. Berikut ini adalah uraian pandangan masyarakat terkait citra IKN dan efektivitas media komunikasi Humas Pemprov Kaltim:

1. Pandangan Positif : Pembangunan IKN Sebagai Peluang Ekonomi dan Pengembangan Daerah

Sebagian masyarakat melihat pembangunan IKN sebagai peluang besar untuk mengembangkan perekonomian Kalimantan Timur dan wilayah sekitarnya. Mereka berpendapat bahwa proyek ini tidak hanya membawa investasi dan kesempatan kerja baru, tetapi juga akan meningkatkan fasilitas infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Kaltim. Bagi kelompok masyarakat ini, informasi yang disampaikan Humas Pemprov Kaltim melalui media resmi, seperti situs web pemerintah, media sosial, dan konferensi pers, dianggap cukup jelas dan meyakinkan, terutama yang menekankan manfaat ekonomi jangka panjang dan rencana penataan lingkungan yang lebih baik.

Kelompok masyarakat ini mengapresiasi upaya Humas dalam memberikan gambaran positif dan terukur tentang perkembangan proyek, yang mencakup data konkret seperti proyeksi lapangan kerja dan investasi. Mereka merasa bahwa informasi yang disampaikan oleh Humas Pemprov Kaltim telah membantu mereka memahami potensi manfaat dari pembangunan IKN dan mengurangi kekhawatiran akan dampak negatif yang mungkin timbul.

2. Pandangan Kritis : Kekhawatiran Terhadap Dampak Lingkungan dan Sosial

Di sisi lain, sejumlah masyarakat mengkhawatirkan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin ditimbulkan oleh proyek IKN. Bagi mereka, pemindahan ibu kota ini menimbulkan potensi risiko bagi lingkungan, terutama degradasi hutan dan ekosistem Kalimantan yang dianggap sebagai paru-paru dunia. Kekhawatiran lainnya mencakup perubahan sosial-budaya yang mungkin terjadi akibat urbanisasi dan potensi konflik lahan dengan masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat.

Kelompok ini cenderung merasa bahwa Humas Pemprov Kaltim belum cukup transparan atau responsif dalam menjawab kekhawatiran terkait isu-isu lingkungan dan sosial ini. Mereka menilai bahwa informasi yang disajikan lebih menonjolkan manfaat ekonomi daripada dampak lingkungan, yang menurut mereka perlu diatasi lebih serius. Bahkan, beberapa dari mereka menganggap Humas terlalu fokus pada narasi positif dan kurang memberikan ruang untuk membahas tantangan atau dampak potensial bagi masyarakat lokal dan lingkungan.

3. Pandangan Skeptis : Ragu Terhadap Transparansi dan Keterbukaan Informasi

Terdapat juga masyarakat yang skeptis terhadap transparansi informasi terkait IKN. Mereka merasa bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Humas Pemprov Kaltim masih terkesan normatif dan cenderung memberikan informasi yang sudah difilter, sehingga kurang menjawab isu-isu mendasar yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Kelompok ini menganggap bahwa media komunikasi Humas, seperti unggahan di media sosial dan artikel di situs web resmi, kurang menjawab pertanyaan kritis terkait alokasi anggaran, kebijakan pemindahan, serta risiko pembengkakan biaya.

Dalam pandangan mereka, komunikasi yang dilakukan oleh Humas belum sepenuhnya membuka diskusi yang kritis dan terbuka terkait berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam pembangunan IKN. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa teralienasi dan kurang dilibatkan dalam proses pemindahan ibu kota, sehingga skeptis terhadap keberhasilan proyek jangka panjang ini.

4. Pandangan Netral : Belum Merasakan Dampak Langsung

Sebagian masyarakat mengambil posisi netral karena belum merasakan dampak langsung dari pembangunan IKN atau tidak memiliki cukup informasi untuk menilai baik atau buruknya proyek tersebut. Mereka cenderung tidak memiliki pandangan yang kuat, baik positif maupun negatif, tentang IKN maupun tentang efektivitas media komunikasi Humas Pemprov Kaltim. Bagi kelompok ini, informasi yang disampaikan Humas Pemprov Kaltim tidak terlalu berpengaruh pada keseharian mereka, dan mereka cenderung menunggu hasil nyata dari pembangunan IKN sebelum membentuk opini tertentu.

Kelompok netral ini menganggap bahwa informasi yang disampaikan Humas mungkin saja cukup, namun mereka belum melihat dampak langsung yang signifikan terhadap kehidupan mereka. Mereka lebih tertarik pada informasi yang konkret dan relevan secara langsung, seperti peluang ekonomi atau dampak keseharian bagi warga Kaltim.

5. Pandangan Progresif : Mengapresiasi Upaya Partisipasi Publik dan Edukasi

Ada pula masyarakat yang melihat sisi positif dari upaya Humas Pemprov Kaltim dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam diskusi publik terkait IKN. Mereka mengapresiasi inisiatif Humas dalam menyelenggarakan sesi tanya jawab, diskusi publik, serta menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat tentang IKN. Bagi kelompok ini, komunikasi publik yang dilakukan Humas

Kaltim sudah cukup baik dalam menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Masyarakat dalam kelompok ini juga menilai bahwa partisipasi publik dalam diskusi tentang IKN sangat penting untuk memastikan agar proyek ini berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Mereka berharap Humas Pemprov Kaltim terus memperluas ruang dialog dan terus memberikan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Wawancara dengan 5 sumber masyarakat lokal menggambarkan beragam sumber informasi dan perspektif masyarakat Kaltim terkait proyek IKN melalui hasil wawancara dengan lima responden yang mewakili berbagai lapisan masyarakat. Pertama, masyarakat pertama lebih mengandalkan media massa, televisi, koran, dan media sosial sebagai sumber utama informasi mereka tentang IKN. Mereka menyatakan tidak pernah menggunakan media resmi Pemprov Kaltim dan menyoroti kurangnya sosialisasi terkait sumber informasi resmi. Di sisi lain, masyarakat kedua aktif menggunakan berbagai media massa, baik online maupun cetak, serta mengakui memanfaatkan situs web resmi Pemprov Kaltim sebagai sumber informasi resmi. Mereka mengejar pemahaman mendalam tentang UU pemindahan IKN, pembangunan infrastruktur, dan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Sebaliknya, masyarakat ketiga mencari informasi melalui platform YouTube, TV, dan juga dari orang dalam, tetapi menyatakan kurangnya pembaruan dan kejelasan dalam informasi.

Masyarakat keempat dan kelima lebih memilih media massa online dan cetak, seperti berita di televisi dan media online. Masyarakat kelima bahkan aktif mengikuti pembaruan dari situs web resmi Pemprov Kaltim dan diskusi di media sosial. Masyarakat kelima juga menyoroti peran yang signifikan dari media resmi Pemprov Kaltim sebagai sumber informasi utama mereka, mencari pemahaman yang lebih dalam tentang dampak proyek IKN terhadap masyarakat setempat, pembangunan infrastruktur, dan peluang kerja. Adapun jenis informasi yang dicari oleh responden bervariasi. Mulai dari penerimaan pegawai dan karyawan, lapangan pekerjaan, hingga progres pembangunan, menjadi fokus masyarakat pertama. Sementara masyarakat kedua mencari informasi tentang UU pemindahan IKN, pembangunan infrastruktur, dan efeknya terhadap masyarakat. Masyarakat kelima, yang aktif mengikuti pembaruan dari situs web resmi Pemprov Kaltim, tertarik pada dampak proyek IKN terhadap masyarakat setempat, pembangunan infrastruktur, dan peluang kerja.

Dalam konteks penggunaan media resmi Pemprov Kaltim, terlihat variasi antara responden. Masyarakat pertama dan ketiga tidak menggunakan media resmi tersebut. Sebaliknya, masyarakat kedua, keempat, dan kelima mengakui kegunaannya, khususnya melalui www.kaltimprov.go.id. Namun, ada sorotan terhadap kekurangan pembaruan dan ketajaman informasi dari media resmi tersebut. Pandangan dan pendapat masyarakat

terhadap informasi yang disediakan oleh Humas Pemprov Kaltim pun beragam. Masyarakat pertama menyatakan tidak mengetahui adanya media resmi dan kurangnya sosialisasi. Masyarakat kedua melihat positif, sementara masyarakat ketiga mengkritisi kurangnya pembaruan dan kejelasan informasi. Masyarakat keempat menyatakan bahwa informasinya cukup, meskipun belum maksimal. Di sisi lain, masyarakat kelima menghargai upaya Humas Pemprov Kaltim, namun berharap agar informasi yang diberikan lebih transparan dan mendalam, terutama terkait proyek-proyek spesifik, rencana ke depan, dan manfaat konkret bagi masyarakat lokal. Masyarakat kelima menyoroti pentingnya peningkatan komunikasi untuk memastikan partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang dampak proyek IKN pada kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, hasil wawancara dengan masyarakat Kaltim memberikan pemahaman yang mendalam tentang beragam perspektif dan harapan terkait informasi IKN di wilayah tersebut.

“...Informasi yang saya butuhkan adalah tentang UU pemindahan IKN, pembangunan infrastruktur IKN dan Efek dari pembangunan IKN ke masyarakat setempat” (Agiel Suwarno : 24 September 2023)

“...Saya tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai proyek IKN, terutama terkait dampaknya terhadap masyarakat setempat, pembangunan infrastruktur, dan peluang kerja. Informasi terkait rencana pembangunan, upaya pelestarian lingkungan, dan dampak sosial ekonomi adalah beberapa aspek yang saya rasa penting untuk diketahui.” (Yunizar Akbar : 25 September 2023)

G. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang pertama berjudul "Strategi Komunikasi Humas Dalam Meningkatkan Citra Positif Pemerintah Kabupaten Langkat (Studi Kualitatif Pada Humas Pemerintah Kabupaten Langkat)" yang ditulis oleh Alya Nur Sabrina dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2019. Memiliki beberapa kesamaan yaitu kedua penelitian bertujuan untuk memahami strategi komunikasi humas pemerintah dalam membangun citra positif, Kedua penelitian fokus pada strategi komunikasi humas pemerintah, dan Kedua penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun, terdapat pula perbedaan dalam hasil penelitian yaitu hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten

Langkat memiliki strategi komunikasi yang baik, seperti menjaga saluran komunikasi, mengatur dan mempersiapkan hubungan masyarakat, dan menjaga keterbukaan dan berita publik. Strategi komunikasi tersebut terbukti efektif dalam membangun citra positif Pemerintah Kabupaten Langkat di mata masyarakat. Hasil penelitian Strategi Komunikasi Humas Kaltim menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan beberapa langkah tepat dalam membangun citra positif IKN, seperti menjalin koordinasi yang baik dengan dinas terkait dan instansi terkait, Membangun hubungan yang positif dengan media massa, Memanfaatkan website dan media sosial.

Pada penelitian terdahulu yang berjudul "Strategi Komunikasi Humas Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Kota Probolinggo" yang ditulis oleh Anyelir Puspa Ayudia dan Siti Dri Wulandari dari Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2021. Kedua penelitian memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan citra positif pemerintah. Dalam hal strategi komunikasi humas, kedua penelitian menemukan bahwa strategi informasi, persuasi, dan dialog merupakan strategi yang penting untuk digunakan. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara kedua penelitian. Pertama, objek penelitiannya berbeda. Penelitian terdahulu fokus pada Pemerintah Kota Probolinggo, sedangkan penelitian ini fokus pada Humas Kaltim untuk IKN. Perbedaan ini menyebabkan fokus penelitiannya juga berbeda. Penelitian terdahulu fokus pada reputasi dan hubungan masyarakat, sedangkan penelitian ini fokus pada citra positif IKN. Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaannya terletak pada tujuan dan strategi komunikasi humas yang digunakan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, fokus penelitian, dan metodologi penelitian.

Pada penelitian terdahulu yang berjudul "Strategi Humas Kota Bandung Melalui Media Sosial Instagram Dalam Meningkatkan Citra Pemerintahan Kota Bandung" yang ditulis oleh Reza Antoni dari Universitas Komputer Indonesia, Bandung pada tahun 2019. Kedua penelitian memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan citra positif pemerintah. Dalam hal strategi komunikasi humas, kedua penelitian menemukan bahwa strategi konten, interaksi, dan promosi merupakan strategi yang penting untuk digunakan. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan antara kedua penelitian. Pertama, objek penelitiannya berbeda. Penelitian terdahulu fokus pada Humas Kota Bandung dalam

menggunakan Instagram, sedangkan penelitian ini fokus pada Humas Kaltim untuk IKN secara keseluruhan. Perbedaan ini menyebabkan fokus penelitiannya juga berbeda. Penelitian terdahulu fokus pada penggunaan Instagram, sedangkan penelitian ini fokus pada strategi komunikasi humas secara keseluruhan.

Pada perbandingan dengan penelitian terdahulu yang berjudul "Strategi Public Relation Humas Pemerintah Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Citra Positif Melalui Media Relations" yang ditulis oleh Alfi Fatin Nabilah dari Institut Agama Islam Negeri Jember pada tahun 2020. memiliki persamaan yaitu tujuan Meningkatkan citra positif pemerintah. Strategi komunikasi humas yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan Media relations untuk Membangun hubungan yang baik dengan media, Sosialisasi Memberikan informasi kepada masyarakat, dan Pemberdayaan masyarakat Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemerintah. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan antara kedua penelitian. Pertama, objek penelitiannya berbeda. Penelitian terdahulu fokus pada Humas Pemkab Jember dalam membangun hubungan dengan media, sedangkan penelitian ini fokus pada Humas Kaltim untuk IKN secara keseluruhan. Perbedaan ini menyebabkan fokus penelitiannya juga berbeda. Penelitian terdahulu fokus pada media relations, sedangkan penelitian ini fokus pada strategi komunikasi humas secara keseluruhan.

Pada penelitian terdahulu terakhir yang berjudul "Peranan Humas Pemerintahan (Government Public Relations) dalam Menciptakan Reputas Pemerintahan yang Baik" yang ditulis oleh Oktri Permata Lani dan Benni Hnadayani dalam Jurnal Ilmu Komunikasi pada tahun 2021. Kedua penelitian memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan citra positif pemerintah. Dalam hal peran humas, kedua penelitian menemukan bahwa humas berperan sebagai komunikator, fasilitator, dan mediator dalam membangun citra positif pemerintah. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan antara kedua penelitian. Pertama, objek penelitiannya berbeda. Penelitian terdahulu fokus pada humas pemerintah secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada Humas Kaltim dalam konteks IKN. Perbedaan ini menyebabkan fokus penelitiannya juga berbeda. Penelitian terdahulu fokus pada peran humas dalam membangun reputasi, sedangkan penelitian ini fokus pada strategi komunikasi humas untuk meningkatkan citra positif. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam bidang komunikasi humas

pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi humas yang efektif, dengan mengedepankan peran humas sebagai komunikator, fasilitator, dan mediator, dapat meningkatkan citra positif IKN di mata masyarakat.

H. Analisis SWOT

Strengths (Kekuatan)

1. **Kredibilitas sebagai Sumber Informasi Resmi:** Sebagai bagian dari pemerintah daerah, Humas Pemprov Kaltim memiliki akses langsung ke data dan informasi resmi terkait proyek IKN, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan tepercaya.
2. **Jaringan Media Lokal yang Luas:** Humas Pemprov Kaltim memiliki hubungan yang baik dengan media lokal di Kalimantan Timur, yang memungkinkan penyebaran informasi secara efektif dan cepat kepada publik setempat.
3. **Penggunaan Media Sosial sebagai Saluran Komunikasi:** Pemanfaatan media sosial oleh Humas Pemprov Kaltim memungkinkan mereka untuk menjangkau segmen publik yang lebih luas dan lebih muda, sekaligus memberikan informasi terbaru dengan cara yang mudah diakses.
4. **Dukungan dari Pemerintah Pusat:** Sebagai representasi pemerintah daerah, Humas Pemprov Kaltim mendapat dukungan dari pemerintah pusat, yang membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan.

Weaknesses (Kelemahan)

1. **Kurangnya Transparansi dalam Menyampaikan Tantangan Proyek:** Materi komunikasi Humas Kaltim sering kali terlalu fokus pada sisi positif pembangunan IKN, sehingga terkesan kurang terbuka mengenai tantangan atau risiko yang mungkin dihadapi. Hal ini bisa menimbulkan skeptisisme di kalangan publik dan media.
2. **Birokrasi yang Menghambat Respons Cepat:** Proses birokrasi yang panjang dalam penyampaian informasi atau pemberian akses kepada jurnalis mengurangi kecepatan respons Humas terhadap isu atau pertanyaan yang muncul di publik, terutama dalam hal memberikan informasi terbaru secara real-time.
3. **Keterbatasan Sumber Daya untuk Menjangkau Publik di Daerah Pedesaan:** Meski media sosial membantu menjangkau publik perkotaan, publik di pedesaan yang tidak memiliki akses mudah terhadap internet atau media sosial menjadi sulit dijangkau oleh Humas Pemprov Kaltim.

4. **Ketergantungan pada Narasi Positif:** Kurangnya narasi kritis dan reflektif dalam komunikasi Humas membuat strategi komunikasi terkesan sepihak. Publik yang sudah kritis terhadap pembangunan IKN akan lebih sulit diyakinkan dengan pendekatan komunikasi ini.

Opportunities (Peluang)

1. **Pertumbuhan Minat Publik pada Proyek IKN:** Adanya minat yang besar dari publik Kalimantan Timur terhadap dampak dan peluang dari proyek IKN memberikan kesempatan bagi Humas untuk mendekati publik dengan informasi yang mereka butuhkan.
2. **Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Komunitas Lokal:** Kolaborasi dengan universitas, sekolah, dan komunitas lokal di Kaltim dapat menjadi strategi efektif untuk menyebarkan informasi yang lebih objektif dan inklusif tentang IKN, sekaligus memperkuat pemahaman publik.
3. **Perkembangan Teknologi Informasi:** Pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi mobile, webinar, dan layanan pesan, dapat memperluas akses publik terhadap informasi resmi mengenai IKN, termasuk di daerah-daerah yang tidak terjangkau media konvensional.
4. **Tren Media Sosial sebagai Platform Diskusi Publik:** Dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai platform diskusi publik, Humas Pemprov Kaltim dapat mengadakan diskusi atau tanya jawab terbuka di media sosial untuk merespons langsung isu-isu yang muncul.

Threats (Ancaman)

1. **Kritik dari Kelompok Lingkungan dan Masyarakat Adat:** Kelompok publik yang kritis terhadap dampak lingkungan dan sosial dari proyek IKN dapat memengaruhi opini publik dan memperlemah efektivitas komunikasi Humas Pemprov Kaltim jika tidak ditanggapi dengan baik.
2. **Tingkat Skeptisisme Publik yang Meningkat:** Ketidakpercayaan publik terhadap narasi resmi yang dianggap kurang transparan dan terlalu positif dapat memperkuat resistensi publik terhadap informasi yang diberikan oleh Humas Pemprov Kaltim.
3. **Kompetisi dari Informasi yang Beredar di Media Independen:** Dengan adanya media alternatif yang independen dan sering kali lebih kritis, Humas Pemprov Kaltim harus bersaing dengan narasi yang mungkin lebih mudah diakses dan dipercaya oleh publik.
4. **Isu Keamanan dan Keberlanjutan Lingkungan:** Isu lingkungan seperti deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan dampak sosial terhadap komunitas lokal, yang sering menjadi

perhatian media lokal dan internasional, dapat melemahkan citra positif yang dibangun oleh Humas Pemprov Kaltim jika tidak disertai komunikasi yang transparan.

Dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada, Humas Pemprov Kaltim dapat memperbaiki strategi komunikasi mereka agar lebih efektif dan inklusif. Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial secara optimal, serta peningkatan transparansi dalam menyampaikan tantangan yang dihadapi proyek IKN, akan membantu membangun kepercayaan publik. Humas Pemprov Kaltim juga disarankan untuk melakukan komunikasi yang lebih kolaboratif dengan komunitas dan kelompok lokal guna merespons secara langsung kebutuhan informasi publik yang beragam.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Humas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memiliki peran penting dalam membentuk citra positif mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN), yang merupakan proyek besar yang membawa dampak langsung terhadap daerah tersebut. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam komunikasi publik, Humas Pemprov Kaltim bekerja untuk menyampaikan informasi yang relevan, faktual, dan akurat mengenai pembangunan IKN kepada publik. Humas memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, mulai dari media sosial, media lokal, hingga keterlibatan langsung dengan komunitas dan lembaga pendidikan setempat untuk menyebarkan pesan positif mengenai IKN.

Strategi utama Humas Pemprov Kaltim adalah untuk menonjolkan dampak positif dari pembangunan IKN, seperti potensi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, serta manfaat sosial bagi masyarakat Kalimantan Timur. Untuk mendukung hal ini, Humas sering menyajikan data dan informasi terkait proyek IKN dalam bentuk yang mudah dipahami dan menarik perhatian, baik melalui infografis, artikel, maupun video yang dibagikan di media sosial dan portal berita lokal. Keberadaan IKN juga digambarkan sebagai peluang besar bagi Kalimantan Timur, baik dari sisi pembangunan daerah maupun pembukaan akses ekonomi yang lebih luas. Selain itu, Humas juga berusaha untuk menjawab berbagai pertanyaan dan kekhawatiran yang muncul di masyarakat, terutama terkait dampak lingkungan dan sosial.

Dengan demikian, mereka aktif dalam mengadakan sesi tanya jawab, seminar, dan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat adat dan kelompok lingkungan, untuk menjelaskan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan dalam pembangunan IKN, serta bagaimana proyek ini akan berdampak positif dalam jangka panjang. Namun, berdasarkan analisis SWOT, ada sejumlah aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas strategi komunikasi Humas Pemprov Kaltim dalam membentuk citra positif IKN.

1. Kekuatan (Strengths)

Humas Pemprov Kaltim memiliki keunggulan sebagai sumber informasi resmi yang memiliki akses langsung ke data dan kebijakan pemerintah terkait IKN. Ini memungkinkan Humas untuk

memberikan informasi yang akurat dan tepercaya kepada publik. Selain itu, hubungan yang baik dengan media lokal di Kalimantan Timur memperkuat penyebaran pesan-pesan positif tentang proyek IKN ke masyarakat. Penggunaan media sosial yang semakin populer juga menjadi kekuatan dalam mendekatkan informasi kepada segmen-segmen publik yang lebih luas, terutama kalangan muda yang lebih aktif di platform-platform digital.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Namun, ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah kurangnya transparansi dalam menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam proyek IKN. Materi yang disampaikan cenderung terlalu menonjolkan sisi positif, sementara kekhawatiran atau potensi risiko yang mungkin terjadi seringkali tidak dibahas secara terbuka. Hal ini dapat menimbulkan rasa skeptisisme di kalangan publik yang merasa bahwa informasi yang diberikan tidak objektif atau terlalu mengarah pada promosi. Selain itu, proses birokrasi yang panjang dalam memberikan akses kepada media dan masyarakat terkadang menghambat kecepatan respons terhadap isu-isu yang muncul. Keterbatasan ini juga berpengaruh pada upaya untuk merespons kritik dengan cepat dan efisien.

3. Peluang (Opportunities)

Terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki komunikasi publik. Pertama, dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap proyek IKN, Humas Pemprov Kaltim dapat memperluas keterlibatannya dengan berbagai elemen publik, termasuk sektor pendidikan dan komunitas lokal, untuk menyebarkan informasi yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Humas juga memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan universitas atau lembaga riset untuk menyediakan data yang lebih mendalam dan berbasis penelitian mengenai dampak sosial dan ekonomi IKN bagi Kalimantan Timur. Selain itu, perkembangan teknologi informasi memungkinkan Humas untuk memperkenalkan aplikasi atau platform komunikasi berbasis mobile yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara real-time dan langsung dari sumber yang kredibel. Peluang lainnya adalah memanfaatkan media sosial untuk melibatkan publik dalam diskusi terbuka mengenai IKN. Dengan mengadakan forum diskusi, polling, atau sesi tanya jawab di platform seperti Instagram, Twitter, atau Facebook, Humas Pemprov Kaltim dapat menciptakan ruang bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan opini tentang IKN. Ini juga dapat menjadi kesempatan untuk menjawab langsung berbagai kritik atau kebingungannya, serta memperbaiki miskonsepsi yang mungkin ada.

4. Ancaman (Threats)

Di sisi lain, terdapat beberapa ancaman yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah kritik dari kelompok masyarakat yang lebih kritis terhadap dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan IKN, seperti kelompok lingkungan hidup dan masyarakat adat. Kelompok-kelompok ini sering mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi kerusakan ekosistem, kehilangan lahan, dan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat lokal. Jika tidak diatasi dengan baik, hal ini bisa mempengaruhi citra positif yang dibangun oleh Humas Pemprov Kaltim.

Ancaman lain adalah meningkatnya skeptisisme publik terhadap informasi resmi. Banyak publik yang mungkin merasa bahwa informasi yang diberikan oleh Humas Pemprov Kaltim cenderung terlalu dipoles dan tidak menyentuh masalah-masalah yang lebih sensitif. Jika publik merasa bahwa informasi yang diberikan tidak objektif, maka ini bisa memperburuk citra IKN di mata masyarakat, terutama mereka yang sudah memiliki pandangan kritis terhadap proyek ini. Selain itu, keberadaan media alternatif atau independen yang lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah juga bisa menjadi ancaman bagi komunikasi Humas, karena mereka sering kali menyajikan informasi yang lebih tajam dan berfokus pada masalah yang lebih mendalam, seperti dampak sosial dan lingkungan.

Secara keseluruhan, Humas Pemprov Kaltim telah melakukan berbagai upaya untuk membentuk citra positif tentang IKN melalui komunikasi yang informatif dan proaktif. Namun, untuk meningkatkan efektivitas strategi komunikasi, Humas perlu memperhatikan kelemahan terkait transparansi, kecepatan respons, dan keterbukaan terhadap berbagai perspektif kritis. Dengan memanfaatkan peluang yang ada, seperti perkembangan teknologi informasi dan media sosial, serta menghadapi ancaman dengan komunikasi yang lebih terbuka dan inklusif, Humas Pemprov Kaltim dapat lebih efektif dalam membentuk citra positif IKN yang dapat diterima oleh seluruh publik Kalimantan Timur.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, yang dapat mempengaruhi proses pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan yang diperoleh. Salah satu keterbatasan utama adalah kendala dalam pengumpulan data. Penelitian ini bergantung pada wawancara dengan sejumlah narasumber, termasuk pihak Humas Pemprov Kaltim, jurnalis lokal, dan publik. Kendala yang muncul adalah terbatasnya akses terhadap beberapa narasumber yang relevan. Beberapa

pihak terkait tidak selalu dapat diwawancarai dalam waktu yang diinginkan, yang membatasi variasi perspektif yang dapat dikumpulkan. Selain itu, keterbatasan dalam melakukan observasi langsung terhadap implementasi strategi komunikasi Humas Pemprov Kaltim juga mempengaruhi kedalaman analisis mengenai efektivitas komunikasi yang dijalankan oleh lembaga tersebut.

Waktu yang terbatas juga menjadi salah satu kendala dalam penelitian ini. Dengan durasi penelitian yang terbatas, ruang lingkup analisis pun menjadi terbatas. Hal ini menyebabkan beberapa aspek komunikasi yang lebih mendalam atau terkait dengan perkembangan terbaru dari proyek IKN tidak dapat digali lebih jauh. Penelitian ini tidak dapat mengakomodasi seluruh variabel yang mempengaruhi strategi komunikasi Humas Pemprov Kaltim, dan hanya fokus pada beberapa aspek yang dianggap krusial. Selain itu, jumlah narasumber yang diwawancarai pun terbatas, yang dapat mempengaruhi representasi keseluruhan perspektif publik atau media dalam merespons komunikasi yang dilakukan oleh Humas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini juga terbatas pada wawancara, dokumentasi, serta laporan media. Sumber-sumber ini mungkin tidak sepenuhnya objektif, karena mereka cenderung mencerminkan pandangan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan proyek IKN, seperti pihak Humas Pemprov Kaltim atau media lokal yang meliput topik ini. Hal ini bisa mengarah pada dominasi narasi yang lebih positif terkait IKN, sementara pandangan kritis dari masyarakat atau kelompok tertentu yang skeptis terhadap proyek ini mungkin kurang terefleksi dalam data yang ada. Bahkan informasi yang diperoleh dari media lokal mungkin terbatas pada liputan tertentu yang dipengaruhi oleh kebijakan editorial masing-masing media.

Selain itu, bias dalam penyampaian informasi juga menjadi salah satu kendala yang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Meskipun peneliti berusaha untuk menjaga objektivitas, pandangan pribadi narasumber, baik dari Humas Pemprov Kaltim maupun jurnalis lokal—dapat mempengaruhi cara mereka menyampaikan informasi, yang pada gilirannya mempengaruhi interpretasi peneliti terhadap data yang dikumpulkan. Bias ini dapat menjadi kendala dalam memperoleh gambaran yang sepenuhnya objektif tentang strategi komunikasi Humas Pemprov Kaltim dan reaksi publik terhadapnya.

Keterbatasan lainnya terkait dengan akses terhadap data yang terus berkembang. Mengingat proyek IKN merupakan sebuah proyek besar yang terus berlangsung, data yang tersedia pada saat penelitian dilakukan mungkin belum sepenuhnya menggambarkan perkembangan terbaru dari proyek tersebut. Beberapa informasi yang relevan terkait dengan kebijakan atau strategi komunikasi yang diterapkan oleh

Humas Pemprov Kaltim mungkin belum dipublikasikan atau tersedia pada waktu tertentu, yang bisa memengaruhi pemahaman peneliti tentang proyek tersebut dalam konteks yang lebih luas dan dinamis. Terakhir, difusi informasi yang sangat cepat mengenai IKN menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks proyek sebesar ini, informasi berkembang dengan cepat, dan hal ini dapat menyulitkan peneliti dalam mendapatkan data yang up-to-date mengenai kebijakan atau strategi komunikasi yang dijalankan. Beberapa perubahan dalam proyek atau kebijakan mungkin terjadi setelah data dikumpulkan, yang membuat analisis yang dilakukan tidak sepenuhnya relevan dengan situasi terbaru.

Meskipun demikian, meski penelitian ini menghadapi berbagai keterbatasan, peneliti telah berupaya untuk mengatasinya dengan cara memperluas cakupan wawancara dan menggunakan berbagai sumber data yang ada. Keterbatasan-keterbatasan ini juga memberikan peluang untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam dalam menggali pengaruh strategi komunikasi Humas Pemprov Kaltim terhadap persepsi dan citra publik mengenai IKN.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran/rekomendasi kepada lembaga atau kelompok tertentu yang terkait dengan penelitian serta bagi penelitian selanjutnya.

1. Saran/Rekomendasi untuk Humas Pemprov Kaltim

a) Meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat

Humas Pemprov Kaltim perlu meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan harus akurat, lengkap, dan mudah dipahami. Humas Pemprov Kaltim juga perlu menggunakan bahasa yang komunikatif dan menarik agar masyarakat tertarik untuk membaca atau menonton informasi tersebut.

b) Mengembangkan strategi komunikasi yang lebih kreatif dan inovatif

Humas Pemprov Kaltim perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih kreatif dan inovatif. Humas Pemprov Kaltim dapat menggunakan berbagai media dan platform untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Humas Pemprov Kaltim juga dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti komunitas, akademisi, dan pelaku usaha, untuk menyebarkan informasi tentang IKN Nusantara.

c) Melakukan evaluasi secara berkala

Humas Pemprov Kaltim perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas strategi komunikasi yang digunakan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan melakukan survei atau wawancara kepada masyarakat.

2. Saran/Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

a) Menerapkan metode penelitian yang lebih beragam

b) Penelitian selanjutnya dapat menerapkan metode penelitian yang lebih beragam, seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara kelompok. Metode-metode ini dapat membantu peneliti untuk menangkap informasi yang lebih lengkap dan mendalam.

c) Memperluas cakupan penelitian

d) Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitian dengan mengkaji faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi citra IKN Nusantara. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi ekonomi, politik, dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

e) Melakukan penelitian secara longitudinal

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara longitudinal untuk melihat perkembangan citra IKN Nusantara secara jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Sabrina A, N,. (2019). *Strategi Komunikasi Humas Dalam Meningkatkan Citra Positif Pemerintah Kabupaten Langkat (Studi Kualitatif Pada Humas Pemerintah Kabupaten Langkat)*. Jurnal Skripsi.

Ayudia A P, Wulandari S S,. (2021). *Strategi Komunikasi Humas Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Kota Probolinggo*. Jurnal Office Administration: Education and Practice. Volume 1 No 2.

Herlina S,. (2015). *Strategi Komunikasi Humas Dalam Membentuk citra Pemerintahan di Kota Malang*. Jurnal Ilmu Sosial Polotik. Vol 4 No 3.

Lubis E E,. (2012). *Peran Humas Dalam Membentuk Citra Pemerintah*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume 12, Nomor 1.

Antoni R,. (2019). *Strategi Humas Kota Bandung Melalui Media Sosial Instagram Dalam Meningkatkan Citra Pemerintahan Kota Bandung*. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia.

Buku :

Effendy, O, U. (2011). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Arifin, A. (1988). *Ilmu komunikasi: sebuah pengantar ringkas*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Nilla Sari, B, W, S.T.P. (2012). *Humas Pemerintah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Macnamara , J. Agung, S. (2013). *Strategi Public Relation*. Gramedia Pustaka Utama.

Suprawoto. (2018). *Government Public Relations : Perkembangan dan Praktik di Indonesia*. Prenada Media.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara*.

Rakhmadi,H. Gofur, A,A. Arma, O. (2015). *PR In Government – Bunga Rampai Program Kehumasan di Pemerintahan*. Jakarta : Bamboedoea Komunikasi.

Suryanto, S Sos, M Si. (2013). *Membangun Citra Dengan Metode Public Relations*. Solo : Arfino Raya.

Moore, H. F. (2004). *Humas: membangun citra dengan komunikasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Kanisius.

Website :

<https://kaltimprov.go.id/berita/biro-humas-berubah-nama-tupoksi-tidak>

<https://sman3cikarangutara.sch.id/read/4/strategi-komunikasi-pengertian-teknik-langkah-dan-hambatan>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-humas/>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220202/47/1495882/ini-alasan-di-balik-pemindahan-ibu-kota-negara-ke-nusantara>

<https://sosiologi.fisip.unair.ac.id/opini-masyarakat-mengenai-pemindahan-ibukota-ke-kali-mantan-timur/>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60224001>

LAMPIRAN

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN GAJAH MADA NO. 1 TELEPON (0541) 733333, FAX (0541) 732746-737762
Homepage : <http://kalimprov.go.id>
SAMARINDA 75121

SURAT KETERANGAN
No: 000.5.3.1/2813/B.Adpim-II

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur, Menerangkan bahwa :

Nama : Aditya Arta Listianto
NIM : 19321260
Fakultas : Psikologi dan Sosial Budaya
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Humas Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Membangun Citra Positif Ibu Kota Negara Baru Di Mata Masyarakat "

Benar, telah melakukan penelitian di Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalimantan Timur pada tanggal 10 Agustus 2023 s.d 05 Januari 2024.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Samarinda, Februari 2024
Kepala Biro Administrasi Pimpinan

**SYAMSUL AWWIYAH, S.Sos, M.Si**
18081991032007

Lampiran 1. 1 Surat Keterangan Wawancara bersama humas Kaltim